

**BAB IV**  
**FAKTOR PENGARUH PERUBAHAN ORIENTASI**  
**POLITIK MASYARAKAT AIR TIRIS TERHADAP PARTAI**  
**POLITIK ISLAM PADA PEMILIHAN UMUM 1999, 2004,**  
**2009 dan 2014**

Pada bagian ini akan dilakukan analisis tentang faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam, yang ditandai dengan kecenderungan penurunan perolehan suara partai-partai politik Islam, dengan tiga faktor, kepercayaan agama (aliran), identifikasi partai, dan peranan elite yang dianggap cukup memadai. Analisis ketiga faktor ini dalam kaitannya dengan masyarakat Air Tiris mengawali pemecahan permasalahan penelitian ini.

Diawali dengan analisis tentang santri-abangan, partai Islam dan elite di masyarakat Air Tiris, kemudian berikutnya dilakukan analisis faktor pengaruh terhadap perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 terhadap partai-partai politik Islam, yang beresensikan sikap masyarakat Air Tiris terhadap kepemimpinan, karakter, lambang, strategi rekrutmen, dan strategi kampanye partai-partai politik Islam dalam kerangka konsep santri-abangan (aliran), identifikasi partai dan elite.

**4.1. Santri-abangan, Partai Islam dan Elite**

Analisis tentang santri-abangan, partai Islam dan elite di masyarakat Air Tiris dilakukan untuk memberi gambaran karakter masyarakat Air Tiris, karakter partai-partai politik Islam dan elite. Secara teoritik karakter masyarakat santri cenderung berorientasi pada partai-partai politik Islam, sebaliknya, karakter masyarakat

abangan cenderung berorientasi kepada partai-partai politik non Islam.

Di Air Tiris partai-partai politik Islam telah eksis sejak pemilihan umum 1955 sampai dengan pemilihan umum 2014. Partai politik Islam merupakan partai-partai politik yang berazaskan Islam dan partai-partai politik yang berkecenderungan menonjolkan simbol-simbol ke-Islaman serta partai-partai politik yang berbasis pendukung umat Islam. Keberadaan partai-partai politik Islam di Air Tiris mengalami dinamika yang fluktuatif.

Elite pada dasarnya adalah sekelompok pemuka masyarakat atau tokoh di dalam suatu komunitas masyarakat. Pada masyarakat tertentu, masyarakat pedesaan misalnya, kelompok elite memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan masyarakat. Mereka menjadi panutan. Termasuk dalam kegiatan pemilihan umum, kelompok elite sering menentukan kecenderungan orientasi politik masyarakatnya.

#### **4.1.1. Santri-abangan di Air Tiris**

Pembedaan santri-abangan pada dasarnya dilihat dari praktik masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam. Abangan-santri berbeda dalam dua hal, pertama, abangan tidak memeluk Islam secara sungguh-sungguh sedangkan santri memeluk Islam secara sungguh-sungguh. Kedua, basis sosial abangan adalah rumah tangga dengan acara "slametan" atau "kenduri" sebagai acara ritual yang diselenggarakan bersama-sama. Sementara itu, basis sosial kaum santri adalah umat Islam atau masyarakat Islam.

Seorang ahli antropologi budaya, Koentjaraningrat, membagi masyarakat muslim Jawa ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok sinkretik dan kelompok puritan.

Dalam menerangkan perbedaan dua kelompok ini, Koentjaraningrat menulis :

*“many of these Javanese, however, do not follow the principles or ‘cornerstones’ of Islam, the rukun (pillars) Islam seriously. They do not, for example, perform the five daily shalat or incantations, nor the weekly shalatul jum’at. Neither do they considerably the strong moslem taboo against eating pork, and many do not have desire to perform the hajji, or pilgrimage to Mecca. Many Javanese, however, do fast during the month of puasa or ramadhan..... they firmly believe in God (Allah), and like moslem in general, they believe that Muhammad is Allah’s prophet. They also believe that if they lead a good life their soul will go to heaven (munggah swargi), but leading a bad life will bring them to hell (neraka). They are aware that Islam has a sacred book each contains Allah’s words. Most of them even now the name Koran, and each of them has at least once in his life pronounced the moslem confession of faith, the al-fatihah, that is, at his circumcision ceremony. However ... these Javanese moslems also believe in a great many other religious concept, super natural beings, and powers, and they also perform many religious ceremonies, which have little connection with the official religious doctrine of Islam.”<sup>1</sup>*

(“banyak masyarakat Jawa, bagaimanapun, tidak menjalankan prinsip-prinsip dasar Islam, rukun Islam, secara sungguh-sungguh. Mereka, misalnya, tidak menjalankan shalat lima waktu, atau juga shalat Jumat. Mereka tak segan makan daging babi yang diharamkan, juga banyak yang tidak ingin menjalankan ibadah haji ke Mekah. Sementara banyak juga masyarakat Jawa,

---

<sup>1</sup>RM. Koentjaraningrat, *Javanese Culture*(Oxford: Oxford University Press, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985), hlm.317

bagaimanapun, menjalankan puasa selama bulan Ramadhan ..... mereka percaya kepada Tuhan Allah, dan seperti orang Islam kebanyakan, mereka percaya bahwa Muhammad Utusan Allah. Mereka juga percaya bahwa jika mereka berbuat baik ruh mereka akan masuk surga, tetapi jika berbuat buruk akan membawa mereka ke neraka. Mereka menyadari bahwa Islam memiliki kitab suci yang berisi firman Allah. Namanya adalah Al Quraan, dan masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka menyatakan kepercayaan Islamnya, al Fatihah, yaitu, dalam acara khitanan. Bagaimanapun ..... masyarakat Islam Jawa ini juga percaya terhadap konsep-konsep agama besar yang lain, kekuatan supra natural, dan kekuatan-kekuatan, dan mereka juga memperingati upacara keagamaan yang lain, yang memiliki hubungan sedikit dengan doktrin agama Islam”).)

Sementara itu R. William Liddle mengatakan :  
“Sebagian besar penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah kaum abangan, pewaris tradisi kepercayaan asli kuno yang mengalami penyesuaian tetapi tidak pernah lenyap oleh gelombang perubahan agama yang secara periodik menyapu pulau Jawa. Karena selama berabad-abad berulang kali mengalami pesentuhan dengan agama Islam upacara selamat, misalnya, mengandung unsur Islam yang penting mereka menganggap diri sebagai orang Islam untuk berbagai maksud tetapi komitmen sepenuhnya pada Islam dianggap suatu pengingkaran terhadap identitas mereka sebagai orang Jawa. Santri adalah orang yang sungguh-sungguh memilih Islam sebagai agama. Sejak awal abad ke 20 orang Islam telah terpisah menjadi dua kelompok; kaum reformis atau pembaharu, yang ingin membersihkan Islam Jawa dan Islam Indonesia dari

khurafat yang berasal dari tradisi Jawa dan dari perkembangan historis Islam di Timur Tengah; dan kaum konservatif atau kaum tradisional, yang berkeras bahwa Islam, sebagaimana mereka dan orang tua mereka kenal termasuk ketaatan total kepada mazhab Syafii dan juga banyak kepercayaan dan tafsiran Jawa yang masuk kedalamnya adalah agama yang benar. Di mata kaum abangan, santri adalah seorang ekstrimis, nyaris bukan orang Jawa. Bagi kaum santri, terutama reformis yang agresif, kaum abangan adalah orang yang lemah, tipis, atau palsu imannya<sup>2</sup>.

Pada awal 1950-an perbedaan antara kaum abangan dan kaum santri, dan perbedaan seterusnya antara santri pembaharu dan santri tradisional, merupakan dasar utama organisasi partai politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. NU menjadi partai Islam tradisional, Masyumi (sebagian besar melalui Muhammadiyah) menjadi partai Islam pembaru. Sedangkan PKI dan PNI bersaing mendapatkan dukungan kaum abangan. Ada juga persaingan tertentu antar Masyumi dan NU di kalangan komunitas santri. Bagi banyak orang Islam, khususnya masyarakat Air Tiris, perbedaan ajaran tidaklah tajam, dan para pemuka Islam dan banyak para pengikut mereka kadang-kadang terpikat oleh partai lain yang menawarkan janji-janji kedudukan atau bantuan keuangan, akan tetapi di antara dua dunia itu, santri dan abangan tidak ada persaingan partisan.

Sedangkan mengenai NU dapat diterangkan bahwa pada prinsipnya NU menggenggam pendirian dasar bahwa Islam adalah agama fitri atau suci, yang bersifat

---

<sup>2</sup>R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: Grafiti, 1992), hlm.207-208

menyempunakan segala kebaikan yang secara dasarnya sudah dimiliki manusia. Dari prinsip tersebut, NU tidak pernah berniat menghapus nilai-nilai yang sudah menjadi milik masyarakat. NU ingin menyempurnakan dan membimbing nilai-nilai atau tradisi yang telah ada di masyarakat, sehingga selaras dengan ajaran Islam<sup>3</sup>. Melalui gambaran konseptual di depan orientasi sosial keagamaan masyarakat Air Tiris dapat difahami.

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa jumlah penduduk masyarakat Air Tiris sebanyak 5.418 orang. Untuk memahami orientasi sosial keagamaan masyarakat Air Tiris dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap keberadaan simbol keagamaan dan praktek tingkah laku keagamaan masyarakat sudah cukup memadai dan efektif. Dari 5.418 orang penduduk Air Tiris, tak seorangpun yang beragama selain Islam, seratus persen penduduk beragama Islam. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya hanya akan membahas simbol-simbol keagamaan dari agama Islam.

Simbol-simbol keagamaan masyarakat Air Tiris dapat disebutkan antara lain: masjid, mushalla, madrasah, pesantren, lembaga-lembaga pengajian, dan juga organisasi sosial kemasyarakatan. Masyarakat Air Tiris memiliki 6 buah masjid dan 18 mushalla dari masyarakat yang terdiri dari 11 RW atau 24 RT, dengan sekitar 3.318 penduduk dewasa berumur 17 tahun ke atas. Kegiatan di masjid dan mushalla antara lain adalah sholat lima waktu dan pengajian anak-anak, sedangkan khusus sholat jamaah Jum'at dilakukan di masjid. Kegiatan sholat lima waktu di masjid dan musholla nampak semarak, terutama untuk sholat jamaah maghrib dan isya. Demikian pula

---

<sup>3</sup>Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992) hlm. 12.

pengajian anak-anak yang mengambil waktu ba'da maghrib sampai isya dengan mempelajari, terutama cara membaca al-Quran dan hafalan surat-surat pendek dari Al-Qur'an.

Shalat jamaah Jumat hanya dilaksanakan di masjid yang jumlahnya 6 buah. Dari 6 masjid tersebut masing-masing rata-rata dihadiri sekitar 250 jamaah, yang berarti 1.500 orang untuk keseluruhan masjid atau sekitar 85 % dari warga laki-laki dewasa menghadiri sholat jamaah Jumat.

Ditinjau dari keberadaan lembaga pendidikan, di samping terdapat lembaga pendidikan informal berupa pengajian-pegajian seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya terdapat banyak kelompok majelis taklim. Di masyarakat Air Tiris terdapat lembaga pendidikan formal, yaitu 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) Negeri, satu Madrasah Tsanawiyah ( MTs), dan satu Madrasah Aliyah (MA), baik MTs maupun MA mendapat bantuan guru-guru yang berstatus pegawai negeri. Madrasah-madrasah ini sejak berdirinya tidak pernah menggunakan nama NU atau Muhammadiyah. Di samping itu, juga terdapat sebuah Pondok Pesantren yang menampung sekitar 250 orang santri.

Kelompok-kelompok majelis taklim yang ada menyelenggarakan pengajian-pengajian rutin, dari mingguan sampai bulanan, yang pada dasarnya berisi ceramah agama Islam. Ceramah agama Islam tersebut biasanya dilengkapi dengan amalan-amalan, seperti membaca surat Yaasin, semaan Al-Qur'an, membaca tahlil, dan lain-lain. Dari sejumlah kelompok majelis taklim yang ada, tidak satupun yang mengatasmakan organisasi, baik NU maupun Muhammadiyah.

Sedangkan apabila ditinjau dari keberadaan organisasi sosial keagamaan atau kemasyarakatan, secara

formal terdapat pengurus cabang, baik Muhammadiyah maupun Tarbiyah. Namun seluruh kegiatan keagamaan yang terjadi tak satupun mengatasnamakan organisasi, baik Tarbiyah maupun Muhammadiyah. Dari segi pengakuan dan pernyataan beberapa tokoh masyarakat, sebagian kecil yang secara eksplisit mengaku sebagai Tarbiyah maupun Muhammadiyah. Sebagian besar tidak menyebut dirinya Tarbiyah atau Muhammadiyah, melainkan hanya mengaku sebagai seorang Islam saja, bukan Tarbiyah dan bukan Muhammadiyah. Tetapi bila diperhatikan praktek-praktek keagamaannya, sebagian besar masyarakat Air Tiris masih nampak tradisi ke-Tarbiyahan-an atau tradisi yang dibiasakan oleh Tarbiyah, seperti kenduri atau selamatan, kenduri untuk orang meninggal, tahlilan, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak terjadi persaingan yang mengutamakan perbedaan antara Tarbiyah dengan Muhammadiyah, tetapi sebaliknya mereka secara bersama-sama melakukan kegiatan keagamaan hanya dengan simbol dan nama Islam<sup>4</sup>.

Dari gambaran tentang simbol-simbol keagamaan dan praktek-praktek kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tersebut di depan, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Air Tiris, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar adalah masyarakat santri. Sebagian besar warga masyarakat mengambil peranan langsung dalam kegiatan-kegiatan keagamaan Islam secara intensif. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Arsyad<sup>5</sup>, tokoh masyarakat adat :

---

<sup>4</sup>Pengamatan langsung dan wawancara dengan 12 Orang warga masyarakat Air Tiris, selama 1 bulan, yaitu pada bulan Oktober 2011.

<sup>5</sup>Wawancara dengan seorangwarga masyarakat Air Tiris, tokoh adat, pada tanggal 15 Oktober 2011.



“ Ketika ada himbauan di masjid atau surau, akan ada acara maulud nabi atau acara keagamaan lainnya, umumnya mereka datang, mereka tidak mempermasalahkan apakah yang mengundang komunitas Tarbiyah atau Muhammadiyah. Mereka juga datang bersama-sama ketika diadakan pertemuan di masjid atau mushalla”.

#### **4.1.2. Partai-partai Politik Islam di Air Tiris**

Secara formal, partai-partai politik Islam di Indonesia telah mengikuti pemilihan umum sebanyak 8 kali, walaupun pemilihan umum telah dilaksanakan 11 kali, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada pemilihan umum 1987, 1992 dan 1997 partai-partai politik Islam tidak mengikuti pemilihan umum karena partai-partai Islam tersebut telah tiada, telah dibubarkan atau membubarkan diri. Bagi masyarakat Air Tiris, partai-partai politik Islam telah mereka kenal sejak partai-partai politik Islam tersebut terbentuk menyusul proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian besar masyarakat Air Tiris memandang bahwa partai-partai politik Islam yang mengalami pergantian nama dan tanda gambar dari Masyumi, NU kemudian Parmusi, NU dan kemudian PPP; dan juga dari Bulan Bintang, Bumi Bintang, Ka’bah, dan kemudian Bintang, dan kemudian Ka’bah lagi-tetap masih eksis sampai saat ini, dan seakan telah menjadi idola sebagian dari mereka. Identifikasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam ini telah secara terus-menerus dari pemilihan umum ke pemilihan umum memberikan warna bagi partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris.

Identifikasi partai merupakan kondisi psikologis seseorang terhadap ketertarikan kepada partai atau

organisasi politik tertentu. Ketertarikan atau kecintaan terhadap partai tersebut berkembang sejak awal kehidupannya melalui sosialisasi politik, yaitu suatu proses penularan atau penerusan nilai-nilai dan norma-norma dari generasi ke generasi. Peranan agen-agen seperti orang tua, saudara kandung, kelompok bermain, sekolah, dan organisasi politik sangat penting dalam mengolah dan menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma politik dalam masyarakat<sup>6</sup>.

Dalam kaitannya dengan proses sosialisasi politik ini, Emmerson, dalam studinya mengenai elite Indonesia, mendapati proses sosialisasi politik yang berbeda antara para elite abangan dan santri. Dia menunjukkan jalur-jalur yang berbeda yang dilalui oleh masing-masing kelompok elite selama perkembangan masa kanak-kanak dan berikut masa remaja. Kaum abangan cenderung melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dunia Jawa-Hindu dalam organisasi-organisasi nasionalis sekuler, sedangkan kaum santri cenderung bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dunia ke-Islaman, memasuki pesantren atau organisasi sosial politik Islam. Melalui proses seperti ini identifikasi terhadap partai politik tertentu berkembang.<sup>7</sup>

Dalam sub bab sebelumnya telah disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Air Tiris adalah kaum santri. Kenyataan ini diperkuat dengan ketertarikan dan kecintaan mereka terhadap partai-partai Islam yang mereka dukung dan pilih pada setiap kali pemilihan umum sejak pemilihan umum pertama tahun 1955. Sebelum partai-partai Islam

---

<sup>6</sup>Afan Gaffar, *Javanese Voters a Case Study of Election Under a Hegemonic Party System* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm.16.

<sup>7</sup>Donal K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Cultural and Cultural Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1976).

didirikan, warga masyarakat Air Tiris telah didominasi oleh kelompok pemuka masyarakat yang tergolong sebagai kaum santri. Mereka kebanyakan berpendidikan pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Penyebaran nilai-nilai agama Islam, kemudian, di samping melalui pengajian-pengajian di masyarakat Air Tiris sendiri, banyak diantara warga masyarakat Air Tiris yang menimba ilmu agama di Bangkinang, Kampar, Bukit Tinggi. Pada tahun-tahun setelah Indonesia merdeka, di Bangkinang, ibu kota kabupaten Kampar, ini terdapat sebuah pesantren yang sangat terkenal, Pesantren Darrun-Nahdzah, tempat masyarakat sekitar belajar.

Seperti telah diketahui bahwa dalam dekade pertama setelah kemerdekaan, partai-partai politik mendominasi kehidupan kenegaraan, yang juga berarti menjadi penguasa negara. Kedudukan partai-partai politik seperti ini ternyata tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga berlaku sampai di tingkat daerah bahkan sampai di tingkat masyarakat desa.

Dalam mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat, partai-partai politik berkembang sesuai dengan sifat pluralis masyarakat dengan variasi ideologi dan program serta banyaknya partai. Karena ideologi difungsikan oleh partai sebagai pengikat perbedaan aspirasi dan kepentingan para pendukungnya, maka jumlah partai tersebut menunjukkan variasi ideologi politik dalam sistem kepartaian saat itu. Agama Islam, yang banyak pemeluknya dipandang sebagai agama yang sempurna mengandung tata nilai dunia-akhirat, juga dijadikan ideologi beberapa partai politik.

Pada tanggal 30 Oktober 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang bertindak sebagai parlemen sementara sebelum diadakan pemilihan

umum memutuskan untuk mendirikan partai politik dengan konsep banyak partai (*multy party*) dengan pertimbangan bahwa “berbagai pendapat yang ada di dalam masyarakat akan tersalur secara tertib”. Di samping itu keputusan tersebut didasarkan pula atas pertimbangan bahwa “partai politik akan menjadi dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keselamatan bangsa”. Setelah dikeluarkan Ketetapan Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, maka terbentuklah berbagai partai politik yang secara umumnya merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi sosial dan partai politik yang sudah dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Maka terbentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada tanggal 7 November 1945, Partai Komunis Indonesia atau PKI tanggal 27 Oktober, Partai Sosialis Indonesia atau PSI tanggal 20 November, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada bulan Januari 1946<sup>8</sup>; untuk menyebut beberapa yang penting saja.

Seperti organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan dan partai-partai sebelum kemerdekaan, pengaruh ikatan primordial<sup>9</sup> terhadap pengorganisasian partai-partai politik setelah proklamasi kemerdekaan nampak nyata. Sementara itu tingkat ketergantungan partai kepada dukungan masyarakat untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan umum pertama di Indonesia, maka pengaruh ikatan-ikatan primodial seperti agama, suku, dan kedaerahan semakin nampak mempengaruhi pengorganisasian partai-partai politik. Kemudian, berdasarkan agama dan kebudayaan atau

---

<sup>8</sup>Drs. Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 40.

<sup>9</sup>Clifford Geertz, *Old Societies and New States* (New York: The Free Press, 1963), hlm.109.

ideologi kelompok masyarakat pendukung partai, partai-partai politik itu dapat dibedakan misalnya, antara partainya "orang santri, orang abangan dan orang priyayi"<sup>10</sup>. MASYUMI, NU, PSII dan PERTI misalnya tergolong ke dalam partainya orang santri, PKI terutama mendapat dukungan kaum abangan, dan PNI menggantungkan kekuatan massanya kepada kaum priyayi.

Seperti telah diuraikan di depan, masyarakat Air Tiris telah beragama Islam sejak sebelum kemerdekaan dan masyarakat Air Tiris berhasil melakukan sosialisasi ajaran Islam melalui tokoh-tokoh berpendidikan pesantren, Daarun-Nahdzah. Ketika partai-partai terbentuk, masyarakat Air Tiris, di belakang tokoh mereka, hampir keseluruhannya memberikan dukungan kepada partai-partai Islam, terutama MASYUMI, PERTI, NU, Parmusi, PPP, PBR, PKS, PBB dan PAN.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa proses sosialisasi nilai-nilai ke-Islaman dan kesantrian masyarakat Air Tiris berjalan cukup lancar dari masa ke masa. Dari proses ini terbentuklah indentifikasi masyarakat Air Tiris umumnya terhadap partai-partai politik Islam. Secara spesifik indentifikasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam tersebut digambarkan oleh seorang tokoh tiga zaman, MASYUMI-PARMUSI-PPP, sebagai berikut :

"Masyarakat Islam itu telah memiliki rumah sendiri, bila pindah ke rumah lain sudah barang tentu hanya berkedudukan sebagai tamu, sebagai tamu harus mengikuti peraturan-peraturan si pemilik rumah.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.109

Masyarakat Islam sudah semestinya mendukung dan memilih partai-partai Islam”<sup>11</sup>.

#### **4.1.3. Elit di Air Tiris**

Memahami pola dan karakteristik kepemimpinan di masyarakat Air Tiris dapat dianalogikan dengan memahami pola dan karakteristik masyarakat Jawa secara umumnya. Menurut Geertz, dalam konteks aliran, pola hubungan di antara pemimpin dan masyarakat dalam masyarakat Jawa dapat dibedakan menjadi dua pola kepemimpinan, yaitu pemimpin abangan dan pemimpin santri. Dua tipe kepemimpinan ini lebih jauh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kepemimpinan formal dan informal. Pemimpin formal adalah mereka yang menduduki jabatan pemerintahan, melalui pemilihan maupun melalui pengangkatan oleh pejabat tingkat lebih atasnya, sedangkan pemimpin informal adalah mereka yang tidak memegang jabatan pemerintah tetapi dikenal sebagai pemimpin oleh sebagian atau seluruh masyarakat<sup>12</sup>. Perlu dicatat bahwa pemimpin formal tidak memerlukan kualitas kepemimpinan seperti pemimpin informal, tetapi karena posisi mereka, bahkan jika diperoleh melalui pengangkatan, mereka dikenal sebagai pemimpin. Karena itu pengaruh pemimpin formal dapat lebih kecil daripada pemimpin informal yang telah dikenal dan dihormati. Politik di masyarakat Jawa harus difahami dalam konteks kepemimpinan semacam ini. Oposisi dimungkinkan bila

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan tokoh senior, H. Zulkifli, pada tanggal 15 November 2011.

<sup>12</sup>Clifford Geertz dalam W, M. F. Hofsteede, *Decision Making Process In Four West Javanese Villages* (The Netherlands, Nijmegen: off setdrukkeri j Facultiet der Wiskunde en Naturwetenschappen, 1971), hlm. 25.

pemimpin informal memiliki pengaruh lebih kuat dalam masyarakat daripada pemimpin formal.

Di dalam masyarakat pedesaan Jawa, terutama di Jawa Tengah, pemimpin formal terdiri dari Kepala Desa dan para pembantunya yang meliputi Sekretaris Desa Kepala-kepala Urusan dan beberapa Kepala Dusun yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat<sup>13</sup>. Jumlah Kepala Dusun tergantung dari luas wilayah desa. Dari sejumlah pejabat pemerintah desa tersebut pada mulanya hanya Kepala Desa yang dipilih langsung oleh warga desa dalam perkembangannya kemudian Kepala Dusun juga dipilih langsung<sup>14</sup>, sementara yang lain diangkat oleh pemerintah melalui seleksi. Sedangkan pemimpin Informal adalah mereka yang menguasai ajaran Islam, seperti Kyai, Ulama, haji atau juga mereka yang menguasai ilmu kejawen, atau ilmu kebatinan, atau guru dan dukun<sup>15</sup>.

Untuk memahami pola karakteristik kepemimpinan di masyarakat Air Tiris, pertama-tama perlu melakukan identifikasi baik kepada pemimpin formal maupun pemimpin informal. Pemimpin formal telah jelas, terdiri dari Kepala Kelurahan dan pembantu-pembantunya, sementara itu pemimpin informal perlu memahami secara lebih lanjut mengenai keberadaan dan karakteristiknya.

Di masyarakat Air Tiris, di samping pemimpin informal yang terdiri dari para pemuka agama, seperti Imam Masjid, pemimpin organisasi sosial keagamaan, haji

---

<sup>13</sup>Desa-desa di Jawa Tengah umumnya telah menerapkan sebutan-sebutan bagi pejabat pemerintah desa sesuai dengan UU. No. 5 Th. 1979, misalnya: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Sorogaten, kecamatan Tulung, kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah, pada 15 Oktober 2011.

<sup>15</sup>Afan Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 20.

dan guru-guru agama, juga tokoh-tokoh yang berperan dalam lembaga Ninik-Mamak. Dari sejumlah orang kelompok elite, dapat dilihat menurut kedudukan mereka yang berkaitan dengan keagamaannya, seperti berikut: pertama, dipandang dari segi pendidikan, sebagian besar berpendidikan pesantren, lainnya berpendidikan Madrasah dan hanya seorang berpendidikan SLTA umum. Kedua, dipandang dari peranan mereka dalam masyarakat, mereka terdiri dari ninik mamak, sebagai Imam dan Pengurus Masjid, lainnya sebagai pengurus ormas keagamaan Islam, sebagai Mubaligh atau penceramah agama, dan sebagai tokoh masyarakat lainnya, misalnya ketua RT dan RW.

Kondisi masyarakat Air Tiris terbagi menjadi pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin terdiri dari pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal terdiri dari kepala kelurahan dan pembantu-pembantunya serta para pegawai negeri sipil. Sedangkan pemimpin informal terdiri dari Ninik Mamak (tokoh adat), dan alim ulama (pimpinan pesantren, imam masjid) dan cerdik-pandai. Secara umum, pemimpin informal lebih disegani dari pada pemimpin formal. Sebagaimana dikemukakan oleh Amrin Datuk Mojo<sup>16</sup>, tokoh adat Kampar . “Ninik mamak dan alim ulama di Kampar ini sangat kuat pengaruhnya kepada anak kamanakan dan masyarakat pada umumnya. Mereka, kedudukannya dinaikkan seranting, jalannya didahulukan selangkah. Dalam banyak hal, menyangkut permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, mereka senantiasa dimintai pertimbangan.”

---

<sup>16</sup>Wawancara pada tanggal 15 November 2011.



Sementara itu bila dipandang dari pekerjaan dan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa posisi mereka dalam masyarakat semakin kuat. Dari kelompok elite tersebut, sebagian besar berprofesi sebagai petani–pedagang, lainnya sebagai petani dan hanya seorang pegawai negeri. Untuk ukuran masyarakat Air Tiris dan sekitarnya mereka memiliki kondisi ekonomi cukup baik, yaitu sebagian besar mereka berkondisi ekonomi kaya, dan lainnya berkondisi ekonomi menengah. Tambahan lagi bahwa dari kelompok elite tersebut sebagian besarnya telah menunaikan ibadah haji.

Kondisi tersebut menjadikan para pemimpin informal lebih populer berbanding pemimpin formal. Mereka cukup disegani, dan sangat dihormati masyarakatnya, sering memberikan ceramah agama dalam majelis-mejelis Taklim secara intensif. Kepopuleran pemimpin informal ini lebih diperkuat dengan kenyataan, pertama, para pemimpin informal lebih stabil sementara kepala kelurahan hampir selalu berganti pada setiap waktu sesuai kebijakan pemerintah kabupaten. Kedua, pada umumnya kondisi ekonomi pemimpin informal lebih baik, dan ketiga, para pemimpin informal biasanya lebih memiliki status dan memahami ilmu agama. Namun, pamor pemimpin informal yang sedemikian ini akan mengalami kemerosotan apabila pemimpin informal tersebut kemudian memiliki status pemimpin formal. Hal ini dikatakan oleh H. Mahmudin<sup>17</sup>, tokoh agama dan tokoh adat. “ Sekali air besar, tepian berubah, artinya status seseorang di masyarakat, ketika dia menjadi tokoh adat/ninik mamak sangat disegani, tetapi ketika yang bersangkutan menjadi anggota DPRD, misalnya, belum tau anak kemenakannya akan segan

---

<sup>17</sup>Wawancara pada tanggal 26 September 2011.

kepadanya, karena dia bukan membawa aspirasi adatnya, tapi partai atau kepentingan lainnya ...”

Sisi lain pola dan karakteristik kepemimpinan dalam masyarakat Air Tiris yang perlu dikemukakan ialah hubungan antara pemimpin informal dengan masyarakat lingkungannya. Disebutkan di depan bahwa hampir di setiap wilayah RT terdapat kelompok pengajian Yasinan setiap seminggu sekali. Melalui forum inilah, selain dilakukan amalan-amalan<sup>18</sup> juga dibicarakan masalah kemasyarakatan dan lingkungan. Demikian pula pengajian di tingkat RW. Melalui hubungan seperti itu hubungan antara pemimpin dan masyarakat akan menjadi semakin dekat.

Di samping hubungan seperti itu, yang juga perlu dikemukakan yakni hubungan antara pemimpin pedagang dengan masyarakat lingkungannya. Bagian terbesar dari kelompok elit di masyarakat Air Tiris adalah petani-pedagang karet. Mereka membeli karet di kebun dan membawanya ke pabrik untuk dijual, setiap pedagang memiliki sejumlah tenaga kerja dan pelanggan petani penjual karet. Kondisi hubungan semacam ini memperkuat keterikatan hubungan mereka, sebagai hubungan *patron-client*.

Pola hubungan dan karakteristik kepemimpinan di masyarakat Air Tiris seperti dipaparkan di depan, sebenarnya memiliki kelemahan. Pertama, apabila pemimpin yang sekaligus sebagai tokoh pemuka agama diketahui mengalami pelanggaran terhadap norma-norma agama akan berakibat dicemooh oleh masyarakat sekitar.

---

<sup>18</sup>Yang dimaksudkan dengan amalan-amalan ialah mengucapkan kalimat-kalimat yang dipandang dan diyakini oleh ulama terdahulu. Misalnya : membaca surat yasin, membaca tahlil, membaca tahmid dan sebagainya.

Kedua, apabila pekerja/buruh merasa terugikan, maka mereka akan sangat mudah meninggalkan majikannya yang sekaligus pemimpin mereka dan berpindah kepada pemimpin yang lain.

#### **4.2. Faktor Pengaruh Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 1999, 2004, 2009 dan 2014**

Air Tiris merupakan daerah yang merupakan simbol basis santri di kabupaten Kampar. Masyarakatnya seratus persen muslim yang taat, dan daerah ini diwarnai oleh simbol-simbol religiusitas yang nyata. Masyarakat Riau menyebut Kampar sebagai serambi Mekah Riau, sementara Air Tiris adalah serambi Mekah Kampar<sup>19</sup>. Analisa berikut mengantarkan kepada usaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris, yang ditandai dengan perolehan suara partai-partai politik Islam masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 yang berkecenderungan semakin menurun, dengan peta seperti tabel berikut.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Amri Yudo, mantan Lurah Air Tiris, 17 Oktober 2012.

Tabel 4.1.  
Peta Analisa Faktor Pengaruh  
Perubahan Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris  
pada Pemilihan Umum 1999, 2004, 2009 dan 2014

No.	Pemilu Tahun Aspek	1999	2004	2009	2014
1.	Kepemimpinan	Informal	Informal	Informal	Informal
2.	Karakter	Ke-Islaman	Ke-Islaman	Ke-Islaman	Ke-Islaman
3.	Lambang	Simbol-simbol ke-Islaman	Simbol-simbol ke-Islaman	Simbol-simbol ke-Islaman	Simbol-simbol ke-Islaman
4.	Strategi Rekrutmen	Berhasil merekrut Elite	Berhasil merekrut Elite	Gagal merekrut Elite	Gagal merekrut Elite
5.	Strategi Kampanye	Ke-Islaman	Ke-Islaman	Ke-Islaman	Ke-Islaman
6.	Perolehan Suara Partai-partai Islam	86,53%	80,30%	46,72 %	17,20%

Untuk melengkapi analisa faktor perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dilakukan wawancara dengan masyarakat Air Tiris yang jumlahnya 100 orang yang terdiri dari 47 orang laki-laki dan 53 orang perempuan. Hasil wawancara tersebut dipaparkan secara berurutan sebagai berikut :

Tabel 4.2.  
Jumlah Responden di masing-masing RW

No.	RW	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	01	8	9	17	17
2	02	8	9	17	17
3	03	8	8	16	16
4	04	8	9	17	17
5	05	7	9	16	16
6	06	8	9	17	17
	Jumlah	47	53	100	100

Tabel 4.3  
Data Pribadi Responden

#### 1. Umur Responden

Jumlah Responden	Umur				
	30-40	41-50	51-60	61-70	71-80
100	10	46	32	10	2
%	10	46	32	10	2

Dari segi umur responden dapat diketahui bahwa umur 30-40 tahun sebanyak 10 persen, 41-50 tahun sebanyak 46 persen, 51-60 tahun sebanyak 32 persen, 61-70 tahun sebanyak 10 persen, dan 71-80 tahun sebanyak 2 persen. Dari gambaran umur tersebut dapat diketahui bahwa seluruh responden mengikuti pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Namun demikian umur 41-60 tahun kelihatan mendominasi yaitu 78 persen, sementara umur 30-40 tahun 10 persen dan umur 71-80 tahun hanya 2 persen. Komposisi umur responden ini cukup representatif untuk suatu penelitian tentang perubahan orientasi politik masyarakat, dalam hal ini masyarakat Air Tiris.

## 2. Status Responden

Jumlah Responden	Status			
	Menikah	Tidak menikah	Janda	Duda
100	99	-	1	-
%	99	-	1	-

## 3. Pekerjaan Responden

Jumlah Responden	Pekerjaan					
	Petani	PNS/TNI/ POLRI	Pedagang	Buruh	Wiraswasta	IRT
100	18	12	40	6	10	14
%	18	12	40	6	10	14

## 4. Agama Responden

Jumlah Responden	Agama					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
100	100	-	-	-	-	-
%	100	-	-	-	-	-

## 5. Afiliasi Organisasi Keagamaan Responden

Jumlah Responden	Organisasi keagamaan				
	Muhammadiyah	NU	PERSIS	Tarbiyah	Majelis Taklim
100	16	9	-	12	63
%	16	9	-	12	63

## 6. Pendidikan Responden

Jumlah Responden	Pendidikan						
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	S1	S2	S3	Diploma
100	25	27	33	12	-	-	3
%	25	27	33	12	-	-	3

## 7. Tahun Pemilu Perubahan Orientasi Politik Responden

Jumlah Responden	Perubahan orientasi dari A ke B pada Pemilu			
	1999	2004	2009	2014
100	-	62	24	14
%	-	62	24	14

Daftar Pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat Air Tiris tentang perubahan orientasi politik mereka pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4  
Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	ST	RG	KS	TS
1	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik pada karakter dan gaya figur kepemimpinan partai politik.	35 175	44 176 <b>398</b> <b>ST</b>	10 30	6 12	5 5

2	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan calon legislatif atau figuranya.	27 135	39 156 <b>368</b> <b>ST</b>	17 51	9 18	8 8
3	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mendapat bantuan sembako dan atau uang dari calon legislatif atau figur tertentu.	10 50	15 60	14 42 <b>238</b> <b>RG</b>	25 50	36 36
4	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mengenal calon legislatif yang dermawan.	20 100	35 140 <b>339</b> <b>ST</b>	19 57	16 32	10 10
5	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan ideologi partai politik.	19 95	18 72 <b>313</b> <b>ST</b>	34 102	15 30	14 14



6	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan tanda gambar/lambang partai politik.	5 25	5 20	10 30	34 68 <b>189</b> <b>KS</b>	46 46
7	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan figur pengurus partai politik.	15 75	23 92 <b>304</b> <b>ST</b>	28 84	19 38	15 15
8	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mengenal calon legislatif yang saleh/'alim.	20 100	45 180 <b>365</b> <b>ST</b>	20 60	10 20	5 5
9	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mengikuti Kyai/Imam/Tokoh/Pemimpin.	15 75	19 76	23 69 <b>283</b> <b>RG</b>	20 40	23 23

10	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan cara atau bentuk kampanye partai politik.	14 70	33 132 <b>312</b> <b>ST</b>	19 57	19 38	15 15
11	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena Masjid/Mushalla mendapat bantuan bahan bangunan dan atau uang	10 50	24 96	18 54 <b>273</b> <b>RG</b>	25 50	23 23
12	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena sarana jalan/gang disemenisasi, parit/selokan/sungai dibangun turap.	15 75	25 100	20 60 273 RG	15 30	25 25
13	Pemilih/Responden yang bersangkutan memilih kelompok partai politik B setelah pada pemilu sebelumnya memilih kelompok partai politik A.	28 140 <b>428</b> <b>SS</b>	72 288	0	0	0

Keterangan :

1. Kelompok Partai Politik A =  
PPP/PAN/PKS/PBB/PKB/PBR
2. Kelompok Partai Politik B =  
GOLKAR/PDIP/GERINDRA/Partai  
Demokrat/NasDem/Hanura/PKPI
3. SS = Sangat Setuju      diberi skor    5  
ST = Setuju                diberi skor    4  
RG = Ragu-ragu            diberi skor    3  
KS = Kurang Setuju        diberi skor    2  
TS = Tidak Setuju          diberi skor    1

#### Alasan Perubahan Orientasi Politik Responden

Data yang telah diperoleh melalui Instrumen Penelitian yang terdiri dari 12 instrumen berupa daftar pertanyaan/ Pernyataan yang telah ditentukan dianalisa dengan menggunakan Skala Likert sebagai skala pengukurannya. Sedangkan analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 35 orang yang menjawab SS =  $35 \times 5 = 175$

Jumlah skor untuk 44 orang yang menjawab ST =  $44 \times 4 = 176$

Jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab RG =  $10 \times 3 = 30$

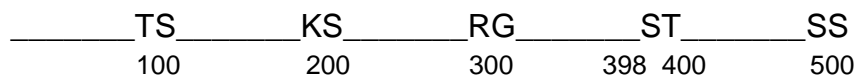
Jumlah skor untuk 6 orang yang menjawab KS =  $6 \times 2 = 12$

Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab TS =  $5 \times 1 = 5$

Total =  
398

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item =  $5 \times 100 = 500$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian untuk instrumen nomor 1 adalah 398. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap alasan perubahan orientasi politik =  $(398:500) \times 100\% = 79,6\%$  dari yang diharapkan (100%).

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut :



Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 398 terletak pada daerah setuju (ST).

Dengan cara yang sama skor dari instrumen 2 sampai dengan instrumen 12 dapat dihitung.

Tabel 4.5.  
Hasil analisa Instrumen Penelitian

No	Pertanyaan/Pernyataan	Skor	%	Analisa
1	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik pada karakter dan gaya figur kepemimpinan partai politik.	398	79,6	ST

2	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan calon legislatif atau figurnya.	368	73,6	ST
3	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mendapat bantuan sembako dan atau uang dari calon legislatif atau figur tertentu.	238	47,6	RG
4	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mengenal calon legislatif yang dermawan.	339	67,8	ST

5	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan ideologi partai politik.	313	62,6	ST
6	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan tanda gambar/lambang partai politik.	189	37,8	KS
7	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan figur pengurus partai politik.	304	60,8	ST

8	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mengenal calon legislatif yang saleh/'alim.	365	73	ST
9	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena mengikuti Kyai/Imam/Tokoh/Pemimpin.	238	47,6	RG
10	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena tertarik dengan cara atau bentuk kampanye partai politik.	312	64,2	ST

11	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena Masjid/Mushalla mendapat bantuan bahan bangunan dan atau uang	273	54,6	RG
12	Pemilih yang memilih kelompok partai politik A kemudian berubah pilihannya menjadi memilih kelompok partai politik B pada pemilihan umum berikutnya disebabkan oleh karena sarana jalan/gang disemenisasi, parit/selokan/sungai dibangun turap.	273	54,6	RG
13	Pemilih/Responden yang bersangkutan memilih kelompok partai politik B setelah pada pemilu sebelumnya memilih kelompok partai politik A.	428	85,6	SS

Sumber : Wawancara pada bulan Mei 2017



Keterangan :

4. Kelompok Partai Politik A =  
PPP/PAN/PKS/PBB/PKB/PBR
5. Kelompok Partai Politik B =  
GOLKAR/PDIP/GERINDRA/Partai  
Demokrat/NasDem/Hanura/PKPI
6. SS = Sangat Setuju      diberi skor    5  
ST = Setuju                diberi skor    4  
RG = Ragu-ragu            diberi skor    3  
KS = Kurang Setuju        diberi skor    2  
TS = Tidak Setuju          diberi skor    1

#### **4.2.1. Faktor Pengaruh Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 1999**

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1977. Namun, pelaksanaan pemilihan umum di bawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda bila dibandingkan dengan pemilihan umum di negara-negara demokrasi pada umumnya. Di negara demokrasi karakter pemilihan umum dilaksanakan atas prinsip *free and fair* baik dalam struktur dan proses pemilihan umum. Sedangkan, Orde Baru justru menghindari penerapan prinsip tersebut. Pelaksanaan pemilu kemudian menunjukkan ketidakseimbangan antar peserta pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum diatur melalui cara-cara sedemikian rupa untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri.

Beberapa hal prinsip yang menjadikan pemilihan umum - pemilihan umum selama pemerintahan Orde Baru tidak memenuhi syarat sebagai pemilihan umum yang

demokratis<sup>20</sup>. Pertama, peranan pemerintah terlalu dominan, sementara itu diikuti oleh amat minimnya keterlibatan masyarakat hampir di semua tingkatan kelembagaan maupun proses pemilihan umum. Kedua, proses pemilihan umum tidak berlangsung *fair* yang ditandai dengan adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilihan umum, yaitu Golkar.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak demokratis di atas didorong oleh keinginan Orde Baru untuk keluar sebagai pemenang tunggal yang dapat menjamin efektifitas kebijakan yang dibuat. Di samping itu, pengalaman era demokrasi liberal dimana pluralitas kekuatan politik menjadikan pemerintahan tidak dapat berjalan efektif menjadi salah satu alasannya.

Pada masa Suharto mulai berkuasa, pemilihan umum pertama berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966 seharusnya diselenggarakan selambat-lambatnya 6 juli 1968. Namun Pejabat Presiden Suharto kemudian menyatakan bahwa pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian MPRS menjadwal ulang pemilihan umum dengan menetapkan pemilihan umum paling lambat 5 Juli 1971.

Peserta pemilihan umum pada pemilihan umum 1971 terdiri dari 10 partai, yaitu Sekber Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI dan Murba. Murba diaktifkan kembali setelah pada era Sukarno dibekukan, Januari 1965. Sekber Golkar merupakan partai baru yang dibentuk oleh Orde Baru. Sedangkan Parmusi merupakan partai politik yang dibentuk oleh eks Masyumi sebagai kompensasi pelarangan revitalisasi Masyumi.

---

<sup>20</sup>Syamsudin Haris (ed.). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), hlm. 11-12.

Hasil pemilihan umum 1971 menempatkan Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 34.348.873 suara (65,82%). PNI dan Parmusi hanya mendapat suara masing–masing 3.793.266 suara (6,93%) dan 2.930.746 suara (5,36%) di bawah perolehan suara partai NU yaitu 10.213.650 suara (18,68%). Parkindo mendapat 733.359 suara (1,34%), Katolik 603.740 suara (1,10%) dan Perti 381.309 suara (0,69%) dan Murba 48.126 suara (0,08%) tidak berhasil memenuhi angka untuk mendapatkan kursi DPR.

Memasuki pemilihan umum 1977, kontestan pemilihan umum dari 10 partai pada pemilihan umum 1971 disederhanakan menjadi 3 partai melalui fusi 1973. Partai-partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Partai-partai Nasionalis dan Kristen disatukan dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini terus dipertahankan hingga di penghujung pemilihan umum Orde Baru, 1997. Terkait dengan hasil pemilihan umum, posisi Golkar sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada pemilihan umum 1982, 1987, 1992, 1997. Golkar menjadi partai hegemonik. Sementara itu PPP dan PDI menempati peringkat kedua dan ketiga.

Tabel 4.6.  
Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilihan Umum  
Masa Orde Baru

NO.	PEMILIHAN UMUM	PPP ( % )	GOLKAR ( % )	PDI ( % )
1.	1977	29,29	62,11	8,60
2.	1982	27,78	64,34	7,88
3.	1987	15,97	73,16	10,87
4.	1992	17,00	68,10	14,89
5.	1997	22,43	74,51	3,00

Sumber : KPUD Provinsi Riau

Tabel di atas memperlihatkan perolehan suara partai selama pemilihan umum Orde Baru. Perolehan suara Golkar tidak pernah di bawah 60%. Pada pemilihan umum 1987 Golkar memperoleh kenaikan suara secara signifikan yaitu 8,82%, tetapi menjadi pemilihan umum yang buruk bagi PPP karena mengalami penurunan suara paling besar, sekaligus perolehan suara terkecil selama Orde Baru. Fenomena fluktuasi pemilu 1987 tersebut adalah berkaitan dengan keberhasilan pemerintah melakukan kooptasi ideologi partai politik, dan organisasi masyarakat pada umumnya, yang mewajibkan digunakannya Pancasila sebagai asas tunggal dalam organisasi. Pendukung PPP merasa kecewa dengan sikap PPP yang memakai asas Pancasila sehingga mengalihkan dukungannya kepada Golkar dan sebagian kecil ke PDI. Dengan demikian, fenomena Pemilihan umum 1987 adalah bentuk suara protes (*protest voters*) dari pendukung PPP. Pada saat itu Komosaris PPP beberapa desa dan kelurahan memberikan

komentar yang pedas, antara lain M. Amin<sup>21</sup> dari PPP menyatakan:

“ Kita selama ini dapat bersatu dalam naungan partai Ka’bah karena adanya ajaran agama Islam, karena kita tak mau lari dari Islam. Tapi sekarang harus ke Pancasila, bukan Islam lagi, tentu ini sudah menyalahi...dan membuat kami susah dengan umat..”

Pemilihan umum 1997 merupakan pemilihan umum keenam sejak lahirnya Orde Baru, dan pemilihan umum ketiga setelah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Orpol dan Ormas) seperti diatur dalam Undang Undang Nomor: 3 Tahun 1985 yang merupakan penyempurnaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Undang Undang Nomor : 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagi Golkar dan PDI, penetapan pancasila sebagai satu-satunya azas tidak menjadi masalah, tetapi bagi PPP merupakan masalah yang rumit.

Konsekuensi dari Undang Undang Nomor: 3 Tahun 1985 tersebut, pertama, PPP harus menghilangkan azas ciri ke-Islaman yang selama ini merupakan landasan dan tujuan perjuangan dan sekaligus merupakan daya tarik yang mendekatkan dan mengikat antara partai dengan para pendukungnya. Kedua, bersamaan dengan itu PPP harus menggantikan tanda gambar Ka’bah sebagai lambang partai yang cukup berwibawa dan melambangkan ke-Islaman, dengan tanda gambar lain, yaitu bintang.

Di samping itu, setahun sebelumnya, 1984, salah satu anggota fusi PPP tahun 1973, NU, menyatakan

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan fungsionaris PPP desa Air Tiris, pada tanggal 24 November 2011

kebiasaannya dalam menentukan sikap politik serta membebaskan massa pendukungnya untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Keputusan tersebut dikeluarkan melalui Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur, pada akhir 1984.

Peristiwa-peristiwa tersebut mengantarkan PPP memasuki pemilihan umum 1987, 1992 dan 1997. PPP di kelurahan Air Tiris, Kampar, pada pemilihan umum 1997 ini mengalami perubahan-perubahan, namun tidak mengakibatkan PPP kehilangan suara yang berarti, sehingga posisi PPP tetap menempati urutan kedua setelah Golkar. Sementara itu, Golkar juga tidak mengalami kenaikan perolehan suara yang luar biasa, dan PDI tetap berjalan di tempat, hampir tidak mengalami perkembangan. Salah seorang tokoh PPP<sup>22</sup> di kelurahan Air Tiris mengemukakan :

“...Pada saat pemilihan umum tahun-tahun tersebut kami semua cemas dengan pertukaran ideologi partai yang harus ke Pancasila, karena perubahan itu cukup prinsip, tapi alhamdulillah kami bisa melaluinya dengan selamat...”

Tahun 1999 merupakan tahun pemilihan umum pertama pasca mundurnya Presiden Suharto dari kekuasaan. Pengganti Suharto, Habibie, melaksanakan pemilihan umum tiga tahun lebih cepat dari yang seharusnya, yaitu tahun 2002. Percepatan pemilihan umum ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie yang dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang kekuasaan.

Hal paling menyolok setelah keruntuhan Orde Baru adalah kecilnya penolakan terhadap dibuangnya format

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan fungsionaris PPP kelurahan Air Tiris, pada tanggal 24 November 2011

politik 'dua partai satu Golkar' dan diberlakukannya sistem multi partai. Kemudian demokrasi multi partai dilihat sebagai satu-satunya pilihan. Keadaan ini, menurut Bourchier, ada kesamaanya dengan November 1945, masa terakhir ketika partai politik tumbuh subur di Indonesia<sup>23</sup>. Kesamaan itu adalah berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: *euphoria* setelah berhasil keluar dari suatu masa panjang represi politik, banyaknya kepentingan politik yang saling mengalahkan untuk memperoleh posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya kemauan mencegah hal itu. Bahkan pandangan lain menempatkan kelahiran lebih dari seratus partai politik dalam hitungan yang sangat singkat sebagai fenomena yang mengalahkan periode awal berkembangnya partai politik pasca Maklumat Nomor X Wakil Presiden<sup>24</sup>.

Pemilihan umum 1999 sering disebut sebagai pemilihan umum transisi memasuki format politik yang lebih demokratis. Pemilihan umum menjadi semacam simpang jalan, apakah proses politik itu terus setia pada jalur demokratisasi, berbelok jalan, atau bahkan berbalik arah sama sekali<sup>25</sup>. Dalam waktu yang sangat singkat, Pemilihan umum ini diselenggarakan, yaitu kurang dari 5 bulan. Selaku penyelenggara pemilihan umum, KPU, dalam masa yang singkat telah berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan keputusan tentang tata cara pemilihan umum. Tidak hanya itu, KPU juga berhasil

---

<sup>23</sup>David Bourchier, "Pemerintahan Peralihan Habibie: Reformasi, Pemilihan Umum, Regionalisme dan Pergulatan Meraih Kekuasaan", dalam Cris Manning dan Peter Van Dierman, *Indonesia di Tengah Transisi : Aspek-Aspek Sosial Reformasi dan Krisis* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 19.

<sup>24</sup>Cornelis Lay, *Involusi Politik: Esai-Esai Transisi Indonesia* (Yogyakarta: PLOD UGM-JIP UGM, 2006), hlm. 65.

<sup>25</sup>Hairus Salim HS (peny.), *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 1.

merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum secara relatif lebih lancar seperti yang diperintahkan undang-undang.

Pemilihan umum 1999 dapat disebut sebagai pemilihan umum anti-tesis dari pemilihan umum - pemilihan umum Orde Baru. Banyak aspek bertolak belakang dengan masa Orde Baru.<sup>26</sup> Disebut demikian karena beberapa hal. Pertama, liberalisasi politik yang melahirkan 48 peserta pemilihan umum menjadikan pemilihan umum hampir diikuti oleh seluruh ideologi yang pernah ada di pentas politik Indonesia, tanpa terkecuali. Partai politik berbasis kelas, seperti PRD, dan partai dengan jalur aliran seperti PBB, PDKB, dan PKD yang diharamkan selama Orde Baru berkuasa, muncul tanpa ada yang mempersoalkan apalagi mengontrol. Pluralisme politik Indonesia benar-benar wujud dalam partai yang berkompetisi dalam pemilihan umum 1999.

Kedua, pemilihan umum berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu *Luber plus Jurdil*. Diketahui bahwa pemilihan umum pada masa Orde Baru dibangun atas asas *Luber* (langsung, umum, bebas dan rahasia) dengan mengabaikan aspek *Jurdil* (jujur dan adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Pada era Orde Baru, pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum tidak memberikan ruang yang sama bagi konsestan. Golkar menjadi kontestan yang dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan dukungan politik, sedangkan PPP dan PDI menjadi korban pemihakan pemerintah. Dengan diadopsinya prinsip *jurdil* dalam pemilihan umum 1999,

---

<sup>26</sup>Ramlan Surbakti, "Proses Pelaksanaan Pemilu 1999" dalam Syaefullah Ma'shum, *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001), hlm. xvii.



penyelenggara/pelaksana, pemerintah, partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, diharapkan bersikap dan bertindak jujur, tidak melakukan manipulasi. Selain itu, setiap pemilih dan partai politik diharapkan mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Ketiga, adanya netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama Orde Baru dimobilisasi untuk mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar, berusaha dinetralisasikan untuk tidak memihak salah satu partai politik. PNS tidak diperkenankan menjadi anggota dan pengurus partai politik. Kalau ada PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mendapat izin atasannya dan kemudian melepaskan jabatan pegawai negerinya.

Meskipun demikian, ada beberapa hal lain yang menjadikan kualitas pemilihan umum tercemari. Hal mendasar yang mencemari kualitas demokrasi pemilihan umum 1999 adalah kebijakan yang bernuansa Orde Baru yaitu masih diizinkan militer dalam lembaga perwakilan rakyat. Ditetapkan bahwa 38 kursi DPR dan 10% untuk masing-masing DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan secara cuma-cuma kepada militer. Bukan hanya persoalan jumlah, menurut Lay<sup>27</sup>, tapi di atas segalanya kehadirannya menghancurkan sebagian besar legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kompensasi atas ketetapan tersebut anggota militer tidak memiliki hak pilih.

Pada pemilihan umum 1999, terdapat 141 partai politik yang terdaftar di departemen kehakiman dan setelah

---

<sup>27</sup>Cornelis Lay, *Op. Cit.*, hlm. 71.

dilakukan verifikasi terdapat 48 partai politik yang layak untuk ikut dalam pemilihan umum. Menurut Dhakidae<sup>28</sup> secara kategoris, peserta pemilihan umum 1999 dibagi dalam 3 kelompok: (1) partai-partai yang memiliki garis asal-usul yang bisa ditelusuri sampai ke partai angkatan pertama sebelum perang dan tahun 1980-an (15 partai), (2) partai-partai yang memiliki hubungan emosional dengan partai-partai terdahulu yang tidak dengan sendirinya memegang mandat untuk melanjutkan partai itu (8 partai), dan (3) partai-partai baru dari angkatan baru dengan pemikiran politik baru.

Tidak seperti diperkirakan oleh banyak orang, pemilihan umum yang diperkirakan akan terjadi gesekan dan konflik keras antara massa pendukung kontestan pemilihan umum ternyata tidak terjadi. Pemilihan umum justru berlangsung secara aman. Antusiasme masyarakat yang hadir dalam pemilihan umum sangat tinggi. Tercatat, dari 117.738.683 pemilih yang terdaftar, angka partisipasinya sangat menakjubkan yaitu mencapai 91,69% sebanding dengan angka partisipasi dalam pemilihan umum 1955. Padahal, tidak ada mobilisasi untuk memilih seperti yang pernah terjadi pada pemilihan umum saat Orde Baru. Diduga, tingginya angka partisipasi luapan kegembiraan rakyat atas lahirnya era demokrasi sekaligus harapan pertama untuk dapat keluar dari krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.

Pengesahan hasil pemilihan umum tidak berjalan mulus. Ada 27 partai politik yang menolak menandatangani hasil pemilihan umum. Alasannya adalah ada indikasi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum. Pengesahan hasil pemilihan umum yang seharusnya

---

<sup>28</sup>Daniel Dhakidae (eds.), *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi dan Program* (Jakarta: PT. Kompas, 1999), hlm. 37.

dilakukan oleh KPU akhirnya dilakukan oleh Presiden BJ.Habibie setelah sebelumnya meminta kepada Panwaslu untuk meneliti keberatan yang diajukan oleh partai-partai yang menolak menandatangani hasil pemilihan umum.

Pemilihan umum tahun 1999 menghasilkan komposisi perolehan suara di luar dugaan. Perkiraan dan harapan dari partai-partai politik tidak terwujud. Dari ke – 48 partai politik yang mengikuti pemilihan umum hanya terdapat 5 (lima) partai yang mampu memperoleh suara lebih dari 3% suara pemilih. Hal ini berarti partai-partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilihan umum lima tahun yang akan datang alias bubar.

Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) partai yang perolehan suaranya tidak mampu memperoleh kursi DPR serta 10 (sepuluh) partai hanya mampu memperoleh 1 (satu) kursi di parlemen. Perolehan suara didominasi oleh partai-partai lama, Golkar, PDIP dan PPP. Sementara muncul beberapa partai menengah baru, seperti PKB, PAN, PBB. Perolehan suara partai-partai politik pada pemilihan umum 1999 selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 4.7.  
Perolehan Suara Partai Politik dan Kursi DPR pada  
Pemilihan Umum 1999

No.	Nama Partai	Suara Pemilih	%	Kursi DPR	%
1	PDIP	35.689.073	33,7	153	33
2	Golkar	23.741.749	22,4	120	26
3	PPP	11.329.905	10,7	58	13
4	PKB	13.336.982	12,6	51	11
5	PAN	7.528.956	7,1	34	7
6	PBB	2.049.708	1,9	13	3
7	Partai Keadilan	1.436.565	1,4	7	2
8	PKP	1.065.686	1,0	4	1
9	PNU	679.179	0,6	5	1
10	PDKB	550.846	0,5	5	1
11	PBI	364.291	0,3	1	0
12	PDI	34.572	0,0	2	0
13	PP	655.052	0,6	1	0
14	PDR	427.854	0,4	1	0
15	PSII	37.592	0,0	1	0
16	PNI Front Marhaenis	365.176	0,3	1	0
17	PNI Massa Marhaen	345.629	0,3	1	0
18	IPKI	328.654	0,3	1	0
19	PKU	300.064	0,3	1	0
20	Masyumi	456.718	0,4	1	0
21	PKD	216.675	0,2	1	0
22	PNI Supeni	377.137	0,4	-	-
23	Krisna	369.719	0,3	-	-
24	Partai KAMI	289.489	0,3	-	-
25	PUI	269.309	0,3	-	-
26	PAY	213.979	0,2	-	-
27	Partai Republik	328.564	0,3	-	-
28	Partai MKGR	204.204	0,2	-	-
29	PIB	192.712	0,2	-	-
30	Partai SUNI	180.167	0,2	-	-

31	PCD	168.087	0,2	-	-
32	PSII 1905	15.282	0,0	-	-
33	Masyumi Baru	152.589	0,1	-	-
34	PNBI	149.136	0,1	-	-
35	PUDI	14.098	0,0	-	-
36	PBN	14.098	0,0	-	-
37	PKM	104.385	0,1	-	-
38	PND	96.984	0,1	-	-
39	PADI	85.838	0,1	-	-
40	PRD	7.873	0,0	-	-
41	PPI	63.934	0,1	-	-
42	PID	62.901	0,1	-	-
43	Murba	62.006	0,1	-	-
44	SPSI	61.105	0,1	-	-
45	PUMI	49.839	0,0	-	-
46	PSP	49.807	0,0	-	-
47	PARI	5.479	0,0	-	-
48	PILAR	40.517	0,0	-	-
JUMLAH		105.786.661	100	462	100

Sumber: KPUD Provinsi Riau

Sebagai simbol kekuatan partai nasionalis, PDIP mendapatkan perolehan suara terbesar dan sangat prestisius, yaitu 33,73%. Hasil tersebut melampaui hasil yang dicapai oleh PNI pada pemilihan umum 1955. Perolehan suara PDIP itu bisa jadi sebuah prestasi yang tidak akan mungkin lagi diulangi atau mampu disamai oleh sebuah partai nasionalis di tengah pemilihan umum yang kompetitif.

Sementara itu, partai Golkar yang dijadikan musuh oleh partai-partai lain, simbol Orde Baru dan dilanda perpecahan internal, perolehan suaranya merosot tajam jika dibandingkan dengan perolehan suara pemilihan umum - pemilihan umum Orde Baru. Meskipun demikian, Golkar masih perkasa, Golkar berhasil menempatkan

dirinya pada rangking kedua perolehan suara, 22,43%, setelah perolehan suara PDIP. Golkar memperoleh suara signifikan terutama berasal dari pemilih luar Jawa.

Sementara itu PAN sebagai partai pendatang baru perolehan suaranya tidak menggembirakan. Partai ini disebut-sebut akan memperoleh suara yang sangat besar karena identifikasi yang melekat pada dirinya sebagai gerbong kaum reformis. Hasilnya tidak seperti yang diduga, PAN hanya mampu meraup 7,11% suara. Sementara itu PKB, partai baru yang didirikan oleh kyai-kyai NU menempatkan dirinya pada rangking tiga perolehan suara, 12,6%, disusul PPP 10,7% suara. PKB sebagai simbol partai kaum Nahdliyin tidak mampu mengulang sukses seperti pemilihan umum 1955 yang mampu meraup 18,47% suara. Demikian juga PBB yang menyatakan diri sebagai pewaris sah Masyumi hanya memperoleh suara 1,94% suara, suatu angka yang jauh dari prestasi yang pernah diraih oleh Masyumi pada pemilihan umum 1955, 20,59%.

Mengkaji perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 1999 di masyarakat Air Tiris pada dasarnya dapat dikatakan merupakan kondisi ujian pertama bagi partai-partai politik Islam setelah kembali memperoleh kesempatan menjadikan Islam sebagai asas partai, dan tanda gambar Ka'bah dan simbol-simbol ke-Islaman lainnya sebagai lambang partai. Komposisi perolehan suara antara partai-partai politik Islam dan partai-partai politik non-Islam menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah suara yang diperoleh partai-partai Islam dengan jumlah pemilih Islam. Partai-partai politik Islam memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang cukup besar bila dibandingkan dengan perolehan suara partai-partai politik non-Islam.

Kondisi perolehan suara seperti ini merupakan salah satu pengecualian dari kondisi pemilihan umum sekian banyak desa-desa yang pada umumnya Partai Golkar masih memperoleh suara terbanyak. Bila perolehan suara partai-partai politik Islam di Air Tiris merupakan pengecualian, kemenangan Partai Golkar di sejumlah desa-desa lain merupakan sisa pengaruh yang masih kuat dari kehendak dari Pemerintah Orde Baru dengan berbagai kebijaksanaan untuk kemenangan Golkar, di antaranya dengan melakukan restrukturisasi sistem kepartaian dan usaha depolitisasi secara sistematis terutama di tingkat masyarakat desa dengan mengambil berbagai macam bentuk, di antaranya dengan melalui argumen depolitisasi (*depolitization of argument*) dan juga dengan kebijakan nyata seperti kebijakan massa mengambang (*floating mass*)<sup>29</sup>.

Pada pemilihan umum 1999, terdapat 6 (enam) partai politik yang memperoleh suara, yaitu PPP, partai Golkar, PDIP, PAN, PBB dan PK. Tergolong dalam partai-partai politik Islam adalah PPP, PAN, PBB dan PK, sementara Partai Golkar dan PDIP merupakan partai-partai politik non-Islam.

Kajian lebih lanjut mengemukakan faktor pengaruh orientasi politik masyarakat Air Tiris dan perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 1999 dengan kerangka analisis kepemimpinan, karakter, lambang, strategi rekrutmen dan strategi kampanye partai-partai politik Islam. Orientasi politik dan hasil penghitungan suara dipaparkan untuk menunjukkan secara eksplisit

---

<sup>29</sup>Afan, Gaffarr, "Partai Politik, Elit dan Massa dalam Pembangunan Nasional", dalam Akhmad ZAini Abar (ed.), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*(Solo: CV. Ramadhani, 1990), hlm. 14.

perolehan suara partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 1999.

#### 4.2.1.1. Kepemimpinan

Kualitas kepemimpinan merupakan prinsip utama bagi keberhasilan dan tercapainya tujuan organisasi. Efektivitas kepemimpinan memberikan pengaruh dominan terhadap efektivitas organisasi. Kepemimpinan melekat pada seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam khasanah masyarakat Islam, pemimpin sering disebut *imam* atau *khalifah*. Menurut Quraish Shihab<sup>30</sup>, *imam* dan *khalifah* dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata *imam* diambil dari kata *amma-ya'ummu* yang berarti menuju dan meneladani. Kata *khalifah* berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata *khalifah* sering diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya.

Dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Air Tiris, kualitas seorang pemimpin mengarah pada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pertama, tak ada pemimpin di antara masyarakat Islam kecuali yang beriman, kedua tak ada pemimpin yang mempermalukan Islam. Ketiga, pemimpin harus memiliki kemahiran di bidangnya. Pemimpin partai yang tidak memahami dan mahir dalam organisasi kepartaian akan gagal membawa partai mencapai tujuannya.

Keempat, pemimpin harus dapat diterima masyarakat, mencintai dan dicintai masyarakat, mendoakan dan didoakan masyarakat. Dan kelima,

---

<sup>30</sup>Akhmad Mujahidin, *Islam dan Kepemimpinan* (Pekanbaru: Riau Pos, Jumat 15 April 2016), hlm. 4



pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan masyarakat, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitnah. Pada pemilihan umum 1997 fungsionaris PPP kelurahan Air Tiris nampak relatif mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bagus.

Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin, tingkah lakunya senantiasa berusaha dilandaskan pada keyakinan yang mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah Tuhan. Solidaritas kelompok sebagai dasar kehidupan yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia, dapat memberikan implikasi terhadap tatanan kerja sama kemanusiaan. Dihubungkan dengan kegiatan kepemimpinan, maka akan dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dan aktif partisipatif dalam proses pembangunan di semua sektor kehidupan dalam lingkup kepemimpinannya.

Motivasi seseorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kepemimpinan sangat beragam sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat dan sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan secara hukum tidak dipermasalahkan. Beberapa karakter yang harus dimiliki di dalam kepemimpinan adalah: pertama, *shiddiq* (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur, karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang jelas-

jelas berdosa, jika biasa dilakukan, akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Jika perampokan, pencurian, pemerasan, perampasan sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tindak penyimpangan dan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga para pemimpin yang melakukan kecurangan tersebut pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat.

Kedua, *amanah* (tanggung jawab). Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga *amanah* (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Dalam pandangan islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang-barang atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

Ketiga, tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Setiap sumpah atau janji harus benar dan jujur, karena jika tidak benar, maka akibatnya sangatlah fatal. Oleh karena itu, proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin semestinya menghasilkan pemimpin yang berkarakter. Keempat, menepati janji.

Seorang pemimpin dituntut untuk selalu menepati janjinya. Janji yang tidak ditepati oleh pemimpin akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekacauan. Kelima murah hati. Dalam kepemimpinannya seorang pemimpin mesti memiliki sifat bermurah hati, ramah tamah, sopan santun, suka senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab

Secara garis besar kepemimpinan dalam masyarakat Air Tiris cukup memiliki karakter. Efektifitas kepemimpinan di Air Tiris di samping dukungan pola *patron-client*, pemimpin berkarakter membawa kepada struktur kepemimpinan di mana masyarakat menunjukkan loyalitasnya. Walaupun fungsionaris partai-partai politik Islam tidak selalu memiliki hubungan struktural dengan para tokoh masyarakat, dalam hal penentuan pilihan pada pemilihan umum tergantung bagaimana fungsionaris partai-partai politik Islam memiliki kemampuan untuk merekrut para tokoh masyarakat tersebut. Pada pemilihan umum 1999, pengaruh fungsionaris partai-partai politik Islam yang cukup besar mengakibatkan para tokoh diikuti oleh masyarakat untuk mendukung partai-partai politik Islam. Nampak bahwa orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam tetap tinggi.

#### **4.2.1.2. Karakter**

Pada pemilihan umum 1999, telah muncul kembali partai-partai politik Islam yang berazaskan Islam atau berkarakter Islam. Pada dasarnya partai-partai politik Islam tidak pernah mencoba menyesuaikan diri dengan tidak lagi berasas dan berkarakter Islam. Azas partai-partai politik Islam, yang tergabung dalam PPP, Pancasila sebagai satu-satunya azas, pada tahun 1984-1997 adalah suatu keterpaksaan yang dipaksa. Soal lambang, partai-partai

politik Islam juga pernah mengalami perubahan. Misalnya, sampai 1977 partai-partai politik Islam, tergabung dalam PPP menampilkan lambang Ka'bah. Setelah pemerintah meminta partai-partai politik Islam yang tergabung PPP mengganti asas Islam dengan Pancasila, maka pada 1984 partai-partai politik Islam yang tergabung PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima.

Keinginan pemerintah untuk membubarkan partai-partai Islam telah dicanangkan semenjak Orde Baru eksis. Nama partai Islam hasil fusi tahun 1973, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak nampak adanya karakteristik keislaman, sedangkan tanda gambar ka'bah adalah hasil maksimal hasil perjuangan elite politik partai-partai politik Islam PPP dalam usaha melestarikan Islam.

Alasan yang terungkap berkaitan pernyataan Presiden tersebut adalah bahwa dengan adanya azas lain, di samping azas Pancasila, yang menjadi ciri khas dari partai-partai akan merangsang unsur-unsur ekstrim, baik dari dalam maupun dari luar, untuk lebih menonjolkan azas lain pada saat perjuangan politik mencapai bentuknya yang nyata, misalnya menjelang pemilihan umum. Di samping itu juga diungkap, bahwa penonjolan identitas lain selain Pancasila akan merangsang fanatisme kelompok yang sempit yang mudah digunakan oleh kelompok ekstrim yang sulit dikendalikan.

Dalam keadaan tidak berdaya, partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP, partai tunggal Islam dihadapkan kepada pilihan yang paling pahit. Nampaknya, demi kelangsungan hidup partai, partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP segera menyatakan menerima seruan penghilangan azas ciri (Islam) dan menegaskan bahwa satu-satunya azas partai-partai politik Islam yang

tergabung dalam PPP adalah Pancasila. Nampaknya partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP menyadari betul bahwa, bagaimanapun, kehendak pemerintah tersebut tidak mungkin dapat dihindari.

Walaupun azas partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP bukan Islam lagi, tetapi partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP menghadapi pemilihan umum tahun 1997 di kelurahan Air Tiris tetap menegaskan bahwa PPP adalah partai umat Islam yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Islam. Mendukung dan memilih partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP berarti telah mendukung dan menegaskan Islam. Sementara para tokoh masyarakat juga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan azas dari Islam ke Pancasila. Kondisi demikian itulah yang lebih mendorong pada tetap bertahannya suara partai-partai politik Islam yang tergabung dalam PPP yang berakibat pada tetap bertahannya PPP sebagai partai besar.

Memasuki pemilihan umum 1999, pemilihan umum pertama di era reformasi, bermunculan partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Pada pemilihan umum 1999, di Air Tiris terdapat empat partai politik yang termasuk dalam pengelompokan partai-partai politik Islam, yaitu PAN, PPP, PBB dan PK, dengan azas Islam dan berkarakter Islam. Keberadaan partai-partai politik Islam di Air Tiris sebenarnya adalah munculnya kembali partai-partai Islam yang selama ini bersembunyi, dan sesungguhnya yang dinanti-nantikan masyarakat Air Tiris. Masyarakat Air Tiris memandang menantikan Islam sebagai azas partai-partai politik Islam, Islam mewarnai partai-partai politik Islam dan sekaligus Islam merupakan agama yang dijunjung tinggi. Namun yang lebih esensial adalah bagaimana para kader, fungsionaris dan pengurus

partai-partai politik Islam tersebut berperilaku. Kemampuan mereka dalam mengimplementasikan keislaman dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan berpartai tetap meyakinkan masyarakat bahwa partai-partai politik Islam adalah partai politik dambaan mereka. Seorang simpatisan partai-partai politik Islam menyampaikan : “Bagaimanapun partai-partai politik Islam adalah partai yang kami tunggu, kami nantikan, partai-partai politik Islam adalah partainya umat Islam, partai kami masyarakat Air Tiris, para ulama semua mendukung partai-partai politik Islam”.<sup>31</sup>

#### **4.2.1.3. Lambang**

Pada pemilihan umum 1999 yang merupakan pemilihan umum pertama era reformasi, memunculkan partai-partai politik yang berazaskan dan berkarakter Islam. Di Air Tiris partai-partai politik tersebut adalah PAN, PPP, PBB dan PK. PAN menggunakan lambang matahari dan berbasis massa umat Islam Muhammadiyah, PPP berlambang Ka'bah, kiblat shalat umat Islam dan sebagai tempat suci umat Islam, PBB berlambang bulan bintang suatu simbol yang dimiliki umat Islam, dan PK berlambang simbol keadilan dan kemakmuran. Lambang, gambar dan simbol-simbol tersebut, yang melambangkan keislaman, tidak asing bagi masyarakat Air Tiris. Khusus untuk PPP, pada dasarnya PPP tidak pernah berharap mengganti lambang Ka'bah dengan gambar apapun. Lambang Bintang yang digunakan pada tahun 1984-1997 adalah suatu keterpaksaan yang dipaksa. Tidak dipungkiri bahwa Ka'bah sebagai lambang partai memiliki daya pikat yang besar. Masyarakat Islam tanpa pikir panjang bisa

---

<sup>31</sup>Wawancara tanggal 16 Oktober 2012.

menjatuhkan pilihannya pada partai berlambang Ka'bah ini. Dan kondisi ini dinikmati PPP di Air Tiris selama pemilihan umum awal Orde Baru.

Pada dasarnya gambar Bintang tidak menyurutkan masyarakat Air Tiris mendukung PPP. Penggantian lambang PPP dari gambar Ka'bah menjadi gambar Bintang tidak mengubah pandangan masyarakat bahwa PPP adalah partai Islam. Sebagaimana dikatakan seorang anggota masyarakat yang sudah senior, bahwa partai Islam dulu lambangnya bulan bintang, kemudian bumi bintang kemudian ka'bah kemudian bintang dan Ka'bah lagi. Sebagai lambang partai, gambar Bintang disambut masyarakat dengan penuh semangat dan optimis akan kebesaran PPP sebagai partai Islam. Perubahan lambang dari Ka'bah ke Bintang tetap memberi peluang luas bagi PPP untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi PPP, bahwa PPP dengan lambang Bintang tetaplah PPP partai Islam, memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Hasil pemilihan umum 1999 di kelurahan Air Tiris menunjukkan bahwa posisi partai-partai politik Islam kembali berjaya, dominan dan mayoritas. Fenomena ini bisa dikatakan bahwa identifikasi terhadap partai-partai politik Islam masyarakat Air Tiris tetap kuat. Sikap umat Islam tetap mendukung keberadaan partai-partai politik Islam, orientasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam tidak diragukan.

#### **4.2.1.4. Strategi Rekrutmen Partai-partai Politik Islam**

Menjelang pemilihan umum 1999 keberadaan partai-partai politik Islam di kelurahan Air Tiris bisa dikatakan sebagai euphoria masyarakat Islam Air Tiris, merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dikaitkan dengan munculnya

keputusan hasil Mukhtar NU di Situbondo, Jawa Timur, pada akhir tahun 1984, yang menyatakan bahwa “NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan aspirasinya melalui kekuatan sosial politik yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan dengan *akhlaqul karimah* sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta budaya politik yang sehat”, memang tidak banyak berpengaruh pada perolehan suara PPP di Air Tiris. Di samping itu juga diputuskan bahwa NU secara organisatoris tidak lagi terikat dengan partai manapun, baik PPP, GOLKAR, maupun PDI<sup>32</sup>. Hal ini lebih jelas menyatakan kenetralan sikap politik NU.

Di banyak daerah, terutama di Jawa, keputusan Mukhtar NU tersebut ternyata berkembang menjadi bernilai “penggembosan” terhadap PPP pada umumnya. Munculnya penggembosan ini berpangkal pada fatwa Rois ‘Aam NU KH. Achmad Siddiq yang berisi “ warga NU tidak wajib mencoblos PPP, tidak haram mencoblos GOLKAR dan PDI”. Fatwa ini kemudian disebarluaskan dalam “*buku kuning*” NU dan Pemilihan Umum yang disusun oleh H. Syaiful Mujab, wakil Ketua PBNU. Selain berisi fatwa, buku setebal 50 halaman itu juga memuat kembali inti sari keputusan Mukhtar tentang kembali ke khittah 1926 berikut uraian mengenai “perlakuan PPP” yang dianggap tidak adil terhadap NU.

Munculnya fatwa ini ternyata mempunyai dampak yang cukup jauh. Karena tak lama kemudian berbagai pesantren, berbasis kultural NU, menyatakan sikap meninggalkan PPP, dan berbondong-bondong pindah ke Golkar dan PDI. Ternyata momentum ini tidak disia-siakan oleh Golkar dan PDI, misalnya dengan pemberian bantuan-

---

<sup>32</sup>Arief Mudatsir, “*Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal*”, dalam *Prisma*, No. Ekstra (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 138



bantuan ke sejumlah pesantren, kunjungan Ketua Umum Golkar Sudharmono untuk bersilaturahmi dengan KH. As'ad Syamsul Arifin, sementara Ketua Umum DPP PDI Soerjadi bersama Megawati mengunjungi pesantren-pesantren di Jawa Timur<sup>33</sup>. Di desa-desa para fungsionaris Golkar juga nampak memanfaatkan keputusan NU yang bersejarah tersebut.

Untuk melaksanakan sikap netral NU dalam politik ini, PBNU mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 72/A-11/04-d/XI/85, yang berisi larangan perangkapan jabatan bagi pengurus NU dengan pengurus organisasi politik. Dengan adanya peraturan ini maka pengurus NU dilarang merangkap sebagai pengurus harian organisasi politik. Tujuan peraturan ini adalah agar pengurus NU lebih bisa mengkonsentrasikan diri dalam mengelola NU, mengingat setelah kembali ke khittah 1926 tugas-tugas NU semakin berat dan memerlukan penanganan secara khusus<sup>34</sup>.

Ketika para pemimpin, para tokoh agama, tidak banyak terpengaruh oleh keputusan NU tersebut, sebagian besar pemilih PPP tidak goyah dan tetap memilih PPP pada pemilihan umum 1987. Demikian juga pada pemilihan umum 1992, 1997, dan 1999. Pada pemilihan umum 1999 PPP Air Tiris bersama-sama dengan partai-partai politik Islam lainnya berhasil menjaga keutuhan elite yang selama ini memberi dukungannya kepada PPP.

Para pemuka masyarakat yang didominasi oleh elite informal dari berbagai kalangan profesi pada umumnya sekaligus sebagai elite agama, bergelar Haji dan memimpin majelis-majelis taklim. Mereka, dalam struktur

---

<sup>33</sup>Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (eds.), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 94-95.

<sup>34</sup>Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hlm. 112.

masyarakat berposisi sebagai *patron* sementara masyarakat kebanyakan sebagai *client*. Karakter masyarakat yang berstruktur patron-client mengisyaratkan kondisi dimana masyarakat kebanyakan cenderung mengikuti para pemimpin dalam banyak kondisi termasuk pada pemilihan umum.

Ketika para pemimpin mendukung partai-partai politik Islam, masyarakat mengikuti dan memberikan dukungannya pada partai-partai politik Islam. Dalam pemilihan umum 1999, partai-partai politik Islam berhasil merekrut para pemimpin masyarakat untuk mendukung dan berjuang memajukan dan mengembangkan Islam dengan mendukung partai-partai politik Islam dalam pemilihan umum 1999. Hendra Yani<sup>35</sup>, fungsionaris PPP Kampar mengemukakan :

“Masyarakat Air Tiris adalah masyarakat agamis yang memiliki kepatuhan kuat terhadap para tokoh mereka. Hubungan yang erat antara tokoh masyarakat dan masyarakatnya merupakan salah satu pengaruh utama keberhasilan partai-partai politik Islam, khususnya PPP, di Air Tiris”.

Ternyata, pada pemilihan umum 1999, partai-partai politik Islam, gabungan dari PAN, PPP, PBB dan PK berhasil keluar sebagai pemenang mutlak dengan meraih suara sebesar 86,53%. Sementara partai Golkar dan PDIP bersama-sama hanya memperoleh 13,47% suara.

#### **4.2.1.5. Strategi Kampanye Partai-partai Politik Islam**

Kampanye pemilihan umum 1999 dinilai oleh beberapa pengamat dan pakar ilmu politik merupakan

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Hendra Yani, fungsionaris PPP Kampar tahun 2009, pada 14 November 2013

kampanye yang mulai bersifat rasional persuasif berbanding dengan kampanye pada pemilihan umum - pemilihan umum sebelumnya yang sangat diwarnai oleh sikap emosional konfrontatif. Suatu hal yang menonjol selama pemilihan umum 1999 adalah sikap ABRI yang mulai lebih netral terhadap OPP. Ini sangat berbeda dengan pemilihan umum-pemilihan umum sebelumnya di mana ikatan antara ABRI dan Golkar masih jelas terlihat.<sup>36</sup>

Namun demikian, kampanye pemilihan umum 1999 merupakan kampanye yang seakan-akan baru, mengingat banyaknya peserta pemilihan umum. Hal ini ditandai oleh, setidaknya-tidaknya, dua kondisi, yaitu, pertama, munculnya begitu banyak partai politik, terdapat 48 partai politik. Partai-partai politik tersebut tersebar dengan berbagai ideologi dan karakter, termasuk partai-partai politik dengan ideologi dan karakter Islam. Dan, kedua, komitmen nasional akan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih fair, luber dan jujur. Dengan demikian akan terjadi persaingan yang cukup seru antar partai-partai politik.

Tema dan materi kampanye partai-partai politik Islam dalam pemilihan umum 1999 meliputi bidang peningkatan kehidupan beragama merupakan prioritas yang menempati urutan pertama, kemudian baru disusul oleh bidang-bidang yang lain. Prioritas ini nampaknya bertolak dari wawasan kalangan partai-partai itu sendiri yang melihat bahwa eksistensi partai-partai politik Islam masih tetap tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukannya. Di samping PPP, partai-partai Islam tidak kurang dari partai-partai Islam yang berfusi dalam PPP. Sebagai hasil fusi empat eks partai Islam, PPP tetap mempertahankan dirinya sebagai partai Islam yang

---

<sup>36</sup>Ibrahim Ambong, "Pemilihan Umum 1987 dan Prospek Golkar". Dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit.*, hlm. 78.

termasuk dalam keputusan Muktamar tentang “Khittah” Perjuangan Partai yang tidak hanya dijadikan bahan utama penataran jurkam tetapi juga menjiwai keseluruhan program kampanye PPP pada pemilihan umum 1999. Salah satu bagian khittah itu berbunyi :

“... Khittah Perjuangan Partai pada hakekatnya adalah perumusan perjuangan umat Islam yang dijelaskan oleh keempat ex Partai Politik Islam yang telah berfusi pada tahun 1973. Makna perjuangan ex Partai Politik Islam adalah untuk membina dan memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia dalam rangka melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan potensi nasional lainnya agar pengisian kemerdekaan dapat memenuhi aspirasi rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Pancasila dan UUD '45...<sup>37</sup>.

Dari rumusan “Khittah” Perjuangan Partai tersebut terlihat bahwa walaupun secara formal PPP berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan telah meninggalkan azas ciri Islam, namun tuntutan “khittah” perjuangan partai sendiri, yang juga tercermin dalam program partai, serta keperluan akan massa (suara) dalam pemilihan umum, agaknya telah “memaksa” elite partai untuk tetap memakai pendekatan agama (Islam). Di banyak daerah, kampanye dengan pendekatan ini masih tetap memikat, termasuk di kelurahan Air Tiris, yang pada dasarnya pendekatan agama telah berhasil menciptakan identifikasi masyarakat terhadap partai-partai Islam.

Pada pemilihan umum-pemilihan umum, hampir seluruh forum informal, seperti pengajian-pengajian, merupakan sarana bagi pemantapan identifikasi terhadap

---

<sup>37</sup>Lihat keputusan Muktamar I PPP tentang Khittah Perjuangan Partai, dalam *AD dan ART, Khittah Perjuangan, Pernyataan Politik PPP* (Tanpa kota: tanpa penerbit, tanpa tahun), hlm. 87-88.

partai-partai Islam. Dan, sejak terjadi fusi empat partai Islam tahun 1973, bahwa satu-satunya partai yang menyalurkan aspirasi Islam adalah PPP. Pada pemilihan umum 1999, PPP kelurahan Air Tiris dan kecamatan Kampar tetap melaksanakan strategi yang tidak banyak berubah, yaitu menggunakan isu-isu agama. PPP di kelurahan Air Tiris tidak banyak mengalami perubahan. Seperti disampaikan oleh Asnimar<sup>38</sup>, simpatisan perempuan PPP :

“... Hampir semua penceramah, ustad yang berasal dari PPP, dalam ceramah, tausiahnya di berbagai majlis mengusung materi kampanye secara terselubung, yakni menanamkan isu moral PPP. Bahwa PPP adalah partai yang menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi umat Islam ...”

Demikian juga partai-partai politik Islam lainnya, hampir seluruh forum informal, seperti pengajian-pengajian, juga merupakan sarana bagi pemantapan identifikasi terhadap partai-partai Islam, hakekat masyarakat Air Tiris adalah masyarakat yang mendukung partai-partai politik Islam. Dan, sejak terjadi reformasi dan berdirinya kembali partai-partai Islam masyarakat Air Tiris berbondong-bondong memberikan dukungannya pada partai-partai Islam. Pada pemilihan umum 1999, partai-partai politik Islam Air Tiris dan kecamatan Kampar melaksanakan strategi dengan pendekatan agama, yaitu menggunakan isu-isu agama. Pengajian-pengajian rutin yang telah membudaya di setiap kampung kelurahan Air Tiris, kemudian, selalu didatangi oleh fungsionaris dan kader partai-partai politik Islam yang memang sudah biasa menjadi aktivis kegiatan-kegiatan tersebut. Sementara itu,

---

<sup>38</sup>Wawancara pada tanggal 20 November 2011.

issue fatwa KH. Ahmad Siddiq kepada masyarakat luas bahwa umat Islam, khususnya warga NU, tidak wajib memilih PPP, dan tidak haram memilih Golkar dan PDI tidak banyak berpengaruh.

Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di depan dilakukan secara intensif sampai pada masa kampanye. Sementara itu fungsionaris partai-partai politik Islam, baik kecamatan Kampar maupun kelurahan Air Tiris lebih bersikap aktif dan optimis akan dukungan massa pemilih. Bahkan, pihak fungsionaris partai-partai politik Islam kabupaten Kampar pun berharap dan yakin bahwa massa partai-partai politik Islam tidak akan mudah dipengaruhi dan tetap menjatuhkan pilihan pada partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 1997<sup>39</sup>. Sementara itu, PDIP yang memang sejak pemilihan umum - pemilihan umum sebelumnya merupakan partai yang memiliki simpatisan sangat terbatas, pada pemilihan umum 1999 tidak memperlihatkan kegiatan yang nampak kecuali terbatas pada penempelan-penempelan tanda gambar lambang partai.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kampanye partai-partai politik Islam di kelurahan Air Tiris menghadapi pemilihan umum 1999, yaitu membawa dan mengedepankan isu-isu agama. Pawai umum dan rapat umum dilakukan seperti kampanye-kampanye pemilihan umum yang telah lalu. Dengan kondisi yang demikian, ternyata partai-partai politik Islam mampu mengumpulkan suara 86,53%, yang berarti hanya mendominasi kembali dan sebagai pemenang mayoritas. Sebaliknya parti Golkar dan PDIP, sebagai partai-partai politik non Islam hanya mengumpulkan suara 13,47%.

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Pengurus DPC PPP Kabupaten Kampar, pada tanggal 4 Oktober 2012.

#### **4.2.1.6. Hasil Penghitungan Suara**

Warga masyarakat Air Tiris yang tercatat sebagai pemilih menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Hasil penghitungan suara pada pemilihan umum 1999 di masyarakat Air Tiris secara keseluruhan menunjukkan partai-partai politik Islam memperoleh 86,53% suara, terdiri dari PPP 35,11 % suara, mengalami kenaikan tipis berbanding perolehan suara pada pemilihan umum 1997, PAN, sebagai partai baru, berjaya memperoleh 43,84 %, Partai Keadilan dan Partai Bulan Bintang masing-masing memperoleh 4,66 % dan 2,92 %. Partai Golkar memperoleh 11,19 %, mengalami penurunan yang cukup besar dibanding pemilihan umum 1997, dan PDIP hanya memperoleh 2,28 %, sebagai partai-partazi politik non Islam.

#### **4.2.2. Faktor Pengaruh Perubahan Orientasi politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 2004**

Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum kedua setelah Suharto jatuh, dan pemilihan umum pertama dalam kerangka konstitusi pasca amandemen. Pemilihan umum 2004 ini dapat dikatakan sebagai jalan yang sama sekali baru bagi Indonesia dalam menapaki demokrasi perwakilan. Kebaruan itu pada satu sisi adalah akibat dari dampak perubahan konstitusi seperti yang disebutkan di atas, dan pada sisi yang lain adalah efek dari kebebasan terhadap metode berpolitik aktor-aktor politik dan *civil society*.

Pertama, militer tidak lagi duduk dalam lembaga perwakilan. Pemilihan umum 2004 adalah pemilihan umum pertama bagi lembaga legislatif terbebas dari konsep dwi fungsi ABRI. Setelah sekian lama militer berada di dalam

lembaga perwakilan melalui jatah kursi yang didapatkan secara gratis, dalam pemilihan umum 2004 militer tidak lagi mendapatkan alokasi kursi. Seluruh kursi lembaga legislatif diperebutkan oleh partai politik. Meskipun demikian, militer dalam pemilihan umum ini tidak diberi hak pilih. Dengan demikian, militer diposisikan 'netral' yaitu tidak memilih dan tidak mendapatkan jatah kursi di parlemen.

Kedua, lahirnya penyelenggara pemilihan umum yang independen, tetap dan nasional. Independen dalam arti orang-orang yang duduk di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbebas dari unsur pemerintah dan partai politik sekaligus tidak menjadi bawahan atau sub organisasi dari lembaga atau departemen lain yang ada dalam pemerintahan. Mereka terutama berasal dari unsur perguruan tinggi dan aktivis. KPU bersifat tetap dalam arti keberadaannya tidak bersifat sementara (*ad hoc*). Berbeda dengan pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, keberadaan KPU pada umumnya bersifat *ad hoc*. Sementara itu KPU bersifat nasional dalam arti KPU berada di seluruh Indonesia. Dalam setiap hierarki pemerintahan, sampai tingkat kabupaten/kota, terdapat KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Keberadaan KPU yang sedemikian rupa menjadikan pemilihan umum dapat berjalan relative lebih *fair*.

Ketiga, pemilihan umum dilaksanakan dengan mengerahkan sumberdaya yang sangat besar. Sumber daya itu terutama berkaitan dengan pembiayaan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum sendiri memerlukan dana sebesar 6,9 trilyun. Sementara itu dari partai politik untuk keperluan kampanye lebih besar lagi. Dari 12 partai politik yang melaporkan keuangannya, dana kampanye mereka lebih dari 312 milyar dengan Golkar,



PDIP, dan PKS sebagai tiga partai politik dengan pengeluaran terbesar dalam pemilihan umum.<sup>40</sup>

Terakhir, masifikasi penggunaan instrument survey untuk jajak pendapat dan *quick count*. Pemilihan umum 2004 merupakan tonggak penggunaan instrument *survey* dimulai dalam perhelatan pemilihan umum secara besar-besaran. Penggunaan *instrument survey* untuk kepentingan pemilihan umum sebenarnya juga sudah dimulai pada pemilihan umum 1999. Tetapi tidak sebesar pada pemilihan umum 2004. Pada pemilihan umum 2004, berbagai *survey* dilakukan untuk melihat perilaku pemilih, tingkat dukungan, dan memprediksi hasil pemilihan umum. Aktivitas itu dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Lembaga Survey Indonesia (LSI), IFES, dan LP3ES. Secara tidak langsung, keberadaan lembaga-lembaga tersebut turut membantu bekerjanya politik partai dalam mempengaruhi pemilih juga turut mendorong pemilihan umum yang *fair*. Sebagai fenomena baru, hasil yang dicapai dari lembaga-lembaga itu cukup mencengangkan karena hasil *survey* dan *quick count* yang mereka lakukan relatif akurat. *Quick count* yang dilakukan oleh LP3ES bekerja sama dengan *Institute for International Affairs* misalnya, menunjukkan hal itu.

Terdapat 24 (dua puluh empat) partai politik yang dinyatakan lolos mengikuti pemilihan umum. Berbeda dengan pemilihan umum 1999 yang diikuti oleh partai politik dari berbagai tipe ideologi, pemilihan umum 2004 tidak diikuti oleh partai dalam kategori kelas, secara khusus sosialisme. Pemilihan umum 2004 menjadi ajang kompetisi di antara partai politik berbasis murni aliran dan *catch-all*. Pada pemilihan umum 1999, partai tipe kelas sosialisme

---

<sup>40</sup>Ibrahim Fahmi Badoh & Luky Djani. *Korupsi Pemilu* (Jakarta: ICW, 2006), hlm. 97 dan 105.

tidak mendapatkan sambutan yang baik dari rakyat. PRD, sebagai partai yang paling baik merepresentasikan gagasan sosialisme, hanya mendapatkan suara kurang dari 1% atau tepatnya 78.730 suara, menempati urutan ke – 40 dari 48 partai yang ikut dalam pemilihan umum.

Melihat perolehan suara partai, pemilihan umum 2004 memunculkan 3 pemenang. Pertama, partai Golkar. Perolehan suara partai Golkar adalah 21,58%, tidak jauh dari perolehan suara dalam pemilihan umum 1999. Dalam pemilihan umum yang sangat kompetitif partai Golkar mendapatkan suara yang tertinggi dan PDIP jatuh pada urutan kedua (18,3%). Prestasi Golkar yang sedemikian rupa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dari segi organisasi, partai Golkar telah mampu mengkonsolidasikan kekuatannya setelah sempat bercerai-berai ketika gerakan reformasi bergulir. Jaringan modal, pewacanaan, dan aktor kembali terjalin secara solid. Dengan organisasi yang lebih solid partai Golkar kemudian berusaha masuk kembali ke dalam masyarakat dan mempengaruhi proses-proses politik<sup>41</sup>.

Kedua<sup>42</sup>, dari sudut pandang pemilih terjadi semacam romantisme akan prestasi Orde Baru. Pemilih membayangkan situasi ekonomi dan keamanan lebih kondusif ketika Golkar berkuasa. Dengan memilih partai Golkar, pemilih membayangkan era kemapanan akan kembali datang. Terakhir, Golkar melakukan inovasi politik yang mampu menarik perhatian publik berupa konvensi partai. Konvensi partai dimaksudkan untuk mendapatkan

---

<sup>41</sup>Lihat Akbar Tanjung. 2007. *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* (Jakarta: Gramedia, 2007).

<sup>42</sup>Roni Heriyandi. 2006. *Demokratisasi Internal Partai Golkar Pasca Orde Baru (1998-2004)* (Jakarta: Disertasi Deprtemen Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Politik Fisip UI Jakarta, 2006).

calon presiden yang akan dinominasikan oleh partai Golkar. Konvensi ini selain menarik perhatian publik juga mampu membangun citra partai Golkar sebagai partai yang berbeda dengan Golkar di masa Orde Baru.

Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini merupakan reinkarnasi dari Partai Keadilan (PK), yaitu partai berbasis Islam dalam pemilihan umum 1999 yang tidak memenuhi *electoral threshold* sehingga harus berganti nama. Perolehan PKS mencapai 7,34%, suatu loncatan yang luar biasa di mana pada pemilihan umum 1999 hanya memperoleh 1,4% suara. Bila diperhatikan, prestasi PKS adalah karena politik pencitraan yang sangat bagus di hadapan publik dan sistem pengorganisasian partai yang rapi. Di tengah apatisme publik terhadap perilaku berpolitik, PKS tampil dengan slogan sebagai 'partai yang bersih'. PKS berusaha menumbuhkan kepercayaan publik bahwa berpolitik tidak harus 'kotor'. Selain itu, kader-kader PKS secara aktif juga berusaha masuk dalam berbagai lini masyarakat. Kader-kader PKS aktif melakukan rekrutmen anggota dan berbagai aktivitas simpatik kemasyarakatan yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan kepada mereka.

Terakhir, adalah Partai Demokrat (PD). Perolehan suaranya adalah 7.49%. Partai ini adalah partai yang baru didirikan menjelang pemilihan umum 2004. Dengan kata lain, pengalaman pemilihan umum 2004, merupakan pengalaman pertama PD ikut dalam kompetisi. Partai ini juga disebut sebagai pemenang sejati pada pemilihan umum 2004 adalah karena usianya sedemikian muda dan absennya basis sosial PD yang biasanya menjadi modal dasar eksistensi partai politik. Faktor utama yang menyebabkan PD mendapatkan suara yang besar, mengalahkan PKS dan PAN yang memiliki akar sosial yang

kuat, lebih karena faktor tokoh yang diusung, sekaligus penggagas partai ini, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kemudian menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung pada pemilihan presiden 2004.

Tabel 4.8.  
Perolehan Suara dan Kursi Partai Pemilihan Umum 2004

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi	%
1	PNI Marhaenisme	923.159	0,81	1	0,20
2	PBSD	636.397	0,56	0	0,00
3	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11	2,00
4	PM	842.541	0,74	0	0,00
5	PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM	9.248.764	8,15	58	10,50
6	PPDK	1.313.654	1,16	5	0,90
7	PPIB	672.952	0,59	0	0,00
8	PNBK	1.230.455	1,08	1	0,20
9	PD	8.455.225	7,45	57	10,40
10	PKPI	1.424.240	1,26	1	0,20
11	PPDI	855.811	0,75	1	0,20
12	PPNUI	895.610	0,79	1	0,00
13	PAN	7.303.324	6,44	52	9,50
14	PKPB	2.399.290	2,11	2	0,40
15	PKB	11.989.564	10,57	52	9,50
16	PKS	8.325.020	7,34	45	8,20
17	PBR	2.764.998	2,44	13	2,40
18	PDIP	21.026.629	18,53	109	19,80
19	PDS	2.414.254	2,13	12	2,20
20	PG	24.480.757	21,58	128	23,30
21	PP-Pancasila	1.073.139	0,95	0	0,00
22	P Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0	0,00
23	PPD	657.916	0,58	0	0,00
24	Partai Pelopor	878.932	0,77	2	0,40
TOTAL		113.462.414	100	550	100

Sumber : KPU D Provinsi Riau

Pada pemilihan umum ini perolehan suara PDIP turun drastis dari 33,7% menjadi 18,53% atau turun 15,17%. Turunnya suara PDIP itu hampir sama dengan perolehan dua partai yaitu PD dan PKS atau antara PPP dan PAN. Tingginya suara yang berpindah ini (*swing voters*) pada satu sisi dapat disebabkan oleh ketidakpuasan publik kepada PDIP karena ketika memerintah tidak mampu mempresentasikan kepentingan 'wong cilik' yang selama ini dikoaar-koarkannya, dan dapat juga karena kelihaiian partai lain dalam mencitrakan diri menjadi magnet yang lebih menjanjikan perubahan. Suara pendukung PDIP diperkirakan sebagian besar menyeberang ke PD, PDS, PNBK, PNIM, PPDI, dan PIB<sup>43</sup>.

Sementara itu, partai-partai menengah seperti PKB, PPP, dan PAN suara yang mereka peroleh relatif stabil. Hal ini karena *captive market* mereka cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi. Terlebih lagi, terutama PKB dan PAN, pimpinan pucuk partai adalah mereka yang sejak awal dinominasikan untuk maju dalam pemilihan presiden langsung, dan dalam pemilihan umum legislatif mereka *all-out mem-back up* partai<sup>44</sup>.

Mengkaji perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2004 di masyarakat Air Tiris pada dasarnya dapat dikatakan merupakan permulaan penurunan perolehan suara partai-partai politik Islam. Hal ini menunjukkan mulai adanya perubahan orientasi politik terhadap partai politik Islam. Dibandingkan dengan pemilihan umum 1999, suara partai-partai politik Islam mengalami penurunan, walaupun hanya mengalami

---

<sup>43</sup>Lihat Anis Rasyid Baswedan. "Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004" dalam *Jurnal Analisis Volume 33 Nomor 2* (Jakarta: CSIS, Juni 2004).

<sup>44</sup>Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), hlm. 193

penurunan sekitar 5,20%. Dapat dikatakan juga merupakan kemerosotan perolehan suara yang pertama sejak pemilihan umum pertama era reformasi tahun 1999. Komposisi perolehan suara antara partai-partai politik Islam yang terdiri dari PPP, PBR, PAN, PKS dan PBB dengan partai-partai politik non Islam, yang terdiri dari partai Golkar, PDIP dan partai Demokrat masih didominasi oleh partai-partai politik Islam. partai-partai politik Islam yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum 1999, pada pemilihan umum 2004 perolehan suaranya sedikit menurun, menjadi 80,30%. Pemenang pertama adalah partai pendatang baru, Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan perolehan suara yang cukup meyakinkan yaitu 41 %. Partai Golkar dan PDIP tidak beranjak. PBB dan PKS mengalami kenaikan yang lumayan, sementara PAN, pemenang pada pemilihan umum 1999, mengalami penurunan hanya berada pada peringkat ke empat.

#### **4.2.2.1. Kepemimpinan**

Kepemimpinan yang berkualitas merupakan persyaratan utama bagi keberhasilan dan tercapainya tujuan bagi organisasi. Efektivitas kepemimpinan merupakan pengaruh dominan terhadap efektivitas organisasi. Kepemimpinan melekat pada seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dalam khasanah masyarakat Islam, pemimpin sering disebut *imam* atau *khalifah*.

Kepemimpinan yang terjadi pada partai politik di masyarakat Air Tiris sesuai dengan keberadaan partai politik daerah di Indonesia. Dalam perjalanan panjang sejarah demokrasi yang dibangun di negara ini, bahwa peran strategis partai politik adalah untuk melahirkan para

pemimpin masyarakat. Kontribusi yang demikian besar ini akan menjadi lebih bermakna manakala para pemimpin partai yang diamanati rakyat untuk memimpin ini mampu berperan optimal untuk membawa kehidupan masyarakat ini lebih adil dan sejahtera.

Pemimpin merupakan faktor penting untuk membawa perubahan dan perkembangan suatu bangsa. Kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang tidak menentu, merupakan akibat perbuatan para pemimpin yang telah berkuasa selama ini. Para pemimpin yang dilahirkan oleh partai politik banyak mengalami kegagalan dalam membawa masyarakat menuju pada kondisi yang lebih baik. Sering, parpol hanya sibuk demi meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. Mereka nyaris tidak memandang perlu untuk terus meningkatkan kualitas para kader dan pemimpin-pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang masih setengah hati, serampangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas yang tepat bagi keseriusan pembangunan SDM dalam sebuah parpol.

Dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Air Tiris, kualitas seorang pemimpin mengarah pada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pertama, tak ada pemimpin di antara masyarakat Islam kecuali yang beriman, kedua tak ada pemimpin yang mempermalukan Islam. Ketiga, pemimpin harus memiliki kemahiran di bidangnya. Pemimpin partai yang tidak memahami dan mahir dalam organisasi kepartaian akan gagal membawa partai mencapai tujuannya.

Keempat, pemimpin harus dapat diterima masyarakat, mencintai dan dicintai masyarakat, mendoakan dan didoakan masyarakat. Dan kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan

mendahulukan kepentingan masyarakat, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitnah.

Pendorong seseorang untuk ambil bagian dalam suatu proses kepemimpinan sangat beragam sebagaimana halnya motivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat dan sebagainya. Keragaman motivasi atau latar belakang niat seseorang dalam bertindak adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan secara hukum tidak dipermasalahkan.

Beberapa karakter yang harus dimiliki di dalam kepemimpinan adalah: pertama, *shiddiq* (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika perampokan, pencurian, pemerasan, perampasan sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tindak penyimpangan dan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga para pemimpin yang melakukan kecurangan tersebut pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat.

Kedua, *amanah* (tanggung jawab). Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya tersebut. Ketiga, tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Keempat, menepati janji. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu menepati janjinya. Janji yang tidak ditepati oleh pemimpin akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, yang



pada gilirannya dapat menimbulkan kekacauan. Kelima murah hati. Dalam kepemimpinannya seorang pemimpin mesti memiliki sifat bermurah hati, ramah tamah, sopan santun, suka senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab.

Kepemimpinan politik partai-partai politik Islam pada masyarakat Air Tiris cukup memiliki karakter. Efektifitas kepemimpinan politik partai-partai politik Islam di Air Tiris cukup tinggi di samping dukungan pola *patron-client*, pemimpin berkarakter membawa kepada struktur kepemimpinan di mana masyarakat menunjukkan loyalitasnya. Walaupun fungsionaris partai-partai politik Islam tidak memiliki hubungan struktural dengan para tokoh masyarakat, dalam hal penentuan pilihan pada pemilihan umum tergantung bagaimana fungsionaris partai-partai politik Islam memiliki kemampuan untuk merekrut para tokoh masyarakat tersebut. Pada pemilihan umum 2004, pengaruh fungsionaris partai-partai politik Islam yang cukup besar mengakibatkan para tokoh diikuti oleh masyarakat untuk mendukung partai-partai politik Islam. Seorang tokoh masyarakat<sup>45</sup> mengatakan :

Aktivis partai-partai politik Islam di Air Tiris merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cukup memahami kepemimpinan yang islami. Mereka juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di masyarakatnya, melakukan interaksi dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat. Masyarakat menerima mereka dan sekaligus mendukung partai-partai politik mereka. Partai-partai politik Islam dengan berbagai nama dan simbol keislamannya.

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Jabarullah, anggota DPRD kota Pekanbaru dari PPP periode 2009-2014, juga tokoh masyarakat Air Tiris.

#### **4.2.2.2. Karakter**

Pada pemilihan umum 2004 partai-partai politik Islam bermunculan. Termasuk dalam partai-partai politik Islam ini, pertama partai politik yang berazaskan Islam, kedua yang pendukungnya atau basis sosialnya adalah masyarakat Islam, dan ketiga, partai-partai politik dengan simbol, lambang dan gambar-gambar dengan ciri keislaman. Azas partai-partai politik dengan Pancasila sebagai satu-satunya azas, pada tahun 1984-1997 adalah suatu keterpaksaan yang dipaksa. Partai-partai politik saat itu harus menyesuaikan dengan azas Pancasila, walaupun secara mendasar, mengingkari Islam sebagai azas sama artinya dengan mengingkari jati diri dan sikap politik partai-partai politik Islam itu sendiri. Semangat ini yang kemudian memunculkan partai-partai politik Islam yang sesungguhnya Islam merupakan ruh, spirit, semangat yang mengidologi serta sebagai motivator dalam perjuangan.

Partai-partai politik Islam perlu mengimplementasikan azas Islam dalam kehidupan nyata. Sudah barang tentu yang diperjuangkan partai-partai politik Islam bukan sekadar meraih kekuasaan saja, tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai partai politik dapat dikatakan bahwa partai-partai politik Islam adalah wadah perjuangan umat Islam.

Dalam konteks implementasi Islam sebagai sebuah karakter partai, partai-partai politik Islam mengidentifikasi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, yaitu bahwa Islam memenuhi semua aspek kehidupan; ekonomi, budaya, politik, hukum, lingkungan hidup, dan sebagainya. Islam yang mengimplementasikan semua kehidupan, bersifat

inklusif, terimplementasi dalam tingkah laku dan perbuatan yang Islami. Bukan Islam yang dilihat sebagai terorisme, radikalisme, atau gerakan sempalan, ajaran yang tidak benar.

Dalam berpolitik tidak boleh keluar dari ukuran seperti itu. Tidak boleh bergeser dari platform. Kelemahan yang sering menjadi bumerang bagi partai-partai politik Islam adalah perilaku anggota, kader, pengurus yang tidak Islami. Hal ini berkontribusi negatif terhadap partai-partai politik Islam, orang tidak simpati kepada partai-partai politik Islam. Perpecahan internal, politik transaksional, sekularisme, pragmatisme, politik uang, bisa menggerogoti partai-partai politik Islam, mengerdilkan partai-partai politik Islam. Konsistensi dan konsolidasi moral secara total dan tetap pada koridor Islam, yang sesungguhnya akan mampu membesarkan partai-partai politik Islam.

Partai-partai politik Islam menghadapi pemilihan umum tahun 1999 di masyarakat Air Tiris masih berhasil mempertahankan kader-kader tradisionalnya. Identifikasi kepartaian mereka terhadap partai-partai politik Islam masih tinggi. Sementara fungsionaris partai-partai politik Islam masih kelihatan kompak. Sikap dan kondisi demikian itulah yang lebih mendorong pada loyalitas masyarakat terhadap partai-partai politik Islam. Perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2004 cukup memuaskan, hanya mengalami penurunan tipis dibanding dengan perolehan suara pada pemilihan umum 1999.

Karakter keislaman masih tetap menjadi karakteristik partai-partai politik Islam untuk meraih suara. Islam, sebagai karakter partai tak pernah dipermasalahkan masyarakat, Islam tetap merupakan agama yang dijunjung tinggi. Namun yang lebih esensial adalah bagaimana para kader, fungsionaris dan pengurus partai-partai politik Islam

berperilaku. Kemampuan mereka dalam mengimplementasikan keislaman dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan berpartai tetap meyakinkan masyarakat bahwa partai-partai politik Islam adalah partai dengan karakteristik Islam, partai pilihan umat Islam. Seorang ninik mamak<sup>46</sup>, tokoh adat masyarakat Air Tiris menyatakan : “partai-partai politik Islam adalah partai Islam, partai-partai politik Islam adalah partainya masyarakat Air Tiris, ninik mamak dan para ulama semua mendukung partai-partai politik Islam ”.

#### **4.2.2.3. Lambang**

Pada pemilihan umum 2004 adalah pemilihan umum kedua bagi partai-partai politik Islam setelah selama 1984-1998 partai berkarakter Islam hanya diwakili oleh PPP saja. Pada pemilihan umum 2004 tersebut partai-partai politik Islam kembali menegaskan penggunaan azas Islam dan juga simbol, lambang dan gambar yang berkarakter keislaman. Misalnya PPP dengan gambar Ka’bah sebagai lambang yang sekaligus menegaskan kembali menjadi partai berazaskan Islam. Pada dasarnya partai-partai politik Islam tidak pernah berharap mengganti lambang keislaman dengan gambar apapun. Lambang Bintang, misalnya, yang digunakan PPP pada tahun 1984-1997 adalah suatu keterpaksaan yang dipaksa. Tidak dipungkiri bahwa Ka’bah sebagai lambang partai memiliki daya pikat yang besar. Masyarakat Islam bisa tanpa pikir panjang bisa menjatuhkan pilihannya pada partai berlambang Ka’bah ini. Dan kondisi ini dinikmati partai-partai politik Islam di Air Tiris.

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan seorang tokoh adat, ninik mamak masyarakat Air Tiris pada Oktober 2012.

Secara tradisional masyarakat Air Tiris adalah pendukung partai-partai politik Islam, munculnya kembali partai-partai politik Islam dengan berbagai lambang berkarakter keislaman disambut dengan penuh semangat. Perubahan sistem pemilihan umum yang memberi peluang lebih luas pada masyarakat untuk mendirikan partai-partai politik, memunculkan berdirinya puluhan partai politik baru. Beberapa partai politik baru tersebut berazas dan berkarakter keislaman. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat Air Tiris yang memperoleh kegairahan baru dalam pemilihan umum.

Hasil pemilihan umum 2004 di masyarakat Air Tiris menunjukkan bahwa posisi partai-partai politik Islam kembali menunjukkan dominasinya dan berjaya, mengalahkan partai-partai politik non Islam. Fenomena ini bisa menjelaskan bahwa identifikasi masyarakat terhadap partai-partai politik Islam pada masyarakat Air Tiris tetap kuat. Sikap umat Islam tetap mendukung keberadaan partai-partai politik Islam, partai yang berlambang simbol-simbol keislaman, Ka'bah dan lain-lain, yang dianggap memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Modernisasi, perubahan ekonomi, kemajuan pendidikan, urbanisasi, budaya luar dan sejumlah faktor lain yang terus meningkat tidak mengubah pertimbangan memilih umat Islam, masyarakat santri Air Tiris, untuk tetap mendukung partai-partai politik Islam.

Seorang aktivis PAN di Air Tiris menyatakan :  
“Munculnya kembali partai-partai politik Islam dan berkarakter keislaman dengan menggunakan lambang Ka'bah dan simbol-simbol keislaman lainnya menimbulkan optimisme dan kegairahan baru bagi kami. Kami yakin Ka'bah dan simbol-simbol keislaman lainnya akan

menghimbau masyarakat untuk mendekat dan menikmati kesejukan, yang selama ini didambakan. Partai-partai politik Islam, khususnya di Air Tiris, akan berkembang dan besar ke depannya. Partai-partai politik Islam akan mendapat dukungan dari para ulama, ninik mamak dan tokoh masyarakat.”<sup>47</sup>

#### **4.2.2.4. Strategi Rekrutmen Partai-partai Politik Islam**

Strategi rekrutment partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris adalah bagaimana partai-partai politik Islam merekrut kader-kader tangguh untuk jabatan fungsionaris partai di masyarakat Air Tiris. Dengan kader-kader tangguh partai-partai politik Islam akan mampu meraih suara terbanyak sehingga keluar sebagai pemenang pada setiap pemilihan umum. Dan dalam hal ini partai politik yang lain, termasuk partai Golkar dan PDIP, tentu juga melakukan hal yang sama, yaitu berusaha menampilkan fungsionaris partai yang tangguh untuk memenangkan pemilihan umum.

Berbeda dengan wilayah lain pada umumnya di mana partai-partai politik Islam mengalami kesulitan dalam mencari figur fungsionaris di tingkat masyarakat terbawah, namun bagi partai politik khususnya partai-partai politik Islam, di masyarakat Air Tiris dapat dikatakan bahwa partai-partai politik Islam tidak mengalami kesulitan.

Seperti telah dipaparkan pada bab terdahulu bahwa setiap kali pemilihan umum, sejak pemilihan umum 1955, partai-partai politik Islam selalu meraih suara yang cukup signifikan, bersaing dengan partai-partai lainnya. Kekalahan partai-partai politik Islam dari Golkar pada pemilihan umum masa Orde Baru lebih disebabkan oleh

---

<sup>47</sup>Wawancara dengan aktivis PAN di Air Tiris pada 12 November 2012.

peran pemerintah yang menghendaki kemenangan Golkar pada setiap pemilihan umum. Namun demikian, partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris memperoleh suara yang cukup berarti pada pemilihan umum masa Orde Baru tersebut, pemilihan umum 1977 sampai dengan pemilihan umum 1997. Dengan demikian partai-partai politik Islam tidak mengalami kesulitan dalam merekrut dan menampilkan kader-kader tangguhannya, termasuk pada periode pemilihan umum 2004.

Sementara itu partai Golkar sebagai kekuatan politik yang tidak lagi mendapat dukungan pemerintah ternyata mengalami kesulitan untuk memperoleh personil fungsionaris partai yang tangguh. Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum kedua bagi partai Golkar. Fungsionaris partai Golkar pada pemilihan umum ini, seperti pemilihan umum 1999, tidak lagi dijabat oleh para pegawai negeri maupun tokoh-tokoh formal masyarakat, bahkan pegawai negeri tidak diperbolehkan aktif dalam partai politik. Pada pemilihan umum masa Orde Baru, seperti lazimnya di masyarakat desa, bahwa pejabat fungsionaris Golkar ditetapkan dari unsur pegawai negeri atau perangkat desa. Dan telah dikemukakan di depan bahwa pengaruh baik pegawai negeri maupun perangkat desa cukup mampu mengimbangi pengaruh para pemuka agama dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum paling sulit bagi partai Golkar di Air Tiris. Sedangkan fungsionaris PDIP Air Tiris tidak pernah terbentuk, pendukung dan pemilih tanda gambar simbol PDIP sangat sedikit dan tidak muncul secara jelas.

Sebaliknya, pada kondisi yang lain, muncul satu partai politik Islam baru, yaitu PBR, menyusul 3 (tiga) partai baru terdahulu, yang memperoleh suara yang cukup

signifikan, yaitu PBB, PAN dan PK. Keempat partai ini merupakan partai yang mengedepankan isu-isu agama. Tiga partai, PBR, PBB dan PK merupakan partai dengan ideologi agama Islam, sementara PAN merupakan partai terbuka namun para fungsionaris partai ini dikenal didominasi oleh para aktivis organisasi kemasyarakatan agama Islam, seperti misalnya Muhammadiyah.

Kemampuan PBR dalam memperoleh kader-kader tangguh dan kemampuan meyakinkan pada masyarakat bahwa PBR adalah partai yang memperjuangkan Islam, partainya kyai kondang Zainuddin MZ, kyai sejuta ummat, PBR berhasil memperoleh simpati masyarakat. Pada pemilihan umum pertama yang diikuti, pemilihan umum 2004 yang diikuti, PBR berhasil memimpin perolehan suara dengan 41,00% disusul PPP pada peringkat kedua dengan 11,60%. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya peranan pegawai negeri dalam pemilihan umum berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum, sekaligus membuktikan bahwa masyarakat santri Air Tiris tidak berubah, memiliki kecenderungan kuat mengidentifikasi dirinya kepada partai-partai Islam.

Kegiatan fungsionaris partai, khususnya partai-partai politik Islam, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan, pada dasarnya tidak pernah berhenti, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan-keagamaan di kampung-kampung yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Air Tiris. Sedangkan kegiatan-kegiatan formal ditetapkan oleh fungsionaris partai di tingkat kecamatan dan atau kabupaten, misalnya mengkoordinir pertemuan rutin anggota, melaksanakan pelatihan kader dan lain-lain<sup>48</sup>. Namun kegiatan nyata dari fungsionaris kecamatan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PPP Kabupaten Kampar pada bulan November 2012.



maupun masyarakat terbawah hanya berlangsung intensif kira-kira dua bulan menjelang dimulainya kampanye, pada masa kampanye, dan pada saat pemilihan umum berlangsung. Kegiatan yang secara formal ditetapkan fungsionaris kecamatan/kabupaten di luar masa di atas hampir tidak pernah berlangsung.

Secara umum, dalam menghadapi setiap pemilihan umum partai politik ingin menampilkan citranya sebagai kekuatan politik yang dapat menarik simpati massa sehingga memperoleh dukungan luas. Salah satu upayanya yaitu menampilkan dan merekrut tokoh-tokoh yang berbobot, dikenal dan disegani masyarakat luas. Demikian pula partai-partai politik Islam di kabupaten Kampar, melalui fungsionarisnya, partai-partai politik Islam kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris menghadapi pemilihan umum 2004. Tidak dapat disangkal peran tokoh-tokoh seperti itu sangat signifikan di dalam mengumpulkan massa, sebagaimana dikatakan Masrul dt Domo simpatisan PBR Kampar<sup>49</sup>: “Para tokoh-tokoh agama dalam tablig akbarnya sangat besar peranannya di dalam mengumpulkan massa, termasuk juga kalangan artis yang sekaligus ustadz, seperti H. Rhoma Irama”.

Rekayasa politik sejak menjelang pemilihan umum 1971 melalui serangkaian kebijaksanaan seperti deparpolisasi dan depolitisasi, mengakibatkan kesulitan bagi partai politik untuk menampilkan figur-figur yang berkualitas dan berkemampuan untuk menarik massa, lebih-lebih di tingkat masyarakat desa/kelurahan. Selain itu, pemerintah melalui pejabat desa/kelurahan, Lurah dan perangkat lainnya, dan pegawai negeri dibantu aparat keamanan (komando rayon militer dan kepolisian sektor)

---

<sup>49</sup>Wawancara pada bulan Oktober 2012.

melakukan tekanan pada masyarakat umumnya sehingga mematikan keberanian masyarakat untuk menjadi kader-kader partai politik.

Kebijakan pemerintah seperti digambarkan di depan tidak cukup berpengaruh terhadap sikap masyarakat Air Tiris yang dengan semangat “luber” berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum, yang kemudian masyarakat santri Air Tiris menempatkan partai-partai politik Islam pada peringkat pertama berhadapan dengan partai-partai politik non Islam. Tanpa mengalami kesulitan yang berarti, para fungsionaris partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris berhasil mengokohkan barisan figur-figur berbobot pendukung partai-partai politik Islam yang terdiri dari para Imam Masjid, para pedagang kaya yang telah menunaikan ibadah haji dan para pengasuh pesantren dan pengajian, yang sejak lama telah mendominasi struktur sosial di masyarakat Air Tiris.

Ketika para pemuka masyarakat yang hampir seluruhnya adalah tokoh-tokoh agama mengibarkan bendera partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2004, dikoordinir dan dikonsolidasikan oleh para fungsionaris partai di kecamatan dan kelurahan, sebagian besar warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih secara serentak mencoblos lambang partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2004. Partai-partai politik Islam berhasil memenangkan suara terbanyak pada pemilihan umum 2004 tersebut, dengan memperoleh 80,30% suara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai-partai politik Islam, sebagai pengumpul suara terbanyak, di masyarakat Air Tiris ini dapat disebutkan, pertama, figur-figur pendukung partai-partai politik Islam semuanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang

teguh menjalankan syariat Islam. Kedua, adanya identitas partai yang melambangkan perjuangan Islam. Dan ketiga, identifikasi masyarakat kepada partai-partai Islam yang telah mengakar sejak lama.

Dari wawancara dengan tokoh masyarakat<sup>50</sup> diperoleh kejelasan bahwa faktor yang sangat menentukan keberhasilan partai-partai politik Islam dalam pemilihan umum, terutama pemilihan umum 2004, identitas partai-partai politik Islam yang berkarakter keislaman, partai yang tetap dipandang memihak dan memperjuangkan umat Islam, telah melekat kuat pada masyarakat Air Tiris. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama (*religion*) merupakan salah satu faktor penentu “*voting choices*” bagi seseorang untuk menentukan pilihannya terhadap partai tertentu dalam pemilihan umum<sup>51</sup>.

#### **4.2.2.5. Strategi Kampanye Partai-partai Politik Islam**

Pada dasarnya kampanye pemilihan umum yang diselenggarakan oleh partai politik dimaksudkan untuk menarik massa pemilih agar dapat memilih calon-calon yang diajukan oleh partai politik yang tertera pada Daftar Calon Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Bentuk kampanye yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan pemilihan umum, antara lain, rapat-rapat umum, pawai-pawai umum, keramaian umum, pesta umum, pertemuan umum, pidato kampanye melalui RRI, TVRI, serta media massa lainnya, segala macam bentuk pertunjukan umum, penyebaran, penempelan di tempat-tempat umum berupa

---

<sup>50</sup>Wawancara pada tanggal 24 November 2012

<sup>51</sup>Paul Allen Beck, “Choice Context, and Consequence: Beaten and Unbeaten Paths Toward a Science of Electoral Behavior”, dalam Herbert F. Weisberg (ed.), *Political Science: The Science of Politics* (New York: Agathon Press, Inc., 1986), hlm. 244.

poster, plakat, radio kaset, brosur, tulisan-tulisan, dan lain-lain.

Kampanye pemilihan umum merupakan kegiatan yang paling menarik karena melibatkan warga negara secara luas. Dari kampanye pemilihan umum ini akan dapat dilihat dan diamati perilaku para pemilih. Kampanye pemilihan umum 2004 di masyarakat Air Tiris memperlihatkan beberapa kekuatan utama, yaitu partai-partai politik Islam PBR, PPP, PAN, PBB, PKS dan, partai-partai politik non Islam Golkar dan PDIP. Pada pemilihan umum 2004 ini, PDIP memperoleh suara yang sangat sedikit, dengan hampir tanpa kegiatan kampanye.

Partai-partai politik Islam dalam kampanyenya senantiasa menampilkan tema-tema keislaman dan pembangunan karena basis partai ini adalah umat Islam, kaum santri. Di samping itu partai ini menyatakan dirinya sebagai partainya umat Islam, partai yang sesungguhnya dan secara tegas menyalurkan aspirasi umat Islam. Strategi kampanye lainnya yang digunakan partai-partai politik Islam adalah membawa serta beberapa tokoh atau pemuka agama untuk ikut serta dalam kegiatan menghadiri kampanye, baik berbentuk pawai kendaraan bermotor maupun semata-mata menghadiri rapat-rapat umum di luar wilayah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa peranan para pemuka agama memberikan andil besar bagi partai-partai politik Islam dalam mendulang suara pada pemilihan umum 2004.

Sementara itu partai Golkar, dalam kampanye pemilihan umum 2004 berusaha keras untuk setidaknya mengembalikan perolehan suara pada pemilihan umum 1997. Untuk yang kedua tanpa penglibatan birokrasi, pejabat dan TNI POLRI, partai Golkar menarget kemenangan seperti pada pemilihan

umum 1997. Perolehan suara partai Golkar pada pemilihan umum 2004 di Air Tiris ini mengecewakan, hanya memperoleh 10,90%, dan berada pada peringkat ketiga setelah PBR dan PPP. Seperti di wilayah lain, partai Golkar di masyarakat Air Tiris tidak lagi bisa menampilkan tokoh-tokoh pejabat dan pegawai negeri. Lurah dan perangkatnya bersama-sama pegawai negeri yang berdomisili di Air Tiris tidak lagi bisa melakukan kampanye mendukung partai Golkar. Strategi partai Golkar dalam melakukan kampanye pemilihan umum 2004 ini berusaha memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa kemenangan partai Golkar akan menjamin kesinambungan pembangunan. Pembangunan yang selama ini dilakukan adalah berkat kemenangan Golkar. Lurah dan perangkatnya, yang semula berusaha mendudukkan orang-orang yang dipandang sebagai pendukung Golkar untuk menduduki ketua-ketua RW dan RT di kampung masing-masing guna memudahkan penyampaian pesan-pesan keberhasilan pembangunan yang diklaim oleh Golkar, pada pemilihan umum 2004 ini tidak bisa lagi dilakukan.

Secara formal, kampanye pemilihan umum merupakan kesempatan bagi OPP untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan para pendukung dan simpatisan sedemikian rupa sehingga masyarakat luas dapat tertarik untuk ikut mendukung mereka. Tetapi secara tidak langsung, setiap OPP sebenarnya telah melakukan kampanyenya secara tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu kampanye pemilihan umum secara formal diartikan sebagai kegiatan OPP untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum, menjadi kehilangan makna sesungguhnya, karena pada dasarnya sikap para pemilih telah mereka tentukan jauh sebelumnya. Namun demikian, juga tidak dapat

disangkal bahwa dengan kegiatan kampanye pemilihan umum, bukan tidak mungkin pilihan yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dapat berubah.

Kampanye pemilihan umum 2004 yang hanya berlangsung sekitar dua bulan tersebut, di masyarakat Air Tiris, sebenarnya hanyalah berfungsi sebagai pemantab kepada masyarakat pemilih. Baik partai-partai politik Islam, partai Golkar maupun partai-partai lainnya, secara tidak langsung telah melaksanakan kampanye sejak jauh sebelum masa kampanye formal diumumkan dan diberlakukan, dengan berbagai cara mereka masing-masing.

Upaya yang dilakukan Golkar dalam kampanye adalah mengadakan rapat umum, pawai umum, pemancangan poster-poster dan spanduk-spanduk, serta penempelan dan pemasangan tanda gambar dalam ukuran besar dan kecil. Usaha Golkar tersebut tidak sanggup mengalihkan massa pendukung dan pemilih partai-partai Islam pada pemilihan umum 2004 di masyarakat Air Tiris. Arus hantaman *bulldozer* dan berbagai bentuk kebijakan intimidatif pada masa lalu tidak lagi mempan bagi masyarakat Air Tiris. Pada pemilihan umum 2004, di mana upaya partai Golkar masih menggunakan issue-issue lama, di masyarakat Air Tiris hanya memperoleh 10,90% suara dari seluruh suara yang sah, sebuah kekalahan yang telah diperkirakan.

Telah diutarakan bahwa PDIP selama masa kampanye 2004 di masyarakat Air Tiris hampir tidak menampakkan aktifitasnya yang menonjol. Partai ini selain tidak memiliki basis massa yang dapat diandalkan juga sangat terbatas pengaruhnya, sehingga selama masa kampanye pemilihan umum 2004 tidak sanggup menyelenggarakan rapat umum maupun pawai umum.

Aktifitas kampanyenya terbatas pada penempelan tanda-tanda gambar yang jumlah dan penyebarannya sangat sedikit berbanding dengan partai-partai politik Islam, PBR, PAN, PPP, PKS dan partai Golkar.

Seperti telah diketahui bahwa partai-partai politik Islam telah menggalang massa pendukungnya sejak jauh sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Bahkan dapat dikatakan telah melaksanakan kampanye tidak langsung secara rutin lewat lembaga-lembaga informal yang relative otonom di seluruh wilayah masyarakat Air Tiris.

Telah disebutkan di depan bahwa kegiatan kemasyarakatan di masyarakat Air Tiris didominasi oleh kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian yang lebih dikenal dengan nama "Wirid Yasin" pengajian kampung, dan pengajian memperingati hari-hari bersejarah dalam agama Islam, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad, dan sebagainya. Kelompok-kelompok pengajian atau wirid majelis taklim ini dipimpin oleh para imam masjid atau musholla dan didukung oleh para pedagang yang relatif kaya. Dalam acara-acara pengajian/wirid tersebut di samping berupa amalan-amalan, juga diisi dengan ceramah agama dan kemasyarakatan yang menekankan diamalkannya nilai-nilai ajaran Islam, serta membicarakan masalah-masalah aktual kemasyarakatan yang muncul.

Dengan demikian dapat terjadi hubungan yang akrab dan dekat di antara anggota masyarakat, lebih khusus lagi hubungan antara pemimpin dan massa. Kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung dari generasi ke generasi inilah, terutama, yang mampu membentuk masyarakat santri di masyarakat Air Tiris. Disamping itu, kegiatan ini pula yang secara berhasil telah mempertahankan dan melestarikan identitas masyarakat

terhadap partai-partai politik Islam sampai pada pemilihan umum 2004.

Keakraban hubungan antara para pemimpin dengan masyarakat lingkungannya juga didukung oleh pola hubungan saling ketergantungan yang bersifat ekonomis. Sebagian besar para pemimpin informal di masyarakat Air Tiris, di samping di pandang cukup memahami agama Islam dan menyandang gelar haji, mereka adalah pedagang-pedagang karet yang tangguh. Operasi mereka menyebar sampai di luar wilayah kecamatan Kampar, bahkan sampai di daerah Pekanbaru, Bukittinggi, dan Padang. Mereka masing-masing memiliki pekerja atau buruh sebanyak sepuluh sampai dengan dua puluh orang sebagai kepala keluarga. Kondisi hubungan seperti ini akan memperkuat pola hubungan “Bapak–Anak Buah“ atau “*patron-client*” yang memang merupakan pola kultur hubungan antara elite dan massa dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, ketika para tokoh informal ini memperlihatkan diri mereka mencerminkan dukungan terhadap partai-partai politik Islam, para pekerja serta seluruh anggota keluarganya dan teman-temannya mengikutinya.

Adapun bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2004 di masyarakat Air Tiris berupa rapat umum, pawai umum, pemasangan poster-poster dan spanduk-spanduk, penempelan tanda gambar dan lain-lain. Rapat umum dalam pengertian bahwa massa partai-partai politik Islam Air Tiris menghadiri rapat umum di wilayah masyarakat Air Tiris yang diselenggarakan oleh partai-partai politik Islam kabupaten Kampar, pawai umum dalam pengertian bahwa massa partai-partai politik Islam Air Tiris menghadiri



kampanye di tempat tertentu di luar wilayah Air Tiris dengan terlebih dahulu berputar-putar di wilayah Air Tiris.

Dengan menampilkan dirinya sebagai partai yang *istiqomah* penyalur aspirasi umat Islam, partai-partai politik Islam ini dihadapkan pada berbagai intimidasi dan ancaman serta isu-isu terorisme yang dikaitkan dengan partai Islam. Namun, identifikasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai Islam telah demikian kuat, dan memperoleh perlindungan dari para tokoh informal, intimidasi dan isu-isu terorisme tersebut tidak sampai menggoyahkan sikap dan pendirian masyarakat Air Tiris pada umumnya. Pemilihan umum 2004 partai-partai politik Islam Air Tiris memperoleh suara 80,30% dan keluar sebagai pemenang berhadapan dengan partai-partai politik non Islam.

Dengan kegiatan-kegiatan yang diuraikan di depan, keutuhan masyarakat Air Tiris yang telah mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai politik Islam sejak lama, sesungguhnya telah tetap terjaga. Bahkan dalam kampanye pemilihan umum 2004, partai-partai politik Islam adalah partai-partai politik yang berpenampilan tegar, setelah muncul kembali dari “persembunyian” dan dengan terbuka menonjolkan karakter keislaman mereka. Ketegaran partai-partai politik ini selain didukung oleh mayoritas umat Islam yang seratus persen sebagai kaum santri, juga didukung oleh kelompok elite informal yang memiliki pengaruh lebih luas dibanding para pemimpin formal, dan identitasnya yang khas Islam dengan lambang tanda gambar Ka’bah dan lain-lain. Simbol Ka’bah, misalnya, yang menjadi tujuan ibadah haji bagi setiap muslim, sebagai lambang partai pada pemilihan umum 2004 sebenarnya telah merupakan bentuk kampanye tersendiri sehingga umat Islam, kaum santri,

lebih tertarik untuk menjatuhkan pilihan kepadanya. Dengan uraian ini, kampanye partai-partai politik Islam dapat dikatakan hanya sebagai aktifitas untuk memelihara dan mempertahankan modal dukungan yang telah dimilikinya.

#### **4.2.2.6. Hasil Penghitungan Suara**

Pada pemilihan umum 2004, warga masyarakat Air Tiris yang tercatat sebagai pemilih menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Dari 24 partai peserta pemilihan umum, hanya 7 partai yang memperoleh suara, yaitu PBR, PPP, partai Golkar, PAN, PKS, PBB dan PDIP. Berturut-turut perolehan suaranya adalah, 41%, 11,6%, 10,9%, 9,7%, 9,3%, 8,7% dan 3,0%.

Kenyataan tersebut menunjukkan betapa tetap kokohnya pemilih partai-partai politik Islam. Mulai pemilihan umum 1999, partai-partai politik Islam memperlihatkan fenomena sebagai partai-partai idola masyarakat Air Tiris. Orientasi politik masyarakat terhadap partai-partai politik Islam di Air Tiris sejak pemilihan umum reformasi menunjukkan kekokohnya. Hasil pemilihan umum 2004 menunjukkan keistiqomahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam, walaupun terjadi sedikit penurunan dibanding dengan perolehan suara pada pemilihan umum 1999. Secara bersama-sama partai-partai politik Islam memperoleh 80,30% suara, berhadapan dengan partai-partai politik non Islam.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PBR kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris, Oktober 2012.

#### **4.2.3. Faktor Pengaruh Orientasi politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 2009**

Dinamika politik dalam proses menuju pemilihan umum 2009 perlu menjadi catatan. Dinamika itu terutama terkait dengan KPU dan partai politik. Adapun beberapa dinamika itu adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya delegitimisasi pemilihan umum<sup>53</sup>. Delegitimisasi ini muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan otomatisasi partai-partai yang tidak lolos *electoral threshold (ET)* tetapi mendapatkan kursi di DPR untuk menjadi peserta pemilihan umum 2009. Terdapat sembilan partai yang masuk dalam kategori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPD, PPK, PP, PS, PBR, dan PBB. Terhadap partai-partai tersebut, KPU seharusnya melakukan verifikasi keabsahan keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Bukannya melakukan verifikasi, KPU justru mengikutsertakan partai-partai peserta pemilihan umum 2004 yang tidak mendapatkan kursi DPR menjadi peserta pemilihan umum 2009, yaitu partai Merdeka, PNU, PSI, dan partai Buruh. Dengan demikian, dalam pemilihan umum 2009 terdapat 'peserta selundupan', dan itu menjadikan pemilihan umum mengalami delegitimisasi karena diikuti oleh partai yang tidak melalui proses verifikasi padahal waktu untuk melakukan hal itu masih tersedia. Prinsip *fairness* telah ditabrak oleh KPU.

Kedua, pada pemilihan umum kali ini penentuan calon terpilih dari partai politik yang mendapatkan kursi di DPR berdasarkan sistem suara terbanyak, tidak lagi sistem nomor urut bersyarat seperti pada pemilihan umum sebelumnya. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak tanpa melihat nomor urut dalam daftar pencalonan

---

<sup>53</sup>Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Memilih dan Kepartaian* (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010), hlm. 31-34.

ditetapkan menjadi calon jadi. Penggunaan sistem suara terbanyak ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-IV/2008 yang membatalkan ketentuan pasal 214 huruf a sampai e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat.

Sebelum putusan MK tersebut keluar, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 penentuan calon jadi didasarkan pada nomor urut bersyarat kecuali yang bersangkutan memperoleh suara 100% BPP. Apabila seorang calon mendapatkan 100% BPP maka secara langsung ditetapkan menjadi calon jadi. Apabila suara calon tidak mencapai 100% BPP maka seorang calon sekurang- kurangnya harus memperoleh suara 30% dari BPP untuk dapat ditetapkan menjadi calon terpilih. Apabila tidak ada calon yang suaranya mencapai 30% BPP maka ditetapkan berdasarkan nomor urut murni.

Ketiga, menjamurnya calon anggota legislatif dari kalangan artis dan kerabat elit politik. Dalam rangka meraih suara sebanyak-banyaknya, banyak partai yang memunculkan artis dalam daftar calon anggota legislatif. Dengan modal popularitas yang mereka miliki, para artis itu dianggap mampu menarik suara pemilih. Artis dan selebriti tersebut tersebar di berbagai partai politik<sup>54</sup>.

Selain itu, partai politik juga menempatkan calon-calon yang memiliki hubungan darah dengan elit politik yang saat ini sedang berkuasa di pemerintahan maupun partai. Puan Maharani anak dari Megawati, Muntaz Rais anak dari Amien Rais, Dave Laksono anak dari Agung Laksono, dan Edi Baskoro anak dari Presiden Susilo

---

<sup>54</sup>F. Hariyanto Santoso, et.all. *Wajah DPR dan DPD 2009-2014: Latar Belakang Pendidikan dan Karier* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. Xi.

Bambang Yudhoyono adalah beberapa yang dapat disebut. Meskipun berusaha ditepis, hubungan darah sebagai faktor penting dalam pencalonan mereka rasanya sulit untuk dinegasikan. Tercatat, menurut Santoso<sup>55</sup> bahwa mereka yang terpilih dan memiliki hubungan kekerabatan, seperti suami-istri, ayah-anak, paman-keponakan, sebanyak 24 (dua puluh empat orang) orang.

Munculnya calon anggota legislatif tersebut memunculkan banyak kritik. Bagi para artis, mereka dianggap tidak memiliki cukup kapabilitas untuk dapat memainkan peran-peran politik mewakili aspirasi kepentingan rakyat. Sedangkan calon yang muncul dari 'unsur kekerabatan' dikritik karena berusaha membangkitkan dinasti politik yang berbahaya bagi masa depan partai dan sistem politik yang sehat. Pencalonan itu secara tidak langsung menyangkal bekerjanya demokrasi yang menempatkan seleksi kandidat adalah bersifat kompetisi dan terbuka, bukan tertutup dan pewarisan.

Keempat, diperlakukannya *parliamentary threshold* (PT) 2,5%. Partai-partai yang keseluruhan perolehan suaranya tidak mencapai angka tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi parlemen. Hanya partai dengan perolehan suara mampu mencapai syarat PT yang diikutsertakan dalam penghitungan suara, dan yang tidak mencapai PT suaranya hangus. Pada titik ini hanya 9 (sembilan) partai politik yang suaranya mencapai PT.

Kelima, keikutsertaan partai lokal dalam pemilihan umum legislatif di tingkat lokal. Keikutsertaan partai lokal ini hanya terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Terdapat 6 (enam) partai lokal yang ikut dalam

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. Xxxvii.

pemilihan umum, yaitu Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIRA). Dalam daftar nomor urut partai di kertas suara, partai lokal tersebut masing-masing secara berurutan menempati nomor urut 35, 36, 37, 38, 39, dan 40.

Pada tingkat nasional, partai politik yang ikut pemilihan umum 2009 berjumlah 38 partai politik. Dari jumlah tersebut, secara kategoris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, partai-partai yang lolos *electoral threshold* sebesar 2% kursi DPR dalam pemilihan umum sebelumnya. Pada kategori ini, terdapat 7 partai yang lolos *electoral threshold* yaitu partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PD dan PKS.

Kedua, partai-partai baru berdiri dan lolos berdasarkan syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum itu meliputi: (a) memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi, dan memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (b) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada tiap kepengurusan partai politik, (c) sebagai bagian dari *affirmative action* gerakan perempuan, partai politik juga harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, (d) partai harus mempunyai kantor tetap untuk setiap level kepengurusan serta mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU. Masuk dalam kategori ini terdapat 27 partai.

Ketiga, kelompok partai yang pada pemilihan umum 2004, mendapatkan kursi di DPR tetapi perolehan kursinya tidak mencapai *electoral threshold* 2%. Terdapat 10 partai

yang masuk dalam kategori ini. Terakhir, kelompok partai dari peserta pemilihan umum 2004 yang tidak lolos *electoral threshold* dan tidak mendapatkan kursi di DPR. Terdapat 4 partai dalam kategori ini, yaitu Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh. Kelompok partai ini dapat menjadi peserta pemilihan umum 2009 karena gugatan mereka atas ketidakadilan dari pasal 316 huruf d dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Atas putusan MK tersebut, KPU tanpa melakukan verifikasi keabsahan syarat-syarat ikut serta dalam pemilihan umum 2009 mengesahkan mereka menjadi peserta pemilihan umum 2009.

Seperti disebutkan di atas, pemilihan umum legislatif akhirnya digelar dengan peserta 38 partai politik di tingkat nasional, dan khusus di Aceh terdapat 6 peserta partai lokal.

Tabel 4.9.  
Perolehan Suara dan Kursi Partai dalam Pemilihan Umum 2009

No.	Partai	Suara		Kursi DPR	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	PD	21.655.295	20,81	150	26,79
2	PG	15.031.497	14,45	107	19,11
3	PDIP	14.576.388	14,01	95	16,96
4	PKS	8.204.946	7,89	57	10,18
5	PPP	5.544.332	5,33	37	6,61
6	PAN	6.273.462	6,03	43	7,68
7	PKB	5.146.302	4,95	27	4,82
8	Gerindra	4.642.795	4,46	26	4,64
9	Hanura	3.925.620	3,77	18	3,21
10	PKPB	1.461.375	1,4	-	-
11	PPPI	745.965	0,72	-	-

12	PPRN	1.260.950	1,21	-	-
13	Barnas	760.712	0,73	-	-
14	PKPI	936.133	0,9	-	-
15	PPIB	198.803	0,19	-	-
16	Partai Kedaulatan	438.030	0,42	-	-
17	PPD	553.299	0,53	-	-
18	PPIB	415.563	0,4	-	-
19	PNI Marhaenisme	317.433	0,31	-	-
20	PDP	896.959	0,86	-	-
21	PKP	351.571	0,34	-	-
22	PMB	415.294	0,4	-	-
23	PPDI	139.988	0,13	-	-
24	PDK	671.356	0,65	-	-
25	Partai RepublikaN	631.814	0,61	-	-
26	Partai Pelopor	345.092	0,33	-	-
27	PDS	1.522.032	1,46	-	-
28	PNBKI	468.856	0,65	-	-
29	PBB	1.864.642	1,79	-	-
30	PBR	1.264.150	1,21	-	-
31	Partai Patriot	547.798	0,53	-	-
32	PKDI	325.771	0,31	-	-
33	PIS	321.019	0,31	-	-
34	PKNU	1.527.509	1,47	-	-
35	Partai Merdeka	111.609	0,11	-	-
36	PPNUI	146.431	0,14	-	-
37	PSI	141.558	0,14	-	-
38	PB	265.369	0,26	-	-
	Total Suara	104.048.118	100	-	-

Sumber : KPUD Provinsi Riau



Hasil pemilihan umum 2009 menghasilkan 9 (sembilan) partai yang lolos PT, yaitu PD, PG, PDIP, PPP, PKS, PAN, PKB, Gerindra dan Hanura. Kesembilan partai itu menjadi partai yang mendapatkan kursi di DPR. Dari sembilan partai tersebut, dua partai adalah pendatang baru dalam konstelasi politik nasional, yaitu Gerindra dan Hanura. Kedua partai tersebut adalah partai baru yang didirikan menjelang pemilihan umum 2009. Artinya pengalaman 3 (tiga) kali masa pemilihan umum senantiasa menghadirkan dua partai dengan kekuatan cukup signifikan. Pada pemilihan umum 1999 menghasilkan PAN dan PKB; pemilihan umum 2004 menghasilkan PD dan PKS; dan pemilihan umum 2009 menghasilkan Hanura dan Gerindra. Selain itu, jika berkaca pada hasil pemilihan umum 2004 yang menghasilkan 17 (tujuh belas) partai peraih kursi di DPR, berarti terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang tidak mendapatkan kursi kembali di DPR sebagai akibat pemberlakuan PT, yaitu PNI Marhaenisme, PBB, PDK, PNKB, PKPI, PPD, PKPB, PBR, PDS, dan Partai Pelopor.

Melihat konstelasi kesembilan partai yang memperoleh kursi DPR, tidak satupun partai yang bernuansa atau berafiliasi dengan kekuatan politik Kristen atau Katholik. Artinya, kekuatan politik partai dari partai berbasis agama katolik dan protestan menghilang dari kancah politik nasional. Kemana aspirasi politik kekuatan politik yang mempresentasikan politik kedua agama tersebut kedepan menjadi satu persoalan menarik. Apakah akan berusaha menghidupkan kembali partainya, bergabung dengan partai lain atau melakukan diaspora ke banyak partai.

Dan hasil pemilihan umum 2009, melonjaknya perolehan suara PD mencapai 300 % menjadi gemp

politik kepartaian. Partai yang belum genap satu dekade ini tidak hanya mampu meningkatkan perolehan suara partai tetapi sekaligus mengalahkan partai-partai besar yang selama ini mendominasi politik kepartaian pasca reformasi. Suara PG dan PDIP turun drastik dan berada di bawah perolehan suara PD. Program-program populis pemerintahan seperti BLT dan PNPM, dan kharisma SBY serta lemahnya kinerja partai-partai lain menjadi faktor penting yang meningkatkan perolehan suara PD.

Harapan akan kembalinya sejumlah suara PPP yang hilang pada pemilihan umum 2004 tertumpu pada pemilihan umum 2009. Pemilihan umum 2009 merupakan pemilihan umum ketiga pada era reformasi pasca tumbanganya Orde Baru, dan juga pemilihan umum ketiga bagi PPP setelah PPP kembali berazaskan Islam dan menggunakan lambang Ka'bah sebagai tanda gambar partai. Pengalaman pahit pada pemilihan umum 2004, di mana PPP mengalami penurunan drastic perolehan suara, nampaknya akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi PPP untuk kemudian bangkit kembali berjuang meraih suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan umum 2009. Menjelang Pemilihan umum 2009, PPP telah melakukan konsolidasi, diantaranya melalui muktamarnya yang ke-VI pada tahun 2007.

Muktamar PPP ke-VI tahun 2007 menghasilkan diantaranya, digantikannya DR. H. Hamzah Haz dengan Drs. H. Suryadharna Ali, M.Si sebagai ketua umum, kedua, makin ditegaskannya PPP sebagai partai Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP yang dihasilkan melalui muktamar ini, bahwa kalimat-kalimat yang mencerminkan keislaman ditegaskan dan nyata. Misalnya, kalimat "*Bissmillaahirrohmaanirrohiim*"

lebih nyata penggunaannya, kalimat SWT dipakai dan ditegaskan kembali setelah sempat diganti dengan kalimat “Yang Maha Kuasa”, dan kalimat “diridhoi oleh Allah SWT” terlihat nyata sebagai simbol-simbol warna keislaman<sup>56</sup>.

Dalam praktek kampanye di lapangan, para juru kampanye PPP tetap dan lebih tegas menggunakan isu-isu agama sebagai sarana menjaring massa, dengan menegaskan bahwa PPP adalah partai Islam, fusi dari empat partai Islam. Dalam kaitannya dengan isu “pembangunan”, PPP menegaskan bahwa PPP berkomitmen besar dan mengambil posisi paling depan dalam upaya percepatan pembangunan bangsa.

Sementara itu di Air Tiris, partai-partai politik yang memperoleh suara pada pemilihan umum 2009 terdiri dari PBR, PPP, PAN, PBB, PKS yang merupakan kelompok partai-partai politik Islam. Sedangkan kelompok partai-partai non Islam terdiri dari partai Golkar, PD dan PDIP. Pemilihan umum 2009 Partai Golkar menjadi pemenang dengan meraih 46,22 % suara. PPP mengalami penurunan yang cukup tajam dan hanya meraih 4,70% suara. PDIP bersama partai lainnya hanya memperoleh 5,70% suara. PBR mengalami kemerosotan dengan hanya memperoleh 20,3% suara. PBB dan PKS mengalami penurunan dan masing-masing memperoleh suara 6,3% dan 7,41%. PD yang pada pemilihan umum sebelumnya tidak memperoleh simpati masyarakat, pada pemilihan umum 2009 ini memperoleh suara yang cukup besar yaitu 11,36%. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam yang terdiri dari PBR, PAN, PPP, PKS dan PBB memperoleh 46,72% suara dan partai non Islam yang terdiri dari Partai Golkar, PD dan PDIP memperoleh 63,28 % suara.

---

<sup>56</sup>Lihat dan bandingkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP tahun 1984 dan tahun 1989.

#### **4.2.3.1. Kepemimpinan**

Partai politik dan kepemimpinan seperti dua sisi mata uang, partai politik berproses untuk dapat berkuasa, dan dengan demikian memimpin proses pengambilan kebijakan. Hal ini mengharuskan partai politik mempersiapkan calon pemimpin yang diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan. Dalam proses internal inilah, salah satu fungsi partai politik urgen dibahas, yakni pengkaderan. Proses pematangan kader untuk memimpin, baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional, itulah yang perlu mendapat sorotan khususnya mengenai partai-partai politik.

Kepemimpinan adalah suatu perilaku dari seorang individu dalam memimpin aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas suatu kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan.

Kepemimpinan yang berkualitas merupakan persyaratan utama bagi keberhasilan dan tercapainya tujuan bagi organisasi. Efektivitas kepemimpinan merupakan pengaruh dominan terhadap efektivitas organisasi. Kepemimpinan melekat pada seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinya.

Dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Air Tiris, kualitas seorang pemimpin mengarah pada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pertama, tak ada pemimpin di antara masyarakat Islam kecuali yang beriman, kedua tak ada pemimpin yang mempermalukan Islam. Ketiga, pemimpin harus memiliki kemahiran di bidangnya. Pemimpin partai yang tidak memahami dan

mahir dalam organisasi kepartaian akan gagal membawa partai mencapai tujuannya.

Keempat, pemimpin harus dapat diterima masyarakat, mencintai dan dicintai masyarakat, mendoakan dan didoakan masyarakat. Dan kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan masyarakat, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitnah.

Beberapa karakter yang harus dimiliki di dalam kepemimpinan adalah: pertama, *shiddiq* (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika perampokan, pencurian, pemerasan, perampasan sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tindak penyimpangan dan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga para pemimpin yang melakukan kecurangan tersebut pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat.

Kedua, *amanah* (tanggung jawab). Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya tersebut. Ketiga, tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Keempat, menepati janji. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu menepati janjinya. Janji yang tidak ditepati oleh pemimpin akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekacauan. Kelima

murah hati. Dalam kepemimpinannya seorang pemimpin mesti memiliki sifat bermurah hati, ramah tamah, sopan santun, suka senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab

Pada dasarnya kepemimpinan dalam masyarakat Air Tiris cukup memiliki karakter. Efektifitas kepemimpinan di Air Tiris di samping dukungan pola *patron-client*, pemimpin berkarakter membawa kepada struktur kepemimpinan di mana masyarakat menunjukkan loyalitasnya. Walaupun fungsionaris partai-partai politik Islam tidak memiliki hubungan struktural dengan para tokoh masyarakat, dalam hal penentuan pilihan pada pemilihan umum tergantung bagaimana fungsionaris partai-partai politik Islam memiliki kemampuan untuk merekrut para tokoh masyarakat tersebut. Pada pemilihan umum 2009, munculnya partai politik baru dan mulai bangkitnya kembali partai Golkar mengakibatkan munculnya para tokoh yang kemudian diikuti oleh masyarakat meninggalkan partai-partai politik Islam. Perolehan suara partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 2009 mengalami penurunan.

#### **4.2.3.2. Karakter**

Pada pemilihan umum 2009, partai-partai politik Islam mantap berazas dan berkarakter Islam. Penegasan kembali pada azas dan karakter Islam ini sudah mulai terjadi pada pemilihan umum 1999, pemilihan umum pertama era reformasi. Pada dasarnya partai-partai politik Islam tidak pernah mencoba menyesuaikan diri dengan tidak lagi berazas Islam. Azas Pancasila partai-partai politik Islam sebagai satu-satunya azas, pada tahun 1985-1997 adalah suatu keterpaksaan yang dipaksa. Mengingkari Islam sebagai azas dan karakter sama artinya dengan

mengingkari jati diri dan sikap politik partai-partai politik Islam itu sendiri. Partai-partai politik Islam tidak kehilangan ruhanya, tidak kehilangan semangatnya walaupun disebutkan oleh sementara orang bahwa “Islam tidak menarik”, “Islam tidak populer”. Sebenarnya kedudukan Islam dalam partai-partai politik Islam adalah sebagai ruh, spirit, semangat, mengideologi, dan sebagai motivator dalam perjuangan.

Partai-partai politik Islam telah berusaha mengimplementasikan azas dan karakter Islam dalam kehidupan nyata. Sudah barang tentu yang diperjuangkan partai-partai politik Islam bukan sekadar meraih kekuasaan saja, tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai partai politik dapat dikatakan bahwa partai-partai politik Islam adalah wadah perjuangan umat Islam.

Dalam konteks implementasi Islam sebagai azas dan karakter, partai-partai politik Islam mengidentifikasi Islam sebagai rahmat seluruh alam, yaitu bahwa Islam memenuhi semua aspek kehidupan; ekonomi, budaya, politik, hukum, lingkungan hidup, dan sebagainya. Islam yang mengimplementasikan semua kehidupan. Inklusif. Bukan Islam yang dilihat sebagai terorisme, radikalisme, atau gerakan sempalan, ajaran yang tidak benar. Dan terimplementasi dalam tingkah laku dan perbuatan yang Islami.

Dalam berpolitik tidak boleh keluar dari ukuran seperti itu. Tidak boleh bergeser dari platform. Kelemahan yang sering menjadi bumerang bagi partai-partai politik Islam adalah perilaku anggota, kader, pengurus yang tidak Islami. Hal ini berkontribusi negatif terhadap partai-partai politik Islam, yang bisa menyebabkan orang tidak simpati

kepada partai-partai politik Islam. Perpecahan internal, politik transaksional, sekularisme, pragmatisme, politik uang, bisa menggerogoti partai-partai politik Islam, mengerdilkan partai-partai politik Islam. Konsistensi dan konsolidasi moral dan tetap pada koridor Islam, yang sesungguhnya akan mampu membesarkan partai-partai politik Islam.

Partai-partai politik Islam menghadapi pemilihan umum tahun 2009 di masyarakat Air Tiris telah mulai kehilangan kader-kader tradisionalnya. Mereka mulai hijrah ke partai-partai lain. Sementara fungsionaris yang menggantikannya lebih berorientasi pada transaksional dan pragmatis. Sikap dan kondisi ini kemudian memicu persaingan dan konflik antar mereka. Kondisi demikian itulah yang lebih mendorong pada turunnya simpati masyarakat terhadap partai-partai politik Islam yang berakibat pada merosotnya perolehan suara partai-partai politik Islam, penurunan yang cukup besar mencapai hampir 50% dan mulai mengalami kekalahan.

Azas maupun karakter Islam saja tidak cukup bagi partai-partai politik Islam untuk meraih suara. Islam, sebagai azas tak pernah dipermasalahkan masyarakat, Islam tetap merupakan agama yang dijunjung tinggi. Namun yang lebih esensial adalah bagaimana para kader, fungsionaris dan pengurus partai-partai politik Islam berperilaku. Kemampuan mereka dalam mengimplementasikan keIslaman dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan berpartailah yang memberikan kontribusi sesungguhnya terhadap perolehan suara partai-partai politik Islam. Konflik dan perpecahan yang melanda elit partai-partai politik Islam sendiri yang membuat masyarakat meragukan partai-partai politik Islam dan beralih ke partai politik non Islam. Seorang warga



masyarakat Air Tiris menyampaikan : “Bagaimana kami akan memilih partai yang para pengurusnya tidak kompak, berpecah-belah antara mereka, dan lupa akan ajaran Islam.”<sup>57</sup>

#### **4.2.3.3. Lambang**

Pada pemilihan umum 2009, lambang partai-partai politik Islam adalah Ka’bah, dan lambang-lambang lain yang merupakan simbol-simbol keislaman. Pada dasarnya partai-partai politik Islam di Air Tiris sangat percaya diri menggunakan lambang-lambang keislaman. Tidak dipungkiri bahwa Ka’bah sebagai lambang partai memiliki daya pikat yang besar. Masyarakat Islam pada umumnya sangat mendambakan beribadah di Masjidil Haram di mana Ka’bah berada. Partai politik berlambang Ka’bah sudah barang tentu memiliki kewibawaan tertentu. Hal ini juga dapat membuat orang tanpa pikir panjang menjatuhkan pilihannya pada partai berlambang Ka’bah ini. Dan kondisi ini dinikmati partai-partai politik Islam di Air Tiris.

Perubahan sistem pemilihan umum yang mulai terasa, terutama, pada pemilihan umum 2009 ini mengakibatkan terbukanya pertimbangan memilih lain. Hasil pemilihan umum 2009 di masyarakat Air Tiris menunjukkan bahwa posisi partai-partai politik Islam, mengalami penurunan yang cukup drastis. Fenomena ini bisa dikatakan bahwa sikap umat Islam telah mulai mengabaikan keberadaan partai-partai politik Islam, partai yang berlambang simbol-simbol keislaman, termasuk Ka’bah, yang dianggap tidak memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Sepertinya, pengaruh modernisasi, perubahan ekonomi, kemajuan

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan seorang warga Air Tiris, pada tanggal 16 Oktober 2012.

pendidikan, urbanisasi, budaya luar dan sejumlah faktor lain yang terus meningkat telah mengubah pertimbangan memilih umat Islam, masyarakat santri Air Tiris.

Dengan orientasi politik umat Islam lebih bersifat plural, sebagai pengaruh proses modernisasi masyarakat, sehingga identifikasi kepartaian tradisional umat Islam yang telah mengakar selama ini menjadi pudar, melemah. Tingkat loyalitas para partisan parpol Islam pun menurun. Karena itu, mengarahkan orientasi politik umat Islam ke dalam partai Islam menjadi tidak mudah. Mereka lebih banyak menyebar ke partai nasionalis; seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, yang mendasarkan *platform* dan program yang relevan dengan keseharian. Tingkat loyalitas para partisan parpol Islam telah semakin mengalami penurunan.

Walaupun demikian, kecenderungan lain masih bisa terjadi. Hubungan elit-massa yang lebih *patron-client* masih menempatkan elit pada posisi menentukan. Di Air Tiris, penurunan perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2009 lebih ditentukan oleh sikap elit yang kemudian meninggalkan partai-partai politik Islam dan diikuti oleh massa. Perubahan sikap massa pemilih lebih ditentukan oleh perubahan sikap elite. Lambang Ka'bah dan simbol-simbol keislaman yang lain ternyata tidak mampu mengikat emosi masyarakat untuk tetap mengidentifikasikan diri mereka pada partai-partai Islam. Seorang warga masyarakat mengatakan :

“Kami tidak ragu-ragu dengan keagungan Ka'bah, kebesaran Ka'bah, kemuliaan Ka'bah. Ka'bah sebagai kiblat shalat kami. Namun, ketika para ulama, ninik mamak,

tokoh masyarakat berpaling meninggalkan partai- kami mengikutinya”.<sup>58</sup>

Peluang untuk memperbaikinya bukannya tidak ada. Para pimpinan partai seyogyanya menyajikan kemungkinan lain bagi penilaian publik terhadap keberadaan mereka yang lebih berorientasi pada implementasi harapan-harapan masyarakat, tidak hanya sekadar pendekatan keagamaan. Merupakan tantangan berat bagi kader dan pimpinan partai-partai politik Islam, untuk menjadikan partai-partai politik Islam sebagai andalan untuk menampung keinginan masyarakat yang lebih nyata.

#### **4.2.3.4. Strategi Rekrutmen Partai-partai Politik Islam**

Strategi rekrutment partai-partai politik Islam di masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 2009 mengalami kemunduran. Dengan kader-kader yang tangguh diharapkan partai-partai politik Islam tetap mampu meraih suara terbanyak sehingga keluar sebagai pemenang pada setiap pemilihan umum. Hal ini tidak diperoleh partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2009. Dan dalam hal ini OPP yang lain, baik partai lama maupun partai baru juga melakukan hal yang sama, yaitu berusaha menampilkan kader-kader partai yang tangguh untuk memenangkan pemilihan umum.

Berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain pada umumnya, yang tidak mudah mendapatkan figur fungsionaris partai, bagi partai-partai politik Islam di Air Tiris bisa dikatakan bahwa partai-partai politik Islam pada awalnya telah tertata rapi dan mapan, dan hal ini berlangsung sampai pada pemilihan umum 1999. Tetapi pada pemilihan umum 2009, para kader partai-partai politik

---

<sup>58</sup>Wawancara pada tanggal 15 November 2012.

Islam banyak yang mengundurkan diri dan berpindah mendukung partai-partai non Islam, beberapa di antaranya partai baru, yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Masyarakat Air Tiris yang merupakan wilayah dengan masyarakat santri, seperti telah dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa setiap kali pemilihan umum, partai-partai politik Islam selalu meraih suara yang cukup signifikan, sebagai pemenang. Kekalahan partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2009, di samping salah satu penyebabnya adalah hijrahnya kader-kader ke partai-partai politik non Islam, sebab lain adalah adanya perubahan system pemilihan umum sebagai perkembangan akibat dari tumbanganya Orde Baru dan munculnya era reformasi.

Peran pemerintah yang menghendaki kemenangan Golkar pada setiap pemilihan umum pada masa Orde Baru, sejak pemilihan umum 1999 tidak berlaku lagi. Sementara itu, sejak muncul era reformasi, masyarakat memiliki kebebasan yang sangat luas untuk membentuk partai politik, dengan berbagai nama dan ideologi. Kemudian muncullah partai-partai politik Islam yang menjadikan PPP bukan lagi satu-satunya partai Islam. Kondisi perubahan system kepartaian yang multi partai menjadikan partai-partai politik berebut memperoleh dan merekrut kader-kader yang tangguh, untuk merebut suara pemilih.

Partai-partai politik Islam di Air Tiris nampaknya tidak siap menghadapi perubahan. Walaupun lambang dan simbolnya tak berubah, pada pemilihan umum 2009, partai-partai politik Islam kehilangan suara cukup telak. Elite di masyarakat Air Tiris tersebar hampir merata, dengan sebagian besar dari mereka berada di partai-partai politik non Islam. Dengan demikian partai-partai politik Islam mengalami kemerosotan perolehan suara yang cukup

tajam. Banyak kader partai-partai politik Islam merasa memiliki kebebasan untuk menentukan sikap mereka, apakah tetap di partai-partai politik Islam atau meninggalkan partai-partai politik Islam dan bergabung dengan partai-partai yang lain, partai-partai politik non Islam.

Sementara itu partai Golkar sebagai kekuatan politik yang tidak lagi mendapat dukungan pemerintah ternyata mampu kembali memperoleh kader-kader yang tangguh. Pada pemilihan umum 2009, kader-kader partai Golkar tidak lagi ditetapkan dari unsur pegawai negeri. Pada pemilihan umum 2009 partai Golkar kembali berjaya dibanding dengan perolehan suara pada pemilihan umum 1999 dan 2004 yang menjadikan partai Golkar memimpin perolehan suara. Sedangkan PDIP di Air Tiris tidak mengalami perubahan, pendukung dan pemilih tanda gambar simbol PDIP tetap sangat sedikit dan tidak muncul secara jelas. Partai Islam baru yang telah muncul sejak pemilihan umum 1999, PBB, PAN, PKS, dan yang muncul pada pemilihan umum 2004 yaitu PBR, memperoleh suara yang rata-ta menurun.

Kegiatan partai-partai politik Islam, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sebenarnya tidak pernah berhenti dan semula merupakan kegiatan monopoli partai-partai politik Islam, melalui kegiatan-kegiatan wirid, pada pemilihan umum 2009 tidak lagi dapat dimonopoli partai-partai politik Islam. Kegiatan-kegiatan yang secara formal ditetapkan oleh fungsionaris kecamatan partai-partai politik Islam kabupaten Kampar dan atas nama kepengurusan di tingkat kecamatan, misalnya mengkoordinir pertemuan rutin anggota, melaksanakan pelatihan kader dan lain-lain, pada pemilihan umum 2009

tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan<sup>59</sup>. Kegiatan kemasyarakatan tetap berjalan tetapi tidak lagi menjadi forum monopoli partai-partai politik Islam, akibat dari tersebarnya elit dalam berbagai partai politik. Namun kegiatan nyata dari para kader kecamatan maupun kelurahan yang hanya berlangsung intensif kira-kira dua bulan menjelang dimulainya kampanye, pada masa kampanye, dan pada saat pemilihan umum berlangsung, tidak lagi efektif bagi partai-partai politik Islam. Sementara kegiatan yang secara formal ditetapkan oleh fungsionaris kecamatan di luar masa di atas tidak pernah berlangsung.

Dalam menghadapi setiap pemilihan umum partai-partai politik senantiasa ingin menampilkan citranya sebagai kekuatan politik yang dapat menarik simpati massa sehingga memperoleh dukungan luas. Salah satu upayanya yaitu menampilkan dan merekrut tokoh-tokoh yang berbobot, dikenal dan disegani masyarakat luas. Demikian pula partai-partai politik Islam di Air Tiris Kabupaten Kampar dalam menghadapi pemilihan umum 2009. Namun partai-partai politik Islam pada umumnya gagal mempertahankan kader-kader tangguhannya selama ini.

Ketika para pemuka masyarakat, para elite, yang hampir seluruhnya adalah tokoh-tokoh agama tidak lagi mengibarkan bendera partai-partai politik Islam menghadapi pemilihan umum 2009, sebagian terbesar warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih tidak lagi sekompak sebelumnya, mereka meninggalkan partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2009. Dan suara partai-partai politik Islam merosot tajam.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PPP kecamatan Kampar, Oktober 2012.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris meninggalkan partai-partai politik Islam, pada pemilihan umum 2009, dapat disebutkan, pertama, hilangnya figur-figur pendukung partai-partai politik Islam yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang teguh menjalankan syariat Islam. Kedua, memudarnya identifikasi kepartaian masyarakat terhadap partai-partai politik Islam. Dan ketiga, memudarnya identitas keislaman masyarakat kepada partai-partai politik Islam yang sebenarnya telah mengakar sejak lama.

#### **4.2.3.5. Strategi Kampanye Partai-partai Politik Islam**

Kampanye pemilihan umum merupakan tahapan pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Kampanye merupakan masa sosialisasi politik formal bagi partai-partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Sosialisasi politik diselenggarakan oleh partai-partai politik dimaksudkan untuk menarik massa pemilih agar dapat memilih calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik yang tertera pada kertas suara pemilihan umum untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Bentuk kampanye yang lazim dalam peraturan perundang-undangan pemilihan umum, antara lain; rapat-rapat umum; pawai-pawai umum; keramaian umum, pesta umum, pertemuan umum; pidato kampanye melalui RRI, TVRI, serta media massa lainnya; segala macam bentuk pertunjukan umum; penyebaran, penempelan di tempat-tempat umum berupa poster, plakat, radio kaset, brosur, tulisan-tulisan, dan lain-lain.

Kampanye pemilihan umum merupakan kegiatan yang paling menarik karena melibatkan warga negara secara luas. Dari kampanye pemilihan umum ini akan

dapat dilihat dan diamati perilaku para pemilih. Kampanye pemilihan umum 2009 di Air Tiris memperlihatkan fenomena yang lebih vreatif. Tiga puluh delapan (38) partai politik peserta pemilihan umum berusaha merebut hati pemilih melalui kegiatan-kegiatan promotif, dari sekedar pemasangan tanda gambar partai sampai pada penyelenggaraan keramaian umum. Dari Tiga puluh delapan (38) partai politik peserta pemilihan umum, 8 (delapan) partai politik, PPP, partai Golkar, PDIP, PBB, PBR, PAN, PKS, PD nampak kompetitif memperebutkan masyarakat santri di Air Tiris. Dari ke delapan partai politik tersebut, 5 partai politik merupakan partai politik dengan ideology Islam, yaitu PPP, PBB, PBR, PAN dan PKS, sementara 3 partai politik lainnya, partai Golkar, PD dan PDIP adalah partai berideologi nasionalis. Kampanye pemilihan umum 2009 di Air Tiris menampakkan kondisi di mana kegiatan kampanye partai-partai politik Islam kelihatan kurang semarak.

Kampanye partai-partai politik Islam yang senantiasa menampilkan tema-tema keislaman dan pembangunan karena basis partai ini adalah umat Islam, kaum santri, tidak lagi menjadi monopoli partai-partai politik Islam. Partai-partai politik non Islampun membawa tema-tema keislaman ditambah dengan pemberian bantuan-bantuan, baik untuk kepentingan keagamaan maupun kepentingan kemasyarakatan. Di samping itu partai-partai politik Islam yang selama ini menyatakan secara tegas menyalurkan aspirasi umat Islam, telah kehilangan relevansinya. Pada pemilihan umum 1999 di masyarakat Air Tiris telah muncul 3 partai Islam baru, yaitu PBB, PAN dan PK, sementara itu pada pemilihan umum 2004 PK berubah menjadi PKS, ditambah dengan munculnya satu partai Islam baru lagi yaitu PBR. Dengan demikian pada pemilihan umum 2004



dan 2009 di Air Tiris terdapat 4 partai Islam. Mereka bersaing dalam kampanye dengan tema dan isu yang relatif tidak berbeda. Dalam kondisi seperti demikian, suara pemilih akan cenderung kepada partai-partai politik yang mampu menampilkan juru kampanye yang populer dan kharismatik dalam setiap bentuk kampanye.

Strategi kampanye lainnya yang biasa digunakan partai-partai politik Islam pada pemilihan-pemilihan umum sebelumnya adalah membawa serta beberapa tokoh atau pemuka agama untuk ikut serta dalam kegiatan menghadiri kampanye, baik berbentuk pawai kendaraan bermotor maupun semata-mata menghadiri rapat-rapat umum di luar wilayah. Namun, strategi ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan lagi mengingat elite yang tadinya berkumpul di partai-partai politik Islam, telah menyebar ke sejumlah partai-partai politik non Islam. Dapat dikatakan bahwa peranan para pemuka agama tetap memberikan andil besar dalam mendulang suara pada pemilihan umum, termasuk pemilihan umum tahun 2009, tetapi tidak lagi hanya untuk partai-partai politik Islam, juga untuk partai-partai politik non Islam.

Partai Golkar dalam kampanye pemilihan umum 2009 berusaha keras untuk menambah perolehan suara dibanding perolehan suara pada pemilihan umum 2004. Pemilihan umum 2009 partai Golkar telah terbiasa tidak lagi mengandalkan birokrasi, pejabat dan TNI POLRI, semakin mantap untuk memenangkan pemilihan umum. Perolehan suara partai Golkar pada pemilihan umum 2009 mengalami kenaikan yang signifikan dan kembali menjadi pemenang. Partai Golkar berhasil memulihkan perolehan suara dalam suasana perubahan system sejak era reformasi. Partai Golkar di Air Tiris bahkan mampu menampilkan tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini

didominasi oleh partai-partai politik Islam. Sementara para pejabat dan pegawai negeri lainnya tetap tidak lagi melakukan kampanye untuk partai Golkar, walaupun berdomisili di masyarakat Air Tiris. Strategi partai Golkar dalam melakukan kampanye pemilihan umum 2009 ini berusaha memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa kemenangan partai Golkar akan menjamin kesinambungan pembangunan dan secara nyata mengedepankan kepentingan umat Islam.

Secara formal, kampanye pemilihan umum merupakan kesempatan bagi partai-partai politik peserta pemilu untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan para pendukung dan simpatisannya. Sebenarnya, setiap partai politik secara tidak langsung telah berkampanye secara intensif, namun demikian perubahan-perubahan yang terjadi sejak reformasi, struktur politik yang telah relative terbentuk pada masa Orde Baru menjadi buyar, telah mulai menampakkan polanya. Anomaly partai politik dan massa pemilih yang membuat partai-partai masa Orde Baru mengalami kesulitan, telah mulai dapat diatasi. Oleh karena itu kampanye pemilihan umum secara formal diartikan sebagai kegiatan parta-partai politik untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum menjadi lebih bermakna sesungguhnya, karena sikap para pemilih yang mengalami anomaly telah mulai memperlihatkan bentuknya. Dapat dikatakan bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum 2009 merupakan kegiatan strategis partai politik untuk memperoleh simpati dan suara massa.

Kampanye pemilihan umum 2009 yang hanya berlangsung sekitar dua bulan tersebut, di Air Tiris, khususnya, benar-benar berfungsi sebagai upaya partai-partai politik untuk merebut hati masyarakat pemilih. Baik

partai-partai politik Islam maupun partai-partai politik non Islam menggunakan dan melaksanakan kampanye secara maksimal, dengan berbagai cara mereka masing-masing.

Upaya yang dilakukan partai Golkar dalam kampanye pemilihan umum 2009 adalah mengadakan rapat umum, pawai umum, pemancangan poster-poster dan spanduk-spanduk, serta penempelan dan pemasangan tanda gambar dalam ukuran besar dan kecil. Usaha partai Golkar tersebut telah mengembalikan massa pendukung seperti pada pemilihan umum 1997, dan menjadi pemenang.

PDIP dalam masa kampanye 2009 di masyarakat Air Tiris, seperti pada pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, tidak menampakkan aktifitasnya yang menonjol. Partai ini selain tidak memiliki basis massa yang dapat diandalkan juga sangat terbatas pengaruhnya, sehingga selama masa kampanye pemilihan umum 2009 ini tidak sanggup menyelenggarakan rapat umum maupun pawai umum. Aktifitas kampanyenya terbatas pada penempelan tanda-tanda gambar yang jumlah dan penyebarannya sangat sedikit dibandingkan dengan partai-partai politik Islam, partai Golkar dan partai-partai politik lainnya.

Sebenarnya kegiatan kemasyarakatan di Air Tiris yang didominasi oleh kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian-pengajian, wirid Yasin, pengajian kampung, dan wirid peringatan hari-hari penting Islam tetap berjalan. Kelompok-kelompok wirid atau majelis taklim ini tetap dipimpin oleh para Imam Masjid atau Musholla dan didukung oleh para pedagang yang relatif kaya. Dalam acara-acara wirid pengajian tersebut di samping berupa amalan-amalan, juga diisi dengan ceramah agama dan kemasyarakatan yang menekankan diamalkannya nilai-nilai

ajaran Islam, serta membicarakan masalah-masalah aktual kemasyarakatan yang muncul.

Pada pemilihan umum 2009, hubungan yang akrab dan dekat di antara anggota masyarakat, lebih khusus lagi hubungan antara pemimpin dan massa tetap terjaga. Kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung dari generasi ke generasi inilah, terutama, yang mampu membentuk masyarakat santri di masyarakat Air Tiris. Kegiatan ini pula yang secara berhasil telah mempertahankan dan melestarikan identifikasi masyarakat terhadap partai-partai politik Islam sampai pada pemilihan umum 2004. Namun, jika sampai pemilihan umum 1997 PPP adalah satu-satunya partai yang dipandang sebagai partai Islam, sejak pemilihan umum 1999 telah muncul partai-partai Islam baru. Demikian juga, elite masyarakat Air Tiris kemudian mengalami penyebaran, menjadi rebutan partai-partai politik Islam, yang tidak lagi monopoli PPP. Sementara pasca pemilihan umum 2004 partai Golkar yang sempat kehilangan dukungan birokrasi dan TNI telah mulai mampu mendekati tokoh-tokoh dan merekrutnya, di samping partai-partai politik non Islam yang lain.

Hubungan antara pemimpin dengan masyarakat lingkungannya juga didukung oleh pola hubungan saling ketergantungan yang bersifat ekonomis. Para pemimpin informal di masyarakat Air Tiris, di samping dipandang cukup memahami agama Islam dan menyandang gelar haji, mereka adalah pedagang-pedagang karet dan sawit. Mereka masing-masing memiliki pekerja atau buruh dan juga sekelompok petani yang menjual hasil getah atau tandan sawitnya. Kondisi hubungan seperti ini akan memperkuat pola hubungan “Bapak-Anak Buah “ yang memang merupakan pola budaya hubungan antara elite dan massa dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian, ketika para tokoh informal ini memperlihatkan diri mereka mencerminkan dukungan terhadap partai politik tertentu, para pekerja serta seluruh anggota keluarganya dan teman-temannya mengikutinya. Tersebaranya elit ke banyak partai politik membawa akibat pada tersebaranya massa pada banyak partai politik.

Kampanye yang dilakukan partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2009 di masyarakat Air Tiris berupa rapat umum, pawai umum, pemasangan poster-poster dan spanduk-spanduk, penempelan tanda gambar dan lain-lain masih berlangsung semarak seperti pada pemilihan-pemilihan umum sebelumnya. Rapat umum dalam pengertian bahwa massa partai-partai politik Islam di Air Tiris menghadiri rapat umum di luar wilayah Air Tiris yang di selenggarakan oleh fungsionaris partai-partai politik Islam kabupaten Kampar, pawai umum dalam pengertian bahwa massa partai-partai politik Islam di Air Tiris menghadiri kampanye di tempat tertentu di luar wilayah masyarakat Air Tiris dengan terlebih dahulu berputar-putar di wilayah Air Tiris seperti pemilihan umum sebelumnya masih bisa berlangsung. Pada pemilihan umum 2009 ini partai-partai politik Islam mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan dan memperoleh 46,72% suara. Mengalami penurunan sekitar 35% dibandingkan pemilu 2004 yang memperoleh 80.30%.

Kegiatan-kegiatan yang diuraikan di depan, sesungguhnya menunjukkan bahwa keutuhan masyarakat Air Tiris yang telah mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai Islam sejak lama, mulai memudar. Namun, masyarakat, pada pemilihan umum 2009 tersebar ke banyak partai Islam, PBB, PBR, PAN dan PKS dan partai-partai politik non Islam, secara relatif merata. Kampanye pemilihan umum 2009, partai-partai politik Islam bukan lagi

merupakan satu-satunya kelompok parta-partai politik yang berpenampilan tegar yang semarak di mana-mana, bahkan, pertama kali, partai-partai politik Islam muncul sebagai partai yang mulai melemah. Partai-partai politik Islam ini tidak lagi didukung oleh mayoritas umat Islam yang 100% sebagai kaum santri, juga, kelompok elite informal yang memiliki pengaruh lebih luas dibanding para pemimpin formal, telah tersebar termasuk mendukung partai-partai politik non Islam.

Identitasnya yang khas Islam dengan lambang tanda gambar Ka'bah dan lambang-lambang keislaman lainnya tidak mampu mempertahankan dominasi partai-partai politik Islam sebagai partai umat Islam. Dengan uraian ini, kampanye partai-partai politik Islam dapat dikatakan mengalami penurunan aktifitas kegiatan kampanyenya dan kenyataannya tidak mampu memelihara dan mempertahankan dukungan yang telah lama dimilikinya.

#### **4.2.3.6. Hasil Penghitungan Suara.**

Masyarakat yang memiliki hak pilih menuju ke TPS yang tersebar di Air Tiris. Hasil penghitungan suara, didapatkan bahwa pada pemilihan umum 2009 ini, dari 38 partai politik peserta pemilihan umum terdapat 8 partai politik yang memperoleh suara. Partai-partai politik Islam memperoleh 46, 72% suara, terdiri dari PBR, PAN, PPP, PKS dan PBB, dengan perolehan suara masing-masing 17,3%, 16,7%, 4,7%, 4,41%, dan 3,3%.

Sedangkan partai-partai politik non Islam memperoleh 53,28% suara, terdiri dari partai Golkar, yang menduduki peringkat pertama, dengan memperoleh 43,7% suara, disusul oleh PD dan PDIP dengan perolehan suara masing-masing 8,36%, dan 3,7%.

#### **4.2.4. Faktor Pengaruh Perubahan Orientasi politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 2014**

Pemilihan umum 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 memperebutkan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota<sup>60</sup>. Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan umum ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah.

Dibanding dengan pemilihan umum sebelumnya, terdapat perubahan peraturan. Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%. Dalam UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, pada awalnya ditetapkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 3,5% juga berlaku untuk DPRD. Akan tetapi, setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian

---

<sup>60</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_legislatif\\_Indonesia\\_2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014)

menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Peserta pemilihan umum ini cukup banyak. Pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.



Gambar 4.1.  
Lambang dan Nama Partai Politik pada Pemilihan Umum  
2014

No. urut	Lambang dan nama partai	
1		Partai NasDem
2		Partai Kebangkitan Bangsa
3		Partai Keadilan Sejahtera
4		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5		Partai Golongan Karya
6		Partai Gerakan Indonesia Raya

7		Partai Demokrat
8		Partai Amanat Nasional
9		Partai Persatuan Pembangunan
10		Partai Hati Nurani Rakyat
14		Partai Bulan Bintang
15		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Untuk anggota DPRD menyesuaikan dengan DPRD. Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota

Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah daftar 3 partai politik lokal yang ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh beserta nomor urutnya.

Gambar 4.2.  
 Tambahan Lambang dan Nama Partai Politik  
 di Provinsi Aceh pada Pemilihan Umum 2014

Nomor urut	Lambang	Nama partai
11		Partai Damai Aceh
12		Partai Nasional Aceh
13		Partai Aceh

Sementara itu, daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR adalah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam 1 provinsi, dengan total 77 daerah pemilihan. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan berkisar antara 3-10 kursi. Penentuan besarnya daerah

pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Kabupaten baru yang tidak tertulis di bawah masih digabung dengan kabupaten induk sebelum pemekaran. Daerah pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPD adalah provinsi sehingga terdapat 33 daerah pemilihan untuk 33 provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau provinsi adalah empat orang.

Pemilihan umum 2014 menghasilkan 10 partai politik yang lolos, yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PD, PAN, PPP dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara dua partai lainnya, PBB dan PKPI tidak lolos.

Gambar 4.3.  
Peta Partai Peraih Suara Terbanyak Setiap Provinsi.



Tabel 4.10.  
Perolehan Suara dan Kursi Partai dalam Pemilihan umum  
2014

No.	Partai	Jlh suara	% suara	Jlh kursi	% kursi	Status PT*
1	Partai NasDem	8.402.812	6,72	35	6,3	Lolos
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.198.957	9,04	47	8,4	Lolos
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.104	6,79	40	7,1	Lolos
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95	109	19,5	Lolos
5	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75	91	16,3	Lolos
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81	73	13,0	Lolos

No.	Partai	Jlh suara	% suara	Jlh kursi	% kursi	Status PT*
7	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,9	Lolos
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49	8,8	Lolos
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39	7,0	Lolos
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26	16	2,9	Lolos
14	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0	0	Tidak Lolos
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91	0	0	Tidak Lolos
<b>Jumlah</b>		124.972.491	<b>100%</b>	<b>560</b>	<b>100%</b>	•

\*)Karena adanya penerapan *parliamentary threshold* (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase kurang dari 3,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.

Pada pemilihan umum 2014, seperti halnya pemilihan umum 2009, penentuan calon terpilih dari partai politik yang mendapatkan kursi di DPR berdasarkan sistem suara terbanyak, tidak lagi sistem nomor urut bersyarat seperti pada pemilihan umum sebelum pemilihan umum 2009. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak tanpa melihat nomor urut dalam daftar pencalonan ditetapkan menjadi calon jadi. Penggunaan sistem suara terbanyak ini berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Hal lain yang tetap menarik adalah munculnya kembali calon anggota legislatif dari kalangan artis dan kerabat elit politik. Calon artis dipandang sebagai peraih suara, banyak partai yang memunculkan artis dalam daftar calon anggota legislatif. Dengan modal keartisannya, mereka dianggap mampu menarik suara pemilih. Artis dan selebriti tersebut tersebar di berbagai partai politik<sup>61</sup>. Sementara Partai politik juga tak segan meneruskan strategi menempatkan calon-calon yang memiliki hubungan darah dengan elit politik yang sedang berkuasa di pemerintahan maupun partai.

Munculnya calon anggota legislatif tersebut memunculkan berbagai kritik. Bagi para artis, mereka dianggap tidak memiliki cukup kapabilitas untuk dapat memainkan peran-peran politik mewakili aspirasi kepentingan rakyat. Sedangkan calon yang muncul dari 'unsur kekerabatan' dikritik karena berusaha membangkitkan dinasti politik yang berbahaya bagi masa depan partai dan sistem politik yang sehat. Pencalonan itu secara tidak langsung menyangkal bekerjanya demokrasi

---

<sup>61</sup>F. Hariyanto Santoso, et.all. *Wajah DPR dan DPD 2009-2014: Latar Belakang Pendidikan dan Karier* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. Xi.

yang menempatkan seleksi kandidat adalah bersifat kompetisi dan terbuka, bukan tertutup dan pewarisan.

Keikutsertaan partai lokal dalam pemilihan umum legislatif di tingkat local tetap berlanjut. Walaupun keikutsertaan partai lokal ini hanya terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Terdapat 3 (tiga) partai lokal yang ikut dalam pemilihan umum, yaitu Partai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh (PDA). Dalam daftar nomor urut partai di kertas suara, partai lokal tersebut masing-masing secara berurutan menempati nomor urut 11, 12, dan 13. Sementara pada tingkat nasional, partai politik yang ikut pemilihan umum 2014 berjumlah 12 partai politik. Pemilihan umum legislatif akhirnya digelar dengan peserta 12 partai politik di tingkat nasional, dan khusus di Aceh terdapat 3 peserta partai lokal.

Hasil pemilihan umum 2014 menghasilkan 10 (sepuluh) partai yang lolos PT, yaitu PD, PG, PDIP, PPP, PKS, PAN, PKB, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai NasDem. Kesepuluh partai itu menjadi partai yang mendapatkan kursi di DPR. Dari sepuluh partai tersebut, satu partai adalah pendaatang baru dalam konstelasi politik nasional, yaitu Partai NasDem. Partai tersebut adalah partai baru yang didirikan menjelang pemilihan umum 2014. Artinya pengalaman 4 (empat) kali masa pemilihan umum senantiasa menghadirkan dua partai dan satu partai pada pemilihan umum 2014 dengan kekuatan cukup signifikan. Pada pemilihan umum 1999 menghasilkan PAN dan PKB; pemilihan umum 2004 menghasilkan PD dan PKS; pemilihan umum 2009 menghasilkan Hanura dan Gerindra; pemilihan umum 2014 menghasilkan Partai NasDem.



Melihat konstelasi kesepuluh partai yang memperoleh kursi DPR, tidak satupun partai yang benuansa atau berafiliasi dengan kekuatan politik Kristen atau Katholik. Artinya, kekuatan politik partai dari partai berbasis agama katolik dan protestan menghilang dari kancah politik nasional. Kemana aspirasi politik kekuatan politik yang mempresentasikan politik kedua agama tersebut menjadi kajian menarik. Apakah akan berusaha menghidupkan kembali partainya, bergabung dengan partai lain atau melakukan diaspora ke banyak partai.

Dan hasil pemilihan umum 2014, jatuhnya perolehan suara PD yang cukup signifikan menjadi gempa politik kepartaian. Partai yang genap satu dekade ini tidak hanya merosot tajam perolehan suara partai tetapi sekaligus menjadi partai papan bawah, dikalahkan oleh Partai Gerindra, partai politik yang baru ikut dua kali pemilihan umum.

Dalam pemilihan umum 2014 di Air Tiris, para juru kampanye dan aktifis partai-partai politik Islam tetap dan lebih tegas menggunakan isu-isu agama sebagai sarana menjangkit massa, dengan menegaskan bahwa partai-partai politik Islam adalah partai umat Islam, partainya masyarakat Air Tiris. Dalam kaitannya dengan isu "pembangunan", partai-partai politik Islam menegaskan bahwa partai-partai politik Islam berkomitmen besar dan mengambil posisi paling depan dalam upaya percepatan pembangunan bangsa, termasuk pembangunan di Air Tiris.

Namun isu-isu yang ditampilkan oleh partai-partai politik Islam tersebut, dan perkembangan masyarakat Air Tiris sejak pasca reformasi 1998 yang telah mengalami ketidakstabilan, serta konsolidasi fungsionaris partai-partai politik Islam kecamatan Kampar dan Air Tiris yang kurang berhasil, ternyata perolehan suara partai-partai politik Islam

di Air Tiris mengalami penurunan lebih telak. Pada pemilihan umum 2014 partai-partai politik Islam di Air Tiris hanya meraih suara 17,20%. Orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam benar-benar sampai pada titik nadir. Di luar dugaan, partai Golkar kembali berjaya, menempati peringkat pertama dengan perolehan suara 56,70%, menyusul kemudian Partai NasDem dengan 16,6% suara. Secara menyeluruh partai-partai politik non Islam mencapai perolehan 82,80% suara, suatu perolehan suara yang fantastis.

#### **4.2.4.1. Kepemimpinan**

Kepemimpinan yang efektif menjadi syarat utama bagi keberhasilan dan tercapainya tujuan organisasi. Efektifitas kepemimpinan memberi pengaruh dominan terhadap keberhasilan organisasi. Kepemimpinan melekat pada seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinya.

Dalam memperjuangkan perubahan kehidupan politik, yang merupakan tantangan politik terbesar bukanlah semata pada kemenangan pertarungan politik yang melegitimasi sebuah kepemimpinan politik, namun lebih pada efektifitas kepemimpinan tersebut dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam pemilihan umum 2014, partai-partai politik Islam sebagai bagian dari *political resource* (sumber daya politik) dari masyarakat menghadapi tantangan berat untuk merealisasikan kepemimpinan politik yang Islami. Kepemimpinan yang diharapkan berjalan seiring dengan ideologi Islam dan kehendak masyarakat dalam mengelola hidup bernegara yang lebih baik.

Kunci keberhasilan maupun kegagalan politik dalam setiap kepemimpinan terletak pada kemampuan dari

pemimpin untuk mengelola kepemimpinan politiknya. Kepemimpinan politik dapat dimaknai sebagai kemampuan pemimpin dalam mengelola sumber daya masyarakat yang tersedia untuk mengatasi segenap hambatan politik yang dihadapi demi mencapai visi politik yang dicita-citakan.

Sumber daya yang secara potensial dimiliki pemimpin untuk mengelola kehidupan bernegara dapat berupa ideologi politik untuk menjaga dukungan politik publik; dukungan institusi seperti partai politik maupun gerakan sosial. Sementara hambatan politik adalah kekuatan sosial yang membatasi pilihan-pilihan politik yang tersedia bagi pemimpin untuk melakukan transformasi sosial. Menyoroti dinamika politik masyarakat Air Tiris, pemahaman akan kepemimpinan politik seperti di atas dapat kita proyeksikan untuk memahami perjalanan kepemimpinan fungsionaris partai-partai politik Islam masyarakat Air Tiris. Sehubungan dengan posisi partai-partai politik Islam sebagai artikulator politik, partai ini dapat memerankan diri sebagai sumber daya utama sebagai penentu bagi keberhasilan kepemimpinan politik, untuk membaktikan diri bagi perwujudan ideologi Islam yang menjadi alasan mendasar keberadaannya.

Dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Air Tiris, kualitas seorang pemimpin mengarah pada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pertama, tak ada pemimpin di antara masyarakat Islam kecuali yang beriman, kedua tak ada pemimpin yang mempermalukan Islam. Ketiga, pemimpin harus memiliki kemahiran di bidangnya. Pemimpin partai yang tidak memahami dan mahir dalam organisasi kepartaian akan gagal membawa partai mencapai tujuannya.

Keempat, pemimpin harus dapat diterima masyarakat, mencintai dan dicintai masyarakat,

mendoakan dan didoakan masyarakat. Dan kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan masyarakat, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkar, kekufuran, kekacauan dan fitnah.

Karakter kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin, pertama, *shiddiq*, memiliki integritas dan jujur. Kedua, *amanah*, memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan yang telah dipilihnya tersebut. Ketiga, tidak menipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Setiap sumpah atau janji harus benar dan jujur, karena jika tidak benar, maka akibatnya sangatlah fatal. Keempat, menepati janji. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu menepati janjinya. Janji yang tidak ditepati oleh pemimpin akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekacauan. Kelima murah hati. Dalam kepemimpinannya seorang pemimpin mesti memiliki sifat bermurah hati, ramah tamah, sopan santun, suka senyum suka mengalah namun tetap penuh tanggung jawab

Secara garis besar kepemimpinan masyarakat Air Tiris cukup memiliki karakter. Efektifitas kepemimpinan di Air Tiris di samping dukungan pola *patron-client*, pemimpin berkarakter membawa kepada struktur kepemimpinan di mana masyarakat menunjukkan loyalitasnya. Walaupun fungsionaris partai-partai politik Islam tidak selalu memiliki hubungan struktural dengan para tokoh masyarakat, dalam hal penentuan pilihan pada pemilihan umum tergantung bagaimana fungsionaris partai-partai politik Islam memiliki

kemampuan untuk merekrut para tokoh masyarakat tersebut. Pada pemilihan umum 2014, ketidakmampuan para fungsionaris partai-partai politik Islam merangkul para tokoh masyarakat masih terus terjadi. Partai-partai politik Islam tidak berhasil mempengaruhi para tokoh masyarakat, elit di masyarakat Air Tiris. Hal ini mengakibatkan para tokoh yang diikuti oleh masyarakat telah melupakan dan meninggalkan partai-partai politik Islam. Pada pemilihan umum 2014 partai-partai politik Islam di Air Tiris semakin terpuruk, perolehan suaranya semakin merosot.

#### **4.2.4.2. Karakter**

Pada pemilihan umum 2014, partai-partai politik Islam berkarakter keislaman, baik yang berazaskan Islam maupun dengan lambang-lambang keislaman, yang salah satunya PPP telah menegaskan kembali pada muktamar IV tahun 1998 sebagai partai Islam. Pada dasarnya partai-partai politik Islam senantiasa berusaha mengidentifikasi dengan masyarakat Islam dan berasas Islam. Azas partai politik Islam, Pancasila sebagai satu-satunya azas, pada tahun 1984-1997 adalah suatu strategi penyesuaian. Mengingkari Islam sebagai azas sesungguhnya telah mengingkari jati diri dan sikap politik partai-partai politik Islam itu sendiri. Partai-partai politik Islam sudah barang tentu tidak mau kehilangan ruh, kehilangan semangat Islam itu. Sebenarnya kedudukan Islam dalam partai-partai politik Islam adalah sebagai ruh, spirit, semangat, mengideologi, dan sebagai motivator dalam perjuangan.

Partai-partai politik Islam perlu mengimplementasikan karakter keislaman dalam kehidupan nyata. Sudah barang tentu yang diperjuangkan partai-partai politik Islam bukan sekedar meraih kekuasaan saja, tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana

mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai partai politik dapat dikatakan bahwa partai-partai politik Islam adalah wadah perjuangan umat Islam.

Dalam konteks implementasi Islam sebagai karakter, partai-partai politik Islam mengidentifikasi Islam sebagai rahmatan lil'alam, yaitu bahwa Islam memenuhi semua aspek kehidupan; ekonomi, budaya, politik, hukum, lingkungan hidup, dan sebagainya. Islam yang mengimplementasikan semua kehidupan. Islam yang inklusif. Bukan Islam yang dilihat sebagai terorisme, radikalisme, atau gerakan sempalan, ajaran yang tidak benar. Dan terimplementasi dalam tingkah laku dan perbuatan yang Islami.

Dalam berpolitik hal-hal tersebut menjadi ukuran bahwa partai tersebut adalah partai Islam dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Kelemahan yang sering menjadi bumerang bagi partai-partai politik Islam adalah perilaku anggota, kader, pengurus yang tidak Islami. Hal ini berkontribusi negatif terhadap perolehan suara partai-partai politik Islam yang ditandai dengan simpati masyarakat yang semakin berkurang kepada partai-partai politik Islam. Perpecahan internal, politik transaksional, sekularisme, pragmatisme, politik uang, dan lain-lain, bisa menggerogoti kewibawaan dan mengerdilkan partai-partai politik Islam. Konsistensi dan konsolidasi moral secara total dan tetap pada koridor Islam, yang sesungguhnya akan mampu membesarkan partai-partai politik Islam.

Partai-partai politik Islam menghadapi pemilihan umum tahun 2014 di Air Tiris mengalami tragedi dengan telah kehilangan kader-kader tradisionalnya. Mereka telah hijrah ke partai-partai lain, partai-partai politik non Islam.

Sementara fungsionaris yang menggantikannya lebih berorientasi pada transaksional dan pragmatis. Sikap dan kondisi ini kemudian memicu persaingan dan konflik antar mereka. Keadaan demikian itulah yang lebih mendorong pada turunnya simpati masyarakat terhadap partai-partai politik Islam yang berakibat pada semakin merosotnya perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2014.

Karakter Islam saja menjadi tidak cukup bagi partai-partai politik Islam untuk meraih suara. Islam, sebagai karakter memang tak pernah dipermasalahkan masyarakat, Islam tetap merupakan agama yang dijunjung tinggi. Namun yang lebih esensial adalah bagaimana para kader, fungsionaris dan pengurus partai-partai politik Islam berperilaku. Kemampuan mereka dalam mengimplementasikan keIslaman dalam kehidupan nyata, termasuk dalam kehidupan berpartai. Konflik dan perpecahan yang melanda elit partai-partai politik Islam sendiri yang membuat masyarakat meragukan partai-partai politik Islam dan beralih ke partai lain. Seorang warga masyarakat menyampaikan :

“Walaupun partai-partai politik Islam berazaskan Islam dan Islam sebagai agama yang saya anut, namun saya melihat partai-partai politik Islam tak lagi mampu menampilkan pengamalan azas Islam itu. Sepertinya para pengurus partai-partai politik Islam kurang menyadari bahwa pelaksanaan azas Islam itu yang lebih berpengaruh.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan warga masyarakat Air Tiris pada tanggal 16 Oktober 2016.

#### 4.2.4.3. Lambang

Hasil pemilihan umum 2014 di Air Tiris menunjukkan bahwa posisi partai-partai politik Islam, semakin ditinggalkan konstituennya. Fenomena di atas, dapat dibaca sebagai sikap umat Islam yang mulai mengabaikan keberadaan partai politik dengan latar belakang keagamaan, termasuk partai-partai politik Islam, yang tidak memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Dukungan terbesar umat Islam dari kelompok arus utama (Nahdliyin dan Muhammadiyah) tidak diberikan kepada organisasi gerakan politik Islam yang memperjuangkan diberlakukannya syariat Islam di wilayah publik. Nampak pengaruh modernisasi, perubahan ekonomi, kemajuan pendidikan, urbanisasi, budaya luar dan sejumlah faktor lain yang terus meningkat telah mengubah kepentingan politik umat Islam.

Dengan orientasi politik umat Islam lebih bersifat plural, sebagai pengaruh proses modernisasi masyarakat, sehingga identifikasi kepartaian tradisional umat Islam yang telah mengakar selama ini menjadi pudar, melemah. Tingkat loyalitas para partisan parpol Islam pun menurun. Karena itu, mengarahkan orientasi politik umat Islam ke dalam partai Islam menjadi sulit terwujud. Mereka justru lebih banyak menyebar ke partai non Islam; seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, dan Partai Gerindra yang mendasarkan *platform* dan program yang relevan dengan keseharian. Tingkat loyalitas para partisan parpol Islam telah semakin mengalami penurunan, orientasi politik umat Islam mengalami perubahan.

Walaupun demikian, kecenderungan lain lebih dipicu oleh gagalnya Islam politik dalam melakukan adaptasi dan reorientasi konsep politik mereka sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Ditambah lagi dengan nafsu



berkuasa yang seringkali lebih ditonjolkan politisi partai Islam, telah menjadi bumerang yang menghancurkan bangunan ideal partai yang semula dibangun sebagai wadah memperjuangkan kepentingan umat. Para pimpinan partai seyogyanya menyajikan kemungkinan lain bagi penilaian publik terhadap keberadaan mereka yang tidak hanya sekadar mengejar kekuasaan. Karena itu, menjadi tantangan berat bagi kader dan pimpinan partai untuk mengejar obsesi yang ingin menjadikan partai-partai politik Islam sebagai wahana untuk menampung kepentingan politik Islam.

Walaupun partai-partai politik Islam mempunyai strategi jempol dengan menggunakan lambang-lambang keislaman, termasuk Ka'bah, namun tidak mudah untuk menarik kembali warga masyarakat yang walaupun kelislamannya tidak berubah tetapi pertimbangan memilih bagi para tokoh Air Tiris telah berubah ke yang lebih rasional dan pragmatis. Perubahan orientasi elit ini tentu diikuti oleh masyarakatnya. Seorang tokoh ulama Air Tiris menyatakan :

“Ka'bah, bagi kami adalah kiblat kami, setiap kami mendambakan mengunjunginya, dekat dengannya. Partai-partai politik Islam, termasuk yang berlambang Ka'bah, sebenarnya adalah partai kami. Namun, akhir-akhir ini tokoh-tokoh partai lain justru kelihatan lebih Islami, dan lebih nyata dalam memberikan kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat. Hal ini tentu membuat kami tidak salah bila mendukung partai yang lain”.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan tokoh ulama Air Tiris, 14 Oktober 2016.

#### **4.2.4.4. Strategi Rekrutmen Partai-partai Politik Islam**

Kemunduran dan kekalahan partai-partai politik Islam di Air Tiris mulai pada pemilihan umum 2009 dapat dipahami oleh fungsionaris partai-partai politik Islam Kabupaten Kampar, namun fungsionaris partai-partai politik Islam Kabupaten Kampar tetap optimis akan mampu mengembalikan posisi partai-partai politik Islam seperti pada posisi pemilihan umum 1999 dan 2004. Untuk itu upaya-upaya dilakukan guna menghadapi pemilihan umum 2014, diantaranya adalah melaksanakan konsolidasi fungsionaris partai-partai politik Islam pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan, terutama kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris.

Disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa menjelang pemilihan umum 2009 telah terjadi penyebaran para pemimpin informal dari mendukung partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 1999 dan 2004, kemudian menyebar memberikan dukungannya kepada partai-partai lainnya, terutama ke Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, sehingga menjadikan partai-partai politik Islam mengalami penurunan perolehan suara secara drastis dan sebaliknya Partai Golkar dan partai-partai non Islam lainnya, termasuk partai-partai pendatang baru, mengalami perolehan suara yang cukup besar. Isu yang dibawa para pemimpin saat itu adalah bahwa umat Islam, warga masyarakat Air Tiris 100% pemeluk Islam, memiliki banyak pilihan partai-partai yang secara lebih nyata memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Untuk menghadapi isu-isu menjelang pemilihan umum 2014 tersebut, fungsionaris partai-partai politik Islam kabupaten Kampar, pertama-tama, melakukan konsolidasi partai di kecamatan Kampar dan Air Tiris. Fungsionaris partai-partai politik Islam kabupaten Kampar menetapkan

personalia fungsionaris partai kecamatan Kampar<sup>64</sup>. Komposisi personalia fungsionaris partai-partai politik Islam kecamatan Kampar tersebut ternyata muncul wajah-wajah baru dan hanya sebagian kecil wajah lama. Dalam waktu yang beriringan fungsionaris partai-partai politik Islam kecamatan Kampar menetapkan fungsionaris partai-partai politik Islam Air Tiris<sup>65</sup>

Komposisi personalia fungsionaris partai-partai politik Islam kecamatan Kampar dan kelurahan Air Tiris tersebut dapat dilihat bahwa komposisi tersebut tidak memuat para tokoh informal tergolong berpengaruh. Dengan kata lain bahwa partai-partai politik Islam di Air Tiris, pada pemilihan umum 2014, tidak berhasil memperoleh tokoh-tokoh berpengaruh dalam kepengurusan partai. Hal ini lebih merupakan akibat dari munculnya banyak partai-partai politik non Islam yang kemudian menjadikan para elit, terutama elite informal, tersebar menduduki fungsionaris partai-partai non Islam tersebut. Dengan berbagai alasan, tokoh-tokoh yang tadinya menjadi fungsionaris partai-partai politik Islam, menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai-partai politik Islam. Fungsionaris partai-partai politik Islam di Air Tiris hanya bisa memunculkan kader-kader muda yang sebenarnya masih sangat disangsikan kemampuannya. Gerakan mereka ternyata kurang mendapatkan dukungan dari kondisi perkembangan masyarakat Air Tiris dalam menghadapi pemilihan umum 2014.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PAN Kecamatan Kampar, Oktober 2016

<sup>65</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PPP kelurahan Air Tiris, Oktober 2016.

Suasana yang kurang mendukung tersebut, di antaranya, pertama, terdapat kekecewaan para mantan fungsionaris partai-partai politik Islam Air Tiris. Mereka merasa bahwa para pimpinan fungsionaris kecamatan dan kabupaten kurang memperhatikan dan mendengar aspirasi mereka. Kekecewaan ini menjadikan mereka berubah menjadi meninggalkan partai-partai politik Islam dan melakukan hal-hal yang bukan hanya terbatas pada kritik-kritik, melainkan lebih jauh, bergabung pada partai-partai politik lain, partai-partai politik non Islam. Mereka yakin bahwa di partai-partai lain tersebut aspirasi mereka bisa lebih diperhatikan.

Isu ideologi keislaman yang kerap menjadi isu setiap menjelang pemilihan umum, menjelang pemilihan umum 2014 isu tersebut banyak dimentahkan. Bahwa yang penting bukan partai Islamnya tetapi apa yang mereka lakukan untuk umat Islam. Pada pemilihan umum 2014 ini masyarakat diperkenalkan dengan cara memilih baru, yaitu kalau pada pemilihan umum sebelumnya masyarakat hanya memilih lambang tanda gambar partai politik, pada pemilihan umum 2014 ini gambar para calon legislatif disertakan sehingga masyarakat bisa memilih baik tanda gambar partai politik atau gambar calon legislatif.

Cara ini menjadikan para calon legislative bisa terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan rayuan pada masyarakat untuk menjatuhkan pilihan mereka, tanda gambar mereka. Konsekuensi lain dari cara ini adalah masyarakat memperhatikan langsung apa yang dilakukan oleh para calon legislative tersebut terhadap masyarakat. Isu bantuan untuk masjid dan mushalla menjadi lebih populer, dengan tanpa terlalu perhatian dari partai mana para calon legislatif tersebut berasal. Partai politik yang mampu merekrut tokoh-tokoh populer akan berpeluang

besar memperoleh suara dan memenangkan pemilihan umum.

Kedua, hilangnya tokoh penting yang semula adalah tokoh partai-partai politik Islam menjadikan masyarakat mengalami anomali. Janji-janji partai politik menjadi janji-janji pribadi para tokoh calon legislative, bahkan mulai menjadi fenomena ketika seorang calon legislative melakukan sosialisasi langsung memberikan bantuan-bantuan. Fungsi para fungsionaris dalam sosialisasi partai politik secara tidak langsung digusur oleh para calon legislatif yang langsung menyatakan kesanggupannya membawa misi kesejahteraan masyarakat jika masyarakat mempercayainya.

Kegagalan partai-partai politik Islam merekrut elit masyarakat Air Tiris dan calon legislative yang populer nampaknya membuat partai-partai politik Islam semakin terpuruk. Pada pemilihan umum 2014 partai-partai politik Islam terpuruk menjadi partai-partai gurem, dan secara keseluruhan hanya hanya memperoleh 17,20% suara. Hampir hanya sepertiga dari perolehan suara pemilihan umum 2004 yang meraih 80,30%. Kecemerlangan dicapai oleh partai Golkar dengan perolehan suara 56,70%, merupakan prestasi partai terbaik setelah keterpurukannya pada dua kali pemilihan umum sebelumnya, pemilu 1999 dan 2004, dan merupakan kebangkitan kembali partai Golkar. Partai-partai Islam lainnya mengalami kemerosotan, PBR pemenang pertama pada pemilihan umum 2004, telah tereliminasi pada pemilihan umum 2014. Sementara itu partai NasDem yang baru mengikuti pemilihan umum 2014 memperoleh suara yang mengejutkan yaitu 16,60%, di atas masing-masing partai-partai politik Islam.

#### **4.2.4.5. Strategi Kampanye Partai-partai Politik Islam**

Strategi kampanye partai-partai politik Islam di Air Tiris pada pemilihan umum 2014 berbeda, tidak seperti strategi kampanye yang dilakukan pada pemilihan - pemilihan umum sebelumnya. Pada pemilihan umum 1999 dan pemilihan umum 2004, partai-partai politik Islam dapat dikatakan merupakan partai-partai politik yang percaya diri, tegar dan utuh setelah kejatuhan Orde Baru. Identifikasi masyarakat pada partai-partai politik Islam sejak pemilihan umum 1955 ditambah dengan dukungan kompak, terutama para pemimpin informal, menjadikan partai-partai politik Islam di Air Tiris tetap memperoleh suara yang signifikan. Namun, ketika para pemimpin informal berpindah menyebar mendukung dan memilih partai-partai lain, partai-partai politik non Islam, sebagian besar masyarakat Air Tiris ikut "hijrah" meninggalkan partai-partai politik Islam untuk kemudian mendukung dan memilih partai-partai politik yang lain. Kenyataannya pada pemilihan umum 2014 partai-partai politik Islam tidak mampu bangkit mengembalikan kejayaannya di masa lampau, dan nyaris tidak ada kampanye kecuali hanya menempel gambar-gambar lambang partai, termasuk gambar Ka'bah.

Dalam kaitannya dengan kampanye pemilihan umum 2014 ini, partai-partai politik Islam tak mampu lagi mengerahkan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat fisik, walaupun kegiatan fisik tidak selalu menghasilkan perolehan imbalan yang sepadan. Salah satu ketua partai Islam, PPP periode 1989 sampai dengan 1999, H. Ismail Hasan Matareum, SH pernah menjelaskan bahwa :  
"Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan meminimalkan pengerahan fisik pada kegiatan kampanye pemilu 1992 mendatang. Alasannya adalah bahwa kegiatan tersebut hanya membuang energi tanpa memperoleh

imbangan sepadan dalam kegiatan perjaringan massa. Di samping itu, pengerahan fisik mudah menimbulkan keonaran yang tentunya tidak dikehendaki semua pihak, terutama OPP (organisasi peserta pemilu) lainnya. Dalam kampanye pemilu mendatang PPP akan menampilkan kegiatan-kegiatan tanpa pengerahan fisik, tetapi mampu menarik simpati masyarakat.”<sup>66</sup>

Secara lebih terperinci, Ismail Hasan Metareum, SH, Ketua Umum DPP PPP tersebut, mengatakan bahwa kegiatan kampanye hanyalah sebuah momentum sesaat untuk mencermati sejauh mana dukungan rakyat kepada partai di samping berusaha mencari simpati. Tetapi langkah yang paling menentukan sebenarnya justru berbagai kegiatan pradistinatif, artinya bahwa keberhasilan pemilihan umum banyak ditentukan oleh berbagai kegiatan sebelum dan menjelang pemilihan umum itu sendiri, seperti konsolidasi, pembinaan anggota, komunikasi dialogis dengan anggota dan masyarakat, kaderisasi, dan kegiatan aktualisasi aspirasi<sup>67</sup>. Prinsip-prinsip strategi kampanye yang ditentukan oleh DPP tidak selalu terlaksana secara konsisten ke bawah, terutama tingkat desa/kelurahan.

Namun, ketiadaan kampanye partai-partai politik Islam yang lebih bersifat fisik di masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 2014 nampaknya bukanlah karena adanya perubahan strategi kampanye melainkan lebih karena kondisi obyektif partai-partai politik Islam yang memang sangat lemah sehingga tidak mampu melakukan banyak kegiatan yang bersifat fisik, seperti pawai, keramaian-keramaian. Sementara kegiatan-kegiatan kampanye seperti pawai, keramaian-keramaian masih

---

<sup>66</sup>Dr. Burhan Magenda (Peny), *Sikap Politik Tiga Kontestan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hlm.35.

<sup>67</sup>Dr. Burhan Magenda (Peny), *Ibid*, hlm.35-36

dapat dilaksanakan pada pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, baik pemilihan umum 1999, 2004 maupun pemilihan umum 2009. Sebaliknya partai Golkar yang pada pemilihan umum 2004 tidak berhasil melaksanakan kampanye semarak dengan kegiatan-kegiatan fisik, namun pada pemilihan umum 2009 dan 2014 kembali menunjukkan kegiatannya sebagaimana sebuah partai besar.

Fungsionaris partai-partai politik Islam Kabupaten Kampar, dalam pengarahannya berkaitan dengan strategi kampanye pada pemilihan umum 2014 di Air Tiris khususnya dan di desa-desa pada umumnya cenderung memberikan otonomi dan kebebasan kepada para fungsionaris partai di desa-desa tersebut. Hal ini dilakukan mengingat bahwa para fungsionaris partai di desa/kelurahan lebih memahami masyarakat di desa/kelurahannya<sup>68</sup>. Kampanye partai-partai politik Islam menghadapi pemilihan umum 2014 di Air Tiris masih tetap meletakkan titik berat pada strategi bahwa partai-partai Islam adalah partainya umat Islam, pembawa aspirasi masyarakat Islam.<sup>69</sup>

Untuk melawan dan mementahkan isu-isu yang dilontarkan para kader partai-partai lain, partai-partai non Islam, bahwa yang penting bukan partainya tetapi apakah para kader-kader partai itu telah melakukan kerja nyata dalam masyarakat, partai-partai politik Islam di Air Tiris nampak kesulitan menetapkan dan menerapkan strategi yang jitu. Pada kenyataannya partai-partai politik Islam semakin kehilangan tokoh-tokoh informal berbobot yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PKS kabupaten Kampar, Oktober 2016.

<sup>69</sup> Wawancara Fungsionaris PPP kecamatan Kampar dan PPP kelurahan Air Tiris, November 2016.



pada pemilihan umum 2009 mereka sudah mulai pindah mendukung partai-partai lain, partai-partai politik non Islam.

Fungsionaris partai-partai politik Islam kabupaten Kampar, berulang kali, di depan massa partai, mengemukakan bahwa partai-partai politik Islam adalah partai yang paling istiqomah dan memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Islam. Dalam kaitannya dengan pembangunan, partai-partai politik Islam menegaskan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh seluruh rakyat, termasuk rakyat pendukung dan pemilih partai-partai politik Islam Air Tiris dalam setiap pemilihan umum. Pembangunan bukan hanya dilakukan dan hasil dari kelompok tertentu<sup>70</sup>. Namun strategi ini tidak membuahkan hasil, malah sebaliknya partai-partai politik Islam semakin terpuruk.

Pengaruh strategi kampanye yang menegaskan bahwa partai-partai politik Islam adalah penerus dari partai-partai politik Islam yang lahir pada masa kemerdekaan merupakan partainya umat Islam nampaknya tidak cukup mampu menarik kembali masyarakat Air Tiris kembali mendukung partai-partai politik Islam. Identifikasi masyarakat terhadap partai-partai Islam selama waktu-waktu yang lampau masih tersisa, tetapi tidak untuk partai-partai politik Islam, melainkan untuk tokoh-tokoh Islam yang lebih berperan nyata. Seorang imam masjid dan pimpinan Majelis Taklim yang melaksanakan dan memberi ceramah pada pengajian rutin hari Sabtu di RW VI kelurahan Air Tiris, menggambarkan identifikasi masyarakatnya terhadap partai-partai Islam, sebagai berikut :

“Masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang satu, demikian juga dalam memilih partai juga memilih partai

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Fungsionaris PPP kecamatan Kampar, Oktober 2016

yang satu, yaitu partai Islam. Walaupun dengan nama partai yang berubah-ubah, lambang yang berganti-ganti, tetapi tetap partai Islam.”<sup>71</sup>.

Dari pernyataan dan penjelasan di atas betapa telah kuat, sesungguhnya, identifikasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya sisa-sisa optimisme para kader partai-partai politik Islam. Tambahan lagi, bahwa masyarakat Air Tiris pada umumnya masih memandang bahwa partai Islam tetap eksis. Perubahan dan perkembangan partai-partai Islam, terutama sejak runtuhnya Orde Baru, di mana muncul banyak partai Islam, masyarakat Air Tiris tidak mengalami keterkejutan, di antara mereka merasa munculnya kembali rumah mereka yang hilang. Kenyataan tersebut, setidaknya-tidaknya, tergambar dari pernyataan berikut :

“Dulu partai Islam itu namanya Masyumi, gambarnya Bulan Bintang, kemudian ganti nama Parmusi, gambarnya tetap Bulan Bintang, kemudian ganti nama PPP, gambarnya Ka’bah, kemudian ganti gambar bintang, kemudian gambarnya Ka’bah lagi. Sekarang semua gambar lambang partai-partai Islam itu muncul kembali”<sup>72</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hijrahnya masyarakat Air Tiris dari partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 2009 dan pemilihan umum 2014 ke partai-partai lain, partai-partai politik non Islam, nampaknya, diyakini merupakan perpindahan yang sifatnya sementara, bisa jadi juga coba-coba, seperti seseorang yang berkunjung ke rumah tetangga. Kenyataan, pada pemilihan

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan H. Munir, seorang Imam Masjid di RW IV masyarakat Air Tiris yang telah memilih sejak pemilihan umum 1971, Oktober 2016.

<sup>72</sup>Wawancara dengan H. Ahmad Muzni, seorang tokoh senior masyarakat Air Tiris, November 2016

umum 2014 partai-partai politik Islam mengalami kekalahan yang lebih buruk.

Dalam memasuki masa kampanye pemilihan umum 2014, seperti biasa para kontestan pemilihan umum yang terdiri dari 12 partai politik melakukan kegiatan-kegiatan kampanye; seperti, pemasangan tanda gambar, mengikuti pawai kendaraan bermotor dan mobil, menghadiri pertemuan-pertemuan terbatas di tingkat RT atau RW, dan lain-lain.

Partai Golkar berusaha mengembalikan kejayaannya seperti pada pemilihan umum 1997, dengan mengungkapkan bahwa pembangunan akan lancar seperti pada masa dulu apabila partai Golkar lebih berperan. Demikian juga partai-partai politik non Islam lainnya, seperti PD, Partai Nasden dan Partai Gerindra. Para pemimpin informal yang kemudian menyeberang ke partai-partai non Islam dengan gencar menyampaikan doktrin ini dengan mengadakan kampanye di setiap wilayah RW Air Tiris, baik menggunakan forum-forum informal seperti pengajian di masjid-masjid maupun menggunakan forum-forum lainnya. Sementara itu, para calon legislatif ketika melakukan sosialisasi pada pertemuan-pertemuan, terutama di masjid-masjid, secara pribadi memberikan bantuan-bantuan untuk masjid, baik dalam bentuk bahan-bahan bangunan maupun berupa sejumlah dana. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan kembali mendukung dan memilih partai Golkar, juga partai-partai politik non Islam lainnya, pada pemilihan umum 2014<sup>73</sup>. Kenyataannya, pada pemilihan umum 2014, partai Golkar dan partai-partai politik non Islam lainnya keluar sebagai pemenang, dengan memperoleh 82,80% suara.

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Syafii Samosir, fungsionaris Partai Golkar Kampar, Oktober 2016.

Menghadapi strategi kampanye partai-partai politik non Islam ini, para fungsionaris partai-partai politik Islam di Air Tiris yang didukung oleh terutama para kader barunya, dengan susah payah dan penuh hambatan berhasil menyelenggarakan kegiatan kampanye, salah satunya seperti partai Golkar dan partai-partai non Islam lainnya, yaitu melakukan sosialisasi di masjid-masjid. Namun kegiatan kampanye tersebut tidak memperoleh sambutan masyarakat. Partai-partai politik Islam di Air Tiris pada pemilihan umum 2014 mengalami perolehan suara yang sangat mengecewakan.

#### **4.2.4.6. Hasil Penghitungan Suara.**

Masyarakat yang memiliki hak pilih menuju ke TPS yang tersebar di Air Tiris. Hasil penghitungan suara, didapatkan bahwa pada pemilihan umum 2014 ini, dari 12 partai politik peserta pemilihan umum terdapat 12 partai politik yang memperoleh suara. Perolehan suara partai-partai politik Islam hanya mencapai 17,20% suara, terdiri dari PKB 8,0%, PKS 1,5%, PAN 3,9%, PPP 2,9%, dan PBB 0,9% . Perolehan suara partai-partai politik non Islam mencapai 82,82% suara, terdiri dari Partai NasDem 16,6%, PDIP 1,4%, Partai Golkar 56,7%, Partai Gerindra 3,4%, Partai Demokrat 3,2%, Partai Hanura 0,4% dan PKPI 0,1%. Perolehan suara partai-partai non Islam ini merupakan capaian tertinggi dalam pemilihan umum di Air Tiris.

#### **4.2.5. Analisa Hasil Wawancara**

Perubahan Orientasi Politik masyarakat Air Tiris pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 juga diperoleh melalui wawancara dengan 100 responden masyarakat Air Tiris. Dari wawancara tersebut diperoleh suatu keadaan di mana perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris disebabkan oleh

melemahnya politik aliran, melemahnya identifikasi kepartaian dan peran pemimpin yang masih dominan.

Data yang telah diperoleh melalui Instrumen Penelitian yang terdiri dari 12 instrumen berupa daftar pertanyaan/pernyataan yang telah ditentukan dianalisa dengan menggunakan Skala Likert sebagai skala pengukurannya. Sedangkan analisa dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 35 orang yang menjawab SS =  $35 \times 5 = 175$   
 Jumlah skor untuk 44 orang yang menjawab ST =  $44 \times 4 = 176$   
 Jumlah skor untuk 10 orang yang menjawab RG =  $10 \times 3 = 30$   
 Jumlah skor untuk 6 orang yang menjawab KS =  $6 \times 2 = 12$   
 Jumlah skor untuk 5 orang yang menjawab TS =  $5 \times 1 = 5$   
 Total = 398

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item =  $5 \times 100 = 500$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian untuk instrumen nomor 1 adalah 398. Berdasarkan data tersebut maka tingkat persetujuan terhadap alasan perubahan orientasi politik =  $(398:500) \times 100\% = 79,6\%$  dari yang diharapkan (100%).

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut :

\_\_\_\_\_TS\_\_\_\_\_KS\_\_\_\_\_RG\_\_\_\_\_ST\_\_\_\_\_SS  
 100 200 300 398 400 500

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 398 terletak pada daerah setuju (ST).

Dengan cara yang sama skor dari instrumen 2 sampai dengan instrumen 12 dapat dihitung.

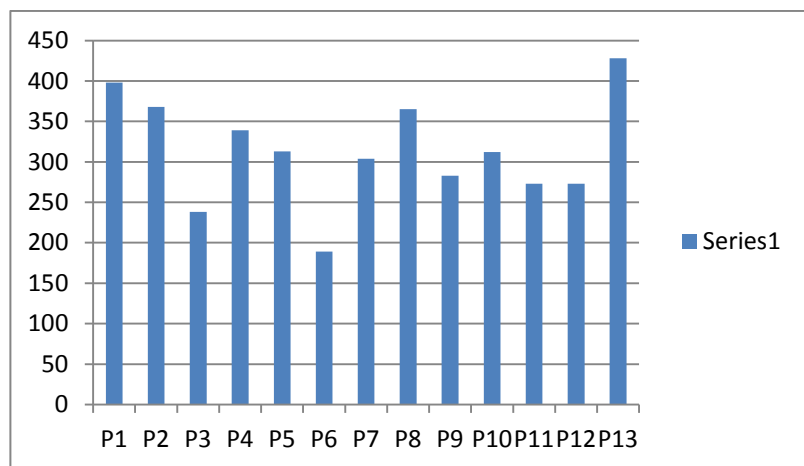
Tabel 4.11.  
Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban					Analisa	
		SS	ST	RG	KS	TS	Jumlah Skor	Tingkat pstujan
1	1	35 175	44 176	10 30	6 12	5 5	100 398	79,6 % ST
2	2	27 135	39 156	17 51	9 18	8 8	100 368	73,6 % ST
3	3	10 50	15 60	14 42	25 50	36 36	100 238	47,6 % RG
4	4	20 100	35 140	19 57	16 32	10 10	100 339	67,8 % ST
5	5	19 95	18 72	34 102	15 30	14 14	100 313	62,6 % ST
6	6	5 25	5 20	10 30	34 68	46 46	100 189	37,8 % KS
7	7	15 75	23 92	28 84	19 38	15 15	100 304	60,8 % ST
8	8	20 100	45 180	20 60	10 20	5 5	100 365	73,0 % ST
9	9	15 75	19 76	23 69	20 40	23 23	100 283	47,6 % RG
10	10	14 70	33 132	19 57	19 38	15 15	100 312	64,2 % ST
11	11	10 50	24 96	18 54	25 50	23 23	100 273	54,6 % RG
12	12	15 75	25 100	20 60	15 30	25 25	100 273	54,6 % RG
13	13	28 140	72 288	0 0	0 0	0 0	100 428	85,6 % SS

Keterangan :

1. Kelompok Partai Politik A =  
PPP/PAN/PKS/PBB/PKB/PBR
2. Kelompok Partai Politik B =  
GOLKAR/PDIP/GERINDRA/Partai  
Demokrat/NasDem/Hanura/PKPI
3. SS = Sangat Setuju      diberi skor    5  
ST = Setuju                diberi skor    4  
RG = Ragu-ragu            diberi skor    3  
KS = Kurang Setuju        diberi skor    2  
TS = Tidak Setuju          diberi skor    1

Gambar 4.4.  
Nilai Skor Hasil Wawancara

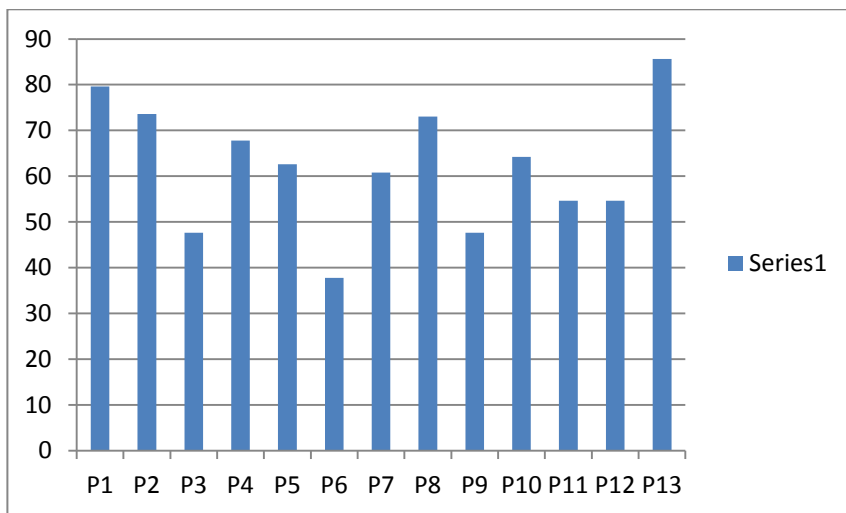


Sumber : Diolah dari wawancara

Gambar di atas menunjukkan skor tingkat persetujuan dari masyarakat terhadap isu-isu identitas

keagamaan, politik aliran, dalam kaitannya dengan orientasi politik masyarakat Air Tiris. Skor tersebut menunjukkan, tidak setuju dengan skor 1-100, kurang setuju dengan skor 101-200, ragu-ragu dengan skor 201-300, setuju dengan skor 301-400, dan sangat setuju dengan skor 401-500.

Gambar 4.5  
Prosentase Tingkat Persetujuan Hasil Wawancara



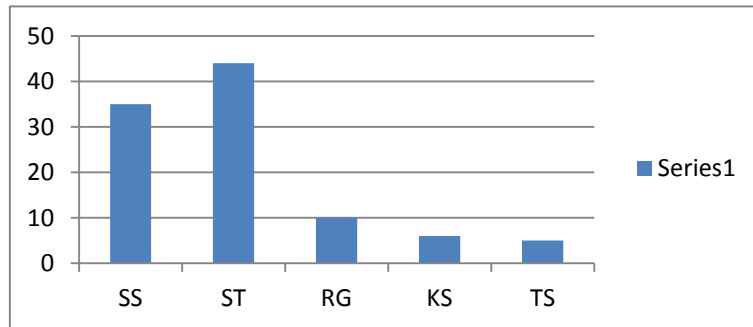
Sumber : Diolah dari wawancara

Gambar di atas menunjukkan prosentase tingkat persetujuan dari masyarakat terhadap isu-isu identitas keagamaan, politik aliran, dalam kaitannya dengan orientasi politik masyarakat Air Tiris. Prosentase tersebut menunjukkan, tidak setuju dengan prosentase 1-20, kurang



setuju dengan prosentase 21-40, ragu-ragu dengan prosentase 41-60, setuju dengan prosentase 61-80, dan sangat setuju dengan prosentase 81-100.

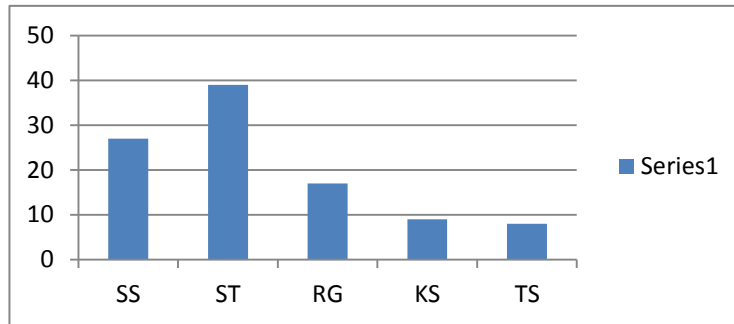
Gambar 4.6.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Kepemimpinan



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 398 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 79,6 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dan gaya figur kepemimpinan partai politik mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat Air Tiris mengikuti saran dan arahan para elit. Namun demikian elit masyarakat Air Tiris tidak lagi membawa masyarakatnya untuk memilih partai-partai politik Islam.

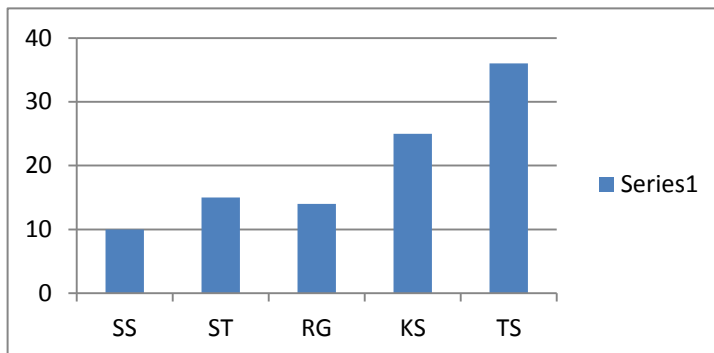
Gambar 4.7.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Karakter 1



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 368 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 73,6 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan pada calon legislatif atau figur mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat Air Tiris melihat dan mempertimbangkan karakter figur atau calon legislatif dalam perubahan orientasi politik mereka. Namun demikian karakter ke-Islaman dari para figur tidak mengarahkan kepada memilih partai-partai politik Islam.

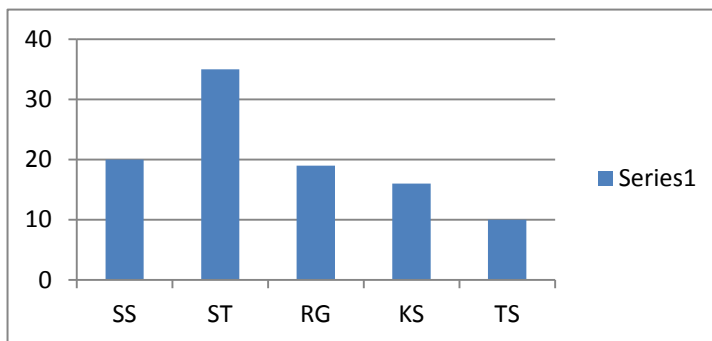
Gambar 4.8.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Karakter 2



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 238 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 47,6 % dan masuk dalam kategori ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan sembako dan atau uang dari calon legislatif atau figur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris hanya sebagian dipengaruhi oleh pemberian bantuan sembako dan atau uang.

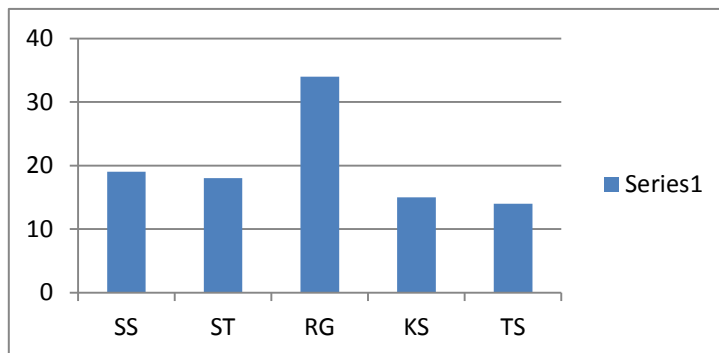
Gambar 4.9.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Karakter 3



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 339 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 67,8 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa karakter kedermawanan calon legislatif mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat Air Tiris melihat dan mempertimbangkan kedermawanan calon legislatif. Calon legislatif yang dermawan dan santri banyak yang menjadi calon legislatif dari partai politik bukan Islam.

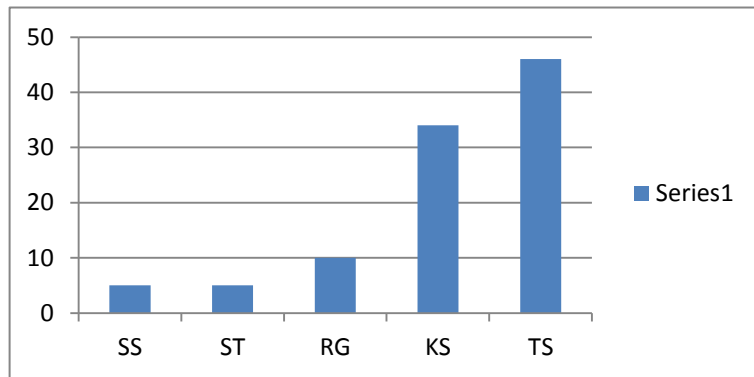
Gambar 4.10.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Karakter 4



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 313 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 62,6 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa karakter ideologi partai politik mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa identifikasi kepartaian politik Islam masyarakat Air Tiris telah memudar.

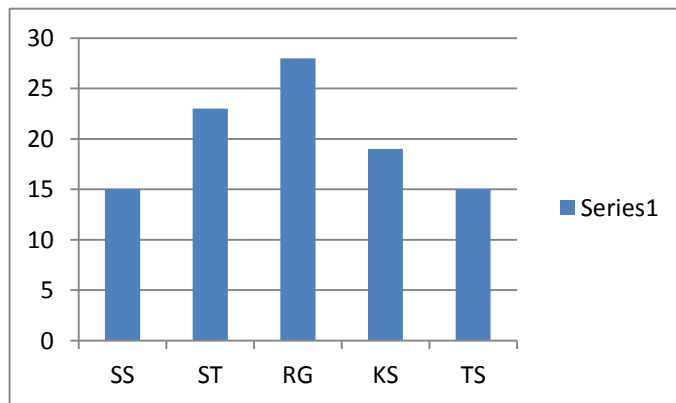
Gambar 4.11.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Lambang



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 189 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 37,8 % dan masuk dalam kategori kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa tanda gambar/lambang partai politik tidak mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa identifikasi kepartaian politik Islam masyarakat Air Tiris telah memudar.

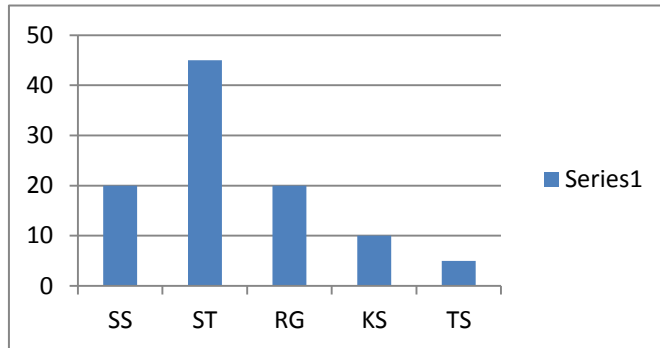
Gambar 4.12.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Strategi Rekrutmen 1



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 304 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 60,8 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan kepada figur pengurus partai politik mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat Air Tiris mempertimbangkan strategi partai politik dalam melakukan rekrutmen pemimpin pengurus partai politik. Kekompakan dan konflik dalam pengurus partai politik menjadi pertimbangan perubahan orientasi politik.

Gambar 4.13.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Strategi Rekrutmen 2

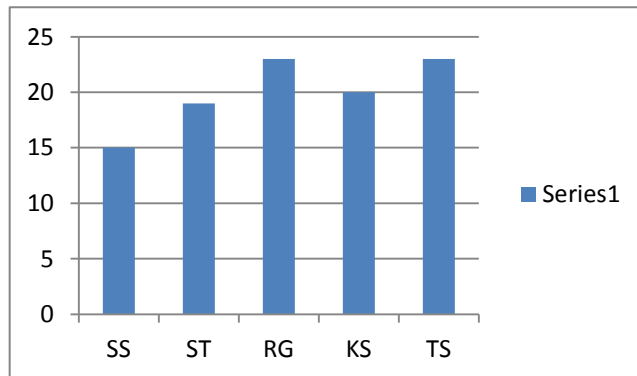


Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 365 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 73,0 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mengenali karakter saleh/alim dari calon legislatif mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat Air Tiris cenderung menjatuhkan pilihan pada calon legislatif yang saleh/alim walaupun mereka adalah calon legislatif dari partai politik bukan Islam. Partai politik yang berhasil merekrut calon legislatif yang saleh/alim cenderung mendapatkan simpati masyarakat.



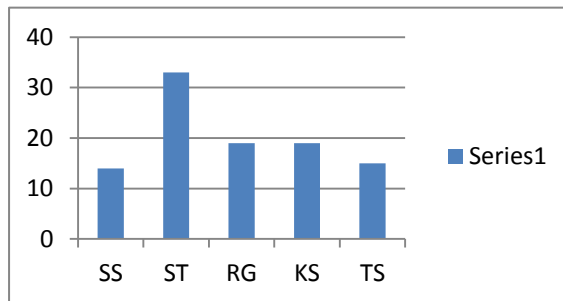
Gambar 4.14.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Strategi Rekrutmen 3



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 283 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 47,6 % dan masuk dalam kategori ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pamor para kyai/imam/tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum telah merosot. Mereka cenderung kurang berperan dalam mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam.

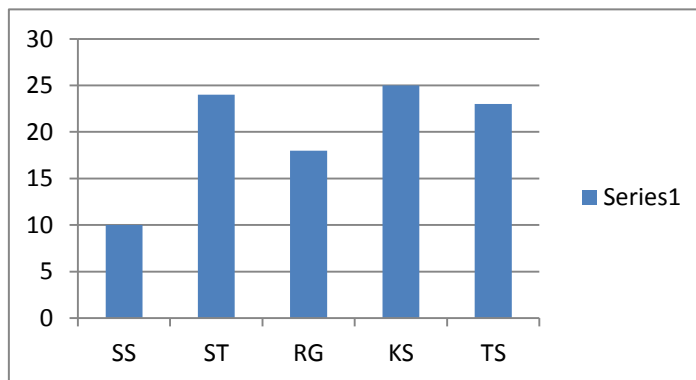
Gambar 4.15.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Strategi Kampanye 1



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 312 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 64,2 % dan masuk dalam kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa cara atau bentuk kampanye partai politik mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari memilih partai-partai politik Islam berubah menjadi memilih partai-partai politik bukan Islam. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat Air Tiris cenderung menjatuhkan pilihan pada pemilihan umum dipengaruhi oleh cara atau bentuk kampanye partai politik.

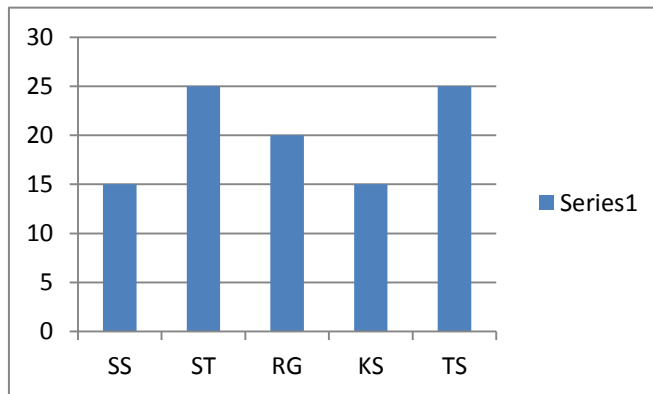
Gambar 4.16.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Strategi Kampanye 2



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 273 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 54,6 % dan masuk dalam kategori ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan bahan bangunan dan atau uang bagi masjid atau mushalla tidak cukup mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum. Mereka tidak dengan sendirinya cenderung memilih partai politik mereka yang memberikan bantuan kepada masjid atau mushalla.

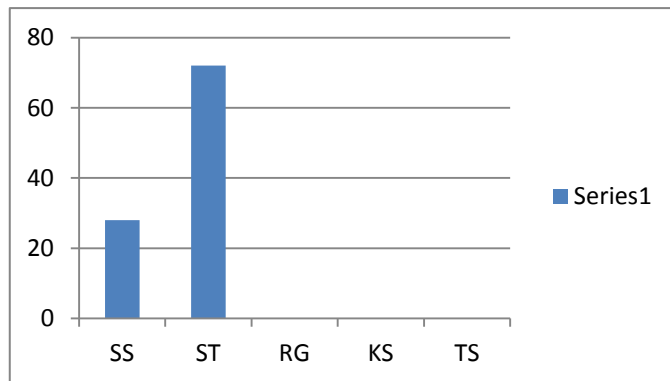
Gambar 4.17.  
Analisa Hasil Wawancara  
Aspek Strategi Kampanye 3



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 273 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 54,6 % dan masuk dalam kategori ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bantuan bahan bangunan dan atau uang bagi pembangunan atau perbaikan infra struktur jalan/gang dan laian-lain tidak cukup mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum. Mereka tidak dengan sendirinya cenderung memilih partai politik mereka yang memberikan bantuan kepada pembangunan infra struktur jalan/gang dan lain-lain.

Gambar 4.18.  
Analisa Hasil Wawancara  
Perubahan Orientasi Politik



Sumber : Diolah dari wawancara

Analisa gambar di atas menghasilkan skor 428 dan tingkat persetujuan masyarakat sebesar 85,6 % dan masuk dalam kategori sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemilih/responden memilih kelompok partai politik B setelah pada pemilu sebelumnya memilih kelompok partai politik A.

#### 4.2.6. Analisa Kuantitatif dengan Korelasi Regresi

Tabel 4.12. Korelasi Antar Vareabel

	Mean	Std. Dev.	Kep.	Agm	Lbg	Rekmt	Kpny	Prku
Kep	3,97	1,06794	1					
Agm	3,1775	2,38808	,092	1				
Lbg	1,8200	,99879	,099	.207*	1			
Rek	3,186667	2,49978	,074	.483**	,130	1		
Kpny	2,943333	2,93035	-,040	.407**	.310**	.232*	1	
Prku	4,3000	,46057	-,043	,080	,075	,107	,038	1
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

Tabel di atas merupakan tabel korelasi antar variabel tanpa menyertakan variable intervening. Pada penelitian ini menggunakan 100 responden dengan nilai interval kepercayaan (95%) dengan nilai 0.195 dan interval kepercayaan (99%) dengan nilai 0.256. Berdasarkan table di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Besaran hubungan antara variabel kepemimpinan dengan perilaku adalah -0,043 hal ini menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada korelasi antara variabel Kepemimpinan (X1) dengan Perilaku (Y).
2. Besaran hubungan antara variabel agama dengan perilaku adalah 0,080 data tersebut menunjukkan hubungan antara variabel agama dengan perilaku menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada korelasi antara varibel Agama (X2) dengan Perilaku (Y).

3. Besaran hubungan antara variabel lambang dengan perilaku adalah 0,075 hal ini menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada korelasi antara variabel Lambang (X3) dengan Perilaku (Y).
4. Besaran hubungan antara variable rekrutmen dengan perilaku adalah 0,107 hal ini menunjukkan hubungan negative atau tidak ada korelasi antara variable Rekrutmen (X4) dengan Perilaku (Y).
5. Besaran hubungan antara variabel kampanye dengan perilaku adalah 0,038 hal ini menunjukkan hubungan negative atau tidak ada korelasi antara variabel Kampanye (X5) dengan Perilaku (Y).

Tabel 4.13.  
Korelasi dengan Menyertakan Intervening

Intervening		Prku	Kep.	Agm	Lbg	
Rekmt & Kpnye	Prku	Correlation	1,000	-,051	,029	,060
		Significance (2-tailed)		,619	,773	,556
		df	0	96	96	96
	Kep.	Correlation	-,051	1,000	,090	,113
		Significance (2-tailed)	,619		,378	,269
		df	96	0	96	96
	Agm	Correlation	,029	,090	1,000	,073
		Significance (2-tailed)	,773	,378		,478
		df	96	96	0	96
	Lbg	Correlation	,060	,113	,073	1,000
		Significance (2-tailed)	,556	,269	,478	
		df	96	96	96	0

Hasil tabel korelasi di atas merupakan hasil korelasi dengan menyertakan variabel intervening. Variabel intervening tersebut adalah variabel rekrutmen dan variabel kampanye. Berdasarkan hasil tabel output korelasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Besar hubungan antara variabel kepemimpinan dengan perilaku adalah -0,051. Hal ini menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada korelasi antara variabel Kepemimpinan (X1) dengan Perilaku (Y).
2. Besar hubungan antara variabel agama dengan perilaku adalah 0,029. Hal ini menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada korelasi antara variabel Agama (X2) dengan Perilaku (Y).
3. Besar hubungan antara variabel lambang dengan perilaku adalah 0,060. Hal ini menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada korelasi antara variabel Lambang (X3) dengan Perilaku (Y).

Tabel 4.14.  
Korelasi Linear Regression

Variabel	Linear Regression
Kepemimpinan	-,043
Agama	,080
Lambang	,075
Rekrutmen	,107
Kampanye	,038
F	0,373
R <sup>2</sup>	0,019
AR <sup>2</sup>	-0,03
a. Dependent Variable: Perilaku	



1. Variabel kepemimpinan mempengaruhi sebesar 4,3% terhadap variable perilaku.
2. Variabel agama mempengaruhi sebesar 8% terhadap variabel perilaku.
3. Variabel lambang mempengaruhi sebesar 7,5% terhadap variabel perilaku.
4. Variabel rekrutment mempengaruhi sebesar 10,7% terhadap variabel perilaku.
5. Variabel Kampanye mempengaruhi sebesar 3,8% terhadap variabel perilaku.

#### **4.3. Faktor Pengaruh Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum Era Reformasi**

Menyimak analisis perkembangan orientasi politik masyarakat Air Tiris dengan menganalisa perolehan suara partai-partai politik Islam pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 di atas dapat dilihat faktor pengaruh perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam, yang ditandai dengan perolehan suara partai-partai politik Islam pada masing-masing pemilihan umum, baik partai-partai politik Islam mengalami kemenangan maupun partai-partai politik Islam mengalami kekalahan. Dari kondisi tersebut, kemudian, dapat dilihat faktor pengaruh perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam yang ditandai dengan penurunan perolehan suara partai-partai politik Islam. Partai-partai politik Islam di Air Tiris mengalami perkembangan perolehan suara yang memiliki kekhasan tersendiri. Pada pemilihan umum 1999 dan 2004, partai-partai politik Islam mampu meraih suara masing-masing 86,53% dan 80,30%. Pada pemilihan umum 2009 partai-partai politik Islam di Air Tiris menurun cukup drastis, hanya

meraih 46,72% suara, dan mengalami penurunan lebih tragis dengan hanya meraih suara 17,20% suara pada pemilihan umum 2014.

Melalui pengamatan, wawancara langsung, wawancara menggunakan *interview* terhadap 100 orang warga masyarakat Air Tiris dan analisa yang cermat diyakini dapat menghasilkan analisa yang menjelaskan perubahan orientasi politik masyarakat. Pengamatan yang cermat didapatkan bahwa kegiatan keagamaan masyarakat Air Tiris cukup intensif dengan fasilitas simbol keagamaan, misalnya : Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, Madrasah dan sebagainya, memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Air Tiris dapat dikategorikan sebagai masyarakat santri. Dalam hubungannya dengan pilihan dalam pemilihan umum, masyarakat Air Tiris lebih mengidentifikasikan diri pada partai-partai Islam. Sosialisasi politik melalui lembaga-lembaga keagamaan pada awalnya mampu menjaga identifikasi tersebut dari pemilihan umum ke pemilihan umum. Seperti masyarakat desa umumnya, masyarakat desa terbagi menjadi sebagian kecil para pemuka masyarakat yang biasa disebut kelompok elite berhadapan dengan sebagian besar masyarakat yang biasa disebut kelompok massa, dengan kelompok elite didominasi oleh para tokoh informal. Melalui pola hubungan yang sedikit banyak bersifat *patron client*, perubahan-perubahan kelompok elite, baik secara individu maupun secara kelompok, akan berpengaruh pada perubahan masyarakat pada umumnya, termasuk kaitannya dengan pilihan dalam pemilihan umum.

Dalam kasus pemilihan umum 1999, di mana telah terjadi perubahan sistem kepartaian dan muncul 48 partai politik peserta pemilihan umum. Muncul partai-partai politik

Islam baru, seperti PAN, PK, PKB, PBB, yang menjadikan PPP bukan lagi satu-satunya partai Islam. Paradigma lama, di mana seluruh pegawai negeri, tentara, polisi dan para pejabat wajib mendukung dan memilih Golkar, pada pemilihan umum 1999 tidak berlaku lagi, bahkan seluruh pegawai negeri, tentara, dan polisi tidak bisa menjadi anggota partai politik, sementara para pemimpin informal bebas bergabung atau tidak dengan partai politik.

Masyarakat Air Tiris yang telah terbentuk menjadi masyarakat santri dan telah mengenal dan menjatuhkan pilihan pada partai-partai Islam sejak pemilihan umum 1955, serta didukung oleh kekompakan kelompok elite yang didominasi para tokoh informal, pada pemilihan umum 1999, partai-partai politik Islam menjadi pemenang mutlak, dengan meraih suara yang meyakinkan sebesar 86,53%. Dalam pemilihan umum 1999 ini para tokohpun mulai tersebar bergabung dengan partai-partai baru, terutama partai-partai Islam. Perubahan system yang terjadi menjelang pemilihan umum 1999 ini telah menjadikan para tokoh masyarakat Air Tiris mengalami *anomaly*, mengalami perubahan sikap yang menjadikan partai Golkar mengalami kemerosotan drastis dan munculnya pemenang partai Islam baru yaitu PAN. Sementara suara PPP masih tetap terjaga bahkan mengalami peningkatan walau sangat sedikit. Perubahan sikap kelompok elite seperti ini ternyata diikuti oleh sebagian besar masyarakat Air Tiris dan membuyarkan identifikasi masyarakat terhadap partai Golkar sebagai partai pelindung dan pembangun yang telah puluhan tahun terbentuk. Sementara partai politik Islam baru PAN, berjaya. Hal ini menjadikan partai-partai politik Islam di Air Tiris menjadi pemenang mutlak berhadapan dengan partai-partai politik non-Islam.

Kondisi demikian memperlihatkan bahwa sesungguhnya sebutan masyarakat santri pada masyarakat Air Tiris pada dasarnya menjadi lebih nyata. Kondisi menjelang pemilihan umum 2004 mengalami perubahan, dengan berbagai alasan para fungsionaris PPP di Air Tiris mengundurkan diri dan bergabung dengan PBR (Partai Bintang Reformasi), partai pecahan dari PPP. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya masyarakat, khususnya pada kelompok elite, yang kemudian diikuti oleh masyarakat.

Pada pemilihan umum 2004, partai Islam baru PBR memperoleh kemenangan dengan 41,00% suara, sementara PPP mengalami penurunan hanya meraih 11,6% suara, partai Golkar mengalami penurunan lagi dengan hanya meraih 10,9% suara. Partai-partai Islam baru yang lain, PBB dan PKS mengalami kenaikan yang cukup berarti. Partai pemenang pemilihan umum 1999, PAN, mengalami kemerosotan tajam, hanya meraih 9,7%, jauh di bawah perolehan suara pada pemilihan umum 1999 yakni 43,84% suara. Namun, untuk kelompok partai-partai Islam, pada pemilihan umum 2004 ini tetap masih mendominasi suara dengan 80,30%.

Pemilihan umum 2009 di masyarakat Air Tiris menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Kalau pemilihan umum 1999 dan 2004 dimenangi oleh partai-partai Islam, sebaliknya pada pemilihan umum 2009 lebih didominasi partai-partai non Islam. Partai-partai non Islam, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP masing-masing memperoleh 43,7%, 8,36% dan 3,7% yang berarti perolehan suara lebih dari 50%. Sementara-partai-partai Islam secara keseluruhan memperoleh kurang dari 50%, dengan PBR dan PAN memperoleh suara terbesar, masing-masing 17,3% dan 16,7%.

Hal ini terjadi setelah terjadi perubahan system di mana masyarakat pemilih dapat memilih langsung calon legislative yang terpampang gambarnya pada kertas suara. Di samping itu, calon legislative yang terjun langsung dalam kampanye atau sosialisasi diri tidak sulit untuk menyerahkan bantuan langsung, terutama saat-saat menjelang dan pada masa kampanye, baik berupa dana maupun bahan-bahan bangunan untuk pembangunan, terutama pembangunan masjid dan mushalla<sup>74</sup>. Calon wakil rakyat yang paling mampu melaksanakan hal itu memperoleh sambutan masyarakat yang sepadan. Dan pada pemilihan umum 2009 ini partai Golkar dan partai Demokrat yang paling banyak secara cerdas menggunakan kesempatan.

Pemilihan umum 2014 di Air Tiris terjadi pembalikan dengan pemilihan umum 1999, di mana partai-partai politik Islam dominan pada pemilu 1999 menjadi kalah telak pada pemilihan umum 2014, sebaliknya partai-partai politik non Islam yang pada pemilihan umum 1999 kalah telak menjadi dominan pada pemilihan umum 2014. Kalau pemilihan umum 1999 dan 2004 dimenangi oleh partai-partai Islam, sebaliknya pada pemilihan umum 2009 dan 2014 lebih didominasi partai-partai non Islam. Pada pemilihan umum 2014 partai-partai non Islam, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PDIP dan PKPI, secara keseluruhan mencapai perolehan suara 82,80%. Sementara-partai-partai Islam secara keseluruhan hanya memperoleh kurang dari 17,20% suara, yang terdiri dari PKB, PAN, PPP, PKS dan PBB. Hal ini terjadi setelah terjadi perubahan system di mana masyarakat pemilih dapat memilih langsung calon

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan menyebarkan daftar pertanyaan terhadap 100 responden, Mei 2017.

legislative yang terpampang gambarnya pada kertas suara difahami secara lebih meluas di kalangan masyarakat.

Calon legislative yang terjun langsung dalam kampanye atau sosialisasi diri bisa langsung menyerahkan bantuan-bantuan langsung, terutama saat-saat menjelang dan pada masa kampanye, baik berupa dana maupun bahan-bahan bangunan untuk pembangunan, terutama pembangunan masjid, mushalla dan sarana masyarakat yang lain<sup>75</sup>. Calon wakil rakyat yang paling mampu melaksanakan hal itu memperoleh sambutan masyarakat yang sepadan. Dan pada pemilihan umum 2014 ini partai-partai non Islam, terutama Partai Golkar dan Partai NasDem yang paling banyak secara cerdas menggunakan kesempatan dan peluang ini.

Sementara analisa korelasi regresi menunjukkan kepemimpinan partai-partai Islam, karakter keislaman partai-partai politik Islam, agama, penggunaan lambang partai-partai Islam yang diasosiasikan dengan Islam, rekrutmen fungsionaris partai yang dilakukan oleh partai-partai politik Islam, dan kampanye konvensional yang menonjolkan isu-isu agama partai-partai politik Islam tidak berpengaruh terhadap perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris.

Hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai Islam, yang ditandai dengan semakin merosotnya perolehan suara partai-partai politik Islam, menunjukkan telah terjadinya kecenderungan, pertama, bahwa kaum santri yang oleh banyak pengamat dipandang cenderung menjatuhkan pilihannya pada partai Islam atau partai yang dipandang islami, telah mulai tidak selalu menjatuhkan

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan menyebarkan daftar pertanyaan terhadap 100 responden, Mei 2017

pilihannya pada partai Islam atau partai yang mereka pandang sebagai partai Islam, telah beralih ideologi<sup>76</sup>.

Dalam hubungannya dengan pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 di masyarakat Air Tiris, kaum santri telah tidak selalu cenderung menjatuhkan pilihannya terhadap partai-partai politik Islam, dengan kata lain hubungan antara agama dan memilih, politik aliran, telah melemah. Kedua, identifikasi atau loyalitas masyarakat santri terhadap partai Islam telah memudar, dan ketiga dalam masyarakat pedesaan, para pemuka masyarakat masih tetap sangat berpengaruh terhadap arah dan gerak warga masyarakat pada umumnya. Kekompakan para pemuka masyarakat akan membawa kekompakan masyarakat pada umumnya, sebaliknya terpecahnya para pemuka masyarakat akan mengakibatkan terpecahnya warga masyarakat pada umumnya<sup>77</sup>. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, pilihan masyarakat terhadap partai politik peserta pemilihan umum tertentu lebih ditentukan oleh ke mana para pemuka masyarakat tersebut menjatuhkan pilihannya.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan menyebarkan daftar pertanyaan terhadap 100 responden, Mei 2017

<sup>77</sup>Wawancara dengan menyebarkan daftar pertanyaan terhadap 100 responden, Mei 2017